

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

**DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DINIYAH**

**PENDEKATAN *GRASSROOTS***

**A. Pengembangan Kurikulum di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam**

**1. Pengertian Kurikulum**

Kata kurikulum adalah kata yang sering diperbincangkan di kalangan para pendidik (*teaching staff*) dan tenaga kependidikan lainnya (*non-teaching staff*), sebab pekerjaan mereka selalu terkait dengan kegiatan kurikulum di sekolah atau madrasah. Kebanyakan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (tenaga TU, laboran, pustakawaan dan sebagainya) belum mengetahui arti kurikulum secara definitif, baik dari segi etimologi maupun dari segi terminologi. Hal itu terlihat pada saat salah satu kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), sewaktu ditanya penulis guru-guru banyak yang tidak dapat mengemukakan arti kurikulum secara definitif.<sup>1</sup>

**a. Pengertian Kurikulum Secara Etimologi**

Wiles dan Bondi menyebutkan bahwa istilah kurikulum sudah diketahui keberadaannya sekitar tahun 1820-an, dan istilah ini secara modern pertama kali dipakai di Amerika Serikat setelah satu abad kemudian<sup>2</sup>. Kata “kurikulum” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*currere*” berupa kata kerja *to run* berarti “lari

---

<sup>1</sup> Kegiatan PLPG LPTK – IAIN Antasari Angkatan V Tahun 2015, tanggal 9 s.d. 17 Oktober 2015 di BPKB Banjarbaru.

<sup>2</sup> Jon Wiles dan Joseph Bondi, *Curriculum Development: A Guide to Practice*, (New Jersey: Pearson Education. Inc, 2007), h. 2

cepat, tergesa-gesa atau menjalani.”<sup>3</sup> Sedangkan, Subandijah mengemukakan bahwa kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang pada awalnya kata tersebut dipakai dalam bidang olah raga, yaitu kata *currere*.<sup>4</sup> Merujuk pada Kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, kata *curriculum* berarti: “*the subjects included in a course of study or taught at a particular school, college, etc.*”<sup>5</sup> Dari kata *currere* tersebut diadopsi kedalam beberapa bahasa, salah satunya bahasa Inggris yang bermakna *course* atau *subject*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai mata pelajaran, mata diklat atau mata kuliah, dan dalam bahasa Arab diartikan *al m dda*, bentuk lain dikenal pula istilah “*minhaj al dir si*” (kurikulum mata pelajaran) atau “*minhaj al madrasah*” (kurikulum sekolah/madrasah).<sup>6</sup>

Kata *currere* merupakan kata kerja (*fi’il*), kemudian dijadikan kata benda (*isim mashdar*) menjadi “*curriculum*”. Kata kurikulum berbentuk *mufrad* (kata tunggal) yang memiliki beberapa makna:

- 1) Tempat perlombaan atau jarak yang harus ditempuh seorang pelari, dalam kereta perlombaan.
- 2) Jalan untuk pedati (delman) untuk perlombaan.
- 3) Perjalanan berupa pengalaman tanpa berhenti.

---

<sup>3</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum (sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h.12

<sup>4</sup> Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), h.1

<sup>5</sup> A. S. Hornby, *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, (Great Britain: Oxford University Press, 1995), h. 287

<sup>6</sup> Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 23

4) Jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari yang dimulai dari garis *start* sampai kepada garis *finish*.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian dari sudut pandang etimologis di atas, kata kurikulum pada awalnya dipakai dalam bidang olah raga, terutama pada cabang atletik. Namun perkembangan selanjutnya, istilah tersebut lebih populer dipakai dalam dunia pendidikan. Sebagian orang beranggapan bahwa arti pada poin (3) merupakan proses pembelajaran seseorang melalui pengalaman panjang, yakni pendidikan seumur hidup (*long life education*), dan sesuai dengan konteks pendidikan Islam bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hayat (*thulul hayah*). Selain itu, poin (3) tersebut bermakna bahwa pengalaman dapat memberikan seseorang berupa pembelajaran seperti pepatah dalam bahasa Inggris “*experience is the best teacher*”. Namun sebagian besar para pakar/ahli pendidikan berpendapat bahwa makna kurikulum yang poin (4) atau yang terakhir yang dianggap paling identik dengan proses belajar-mengajar (PBM), yaitu PBM yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan PBM sampai kepada penilaian atau evaluasi PBM, yakni mengukur pencapaian target kurikulum bahkan hasilnya dapat ditindak-lanjuti (*follow up*). Sehingga atas dasar dan pertimbangan tersebut, kemungkinan besar kata kurikulum dipakai sebagai istilah dalam dunia pendidikan hingga sekarang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan ....*, h.12

<sup>8</sup> S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bima Aksara, 2005), h. 5

## b. Pengertian Secara Terminologi

### 1) Pengertian dari Segi Tradisional (sempit)

Pada mulanya kata kurikulum diartikan sebagai *subject* atau mata pelajaran atau *al m ddah*. Secara tradisional (sempit) kata kurikulum diartikan sebagai bidang studi tertentu yang diajarkan sekolah/madrasah yang bertujuan untuk naik kelas dan/atau untuk lulus memperoleh sertifikat kelulusan, seperti ijazah. Soetopo dan Soemanto mendefinisikan kurikulum sebagai “Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau ijazah.”<sup>9</sup> Hal ini hampir senada dengan pendapat Giroux dan Pinnar yang dikutip oleh Syaifuddin Sabda yaitu berupa “*the data or information recorded in guides or text books and overlooks many additional elements that needed to be provided for in a learning plan.*”<sup>10</sup> Sementara itu, William B. Ragan yang dikutip Soetopo dan Soemanto mengemukakan, “*Traditionally, the curriculum has meant the subject taught in school, or course of study.*”<sup>11</sup> Kata kurikulum, menurut Taba, adalah “*A curriculum is a plan for learning: therefore, what is known about the learning process and development of individual bearing on shaping of a curriculum,*”<sup>12</sup> atau kata kurikulum berarti rencana untuk belajar (*a plan for learning*). Selain itu, Wiles dan Bondi menambahkan, “*the term of curriculum is*

---

<sup>9</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h. 12

<sup>10</sup> Henry A. Groux dan William Pinnar, *Curriculum and Instruction*, dalam Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan ...*, h. 25

<sup>11</sup> William B. Ragan, *Modern Elementary Curriculum*, dalam Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan.....*, h. 12

<sup>12</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development Theory and Practice*, (New York: Harcourt Brace & World, Inc, 1962), h. 11

*usually associated with a document such as text book, syllabus, teachers guide or learning package,*"<sup>13</sup> atau istilah yang selalu dikaitkan dengan dokumen seperti buku teks, silabus, dan pedoman guru atau paket belajar, atau rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Di sini kedudukan kurikulum dianggap sebagai *instructional guidance*, juga sebagai alat *anticipatory*, yaitu alat yang dapat meramalkan target kurikulum yang dapat dicapai diakhir pembelajaran. Dengan demikian kata kurikulum sekarang ini identik dengan pedoman pembelajaran, silabus atau buku-buku teks yang ditetapkan sebagai bidang studi atau mata kuliah.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran atau sejumlah bidang studi yang harus ditempuh dan dikuasai peserta didik secara intelektual (kognitif) untuk naik kelas atau untuk mendapatkan ijazah (lulus), dan sebagai rencana pelajaran (*lesson plan*) bagi guru. Bertitik tolak dari simpulan tersebut, tampak dalam proses pembelajaran peserta dipaksa secara kognitif harus menangkap materi dalam artian menghafal semua informasi yang disampaikan, dengan demikian terkadang terabaikan aspek-aspek lain, seperti aspek biologis, aspek sosiologis dan aspek psikologis. Oleh karena itu, konsep kurikulum secara tradisional ini kurang tepat diterapkan dalam pendidikan Islam.

## 2) Pengertian dari Segi Modern (luas)

Para pendidik dan ahli kurikulum berupaya memberikan batasan (definisi) kata kurikulum. Namun diantara mereka terkadang terjadi perbedaan konsep dan pemahaman. Hal tersebut kemungkinan diakibatkan adanya sudut

---

<sup>13</sup> Jon Wiles dan Joseph Bondi, *Curriculum Development...*, h.1

pandang dan latar belakang keilmuan berbeda. Meskipun demikian, secara maknawi definisi kurikulum pada intinya terkandung maksud dan pemahaman yang serupa.

John F. Kerr dalam Subandijah mendefinisikan kurikulum sebagai “*All the learning which is planned or guided by the school, whether it is carried on in groups or individually, inside of or outside of the school*”.<sup>14</sup> Di sini Kerr mengemukakan bahwa pembelajaran dapat berlangsung di mana saja, selama pembelajaran tersebut direncanakan dan difasilitasi oleh guru/sekolah. Hal ini pula yang direkomendasikan dalam konsep implementasi Kurikulum 2013, dimana proses pembelajaran terjadi kapan saja dan di mana saja dengan pembelajaran lingkungan jejaring.

Selanjutnya Albert I. Oliver mengemukakan kurikulum sebagai program pendidikan di sekolah dibagi ke dalam empat elemen/unsur dasar, yaitu: (1) unsur studi; (2) unsur pengalaman; (3) unsur pelayanan; dan (4) unsur kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*).<sup>15</sup> Berdasarkan pendapat ini, kurikulum dalam pengertian luas tidak saja yang terdapat dalam dokumen kurikulum yang tertulis tetapi ada kurikulum yang tersembunyi (*hidden curriculum*). *Hidden curriculum* itu sendiri banyak memberikan kontribusi dalam proses pendidikan terutama pendidikan akhlak atau karakter peserta didik.

Menurut Stratemeyer yang dikutip Syaifuddin, kurikulum dalam arti modern/luas adalah “*The sum total of the school efforts to influence learning*

---

<sup>14</sup> John F. Kerr, *Changing the Curriculum*, dalam Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi ...*, h. 2

<sup>15</sup> Albert I. Oliver, *Curriculum Improvement: A Guide Problem, Principles, and Process*, 2<sup>nd</sup> Edition, (New York: Harper & Row, 1977), h. 8

*whether in the classroom, play ground or out of school.*”<sup>16</sup> Nampak di sini, Stratemeyer lebih mempertegas bahwa kurikulum adalah upaya yang menyeluruh untuk memberikan efek pengiring yang baik dan positif kepada peserta didik, dan juga kegiatan pembelajarannya dapat terlaksana dan berlangsung di mana saja. Sementara itu, William B. Ragan dalam Soetopo, mengemukakan kurikulum dalam pengertian luas sebagai “... *all the experiences of the children for which the school accepts responsibility.*”<sup>17</sup> Pendapat ini, dimaksudkan bahwa kurikulum adalah menyangkut seluruh aspek, aktivitas dan pengalaman peserta didik yang berada di bawah pengawasan lembaga sekolah/madrasah, tanpa membedakan kurikulum tersebut apakah bersifat intra kurikuler, ko-kurikuler ataukah ekstra kurikuler. Semuanya adalah kurikulum, yang berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah atau di madrasah.

Pendapat Ronald C. Doll yang dikutip Hamdani Hamid menambahkan secara umum, definisi kurikulum yang dapat diterima sudah berubah dari isi mata pelajaran dan sejumlah mata pelajaran kepada semua pengalaman yang ditawarkan kepada peserta di bawah arahan dan bimbingan sekolah.<sup>18</sup> Daniel Tanner dan Laurel Tanner menambahkan “... *curriculum as that reconstruction of knowledge dan experience that enable the learner to grow in exercising*

---

<sup>16</sup> Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan ...*, h. 25

<sup>17</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h. 13

<sup>18</sup> Ronald C. Doll, *Curriculum Improvement Decision Making and Process*, dalam Hamdani Hamid, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 16.

*intelligent control of subsquence knowledge and experience*".<sup>19</sup> Oleh karena itu, kurikulum harus direncanakan secara sistematis dengan muatan pengetahuan dan pengalaman belajar, dan selalu mengikuti pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan sosial anak didik secara seimbang dan harmonis. Selain itu, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah "Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu."<sup>20</sup> Hal ini menandakan bahwa kurikulum menurut UU RI, tidak sekadar rencana, tetapi kurikulum terdiri dari beberapa komponen, seperti komponen tujuan, isi atau bahan pelajaran, dan evaluasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran.

Kurikulum secara luas dapat disimpulkan adalah keseluruhan pengalaman peserta didik, baik saat berada di dalam kelas dalam artian terjadwal, di luar kelas, seperti di halaman, di ruang praktek, di laboratorium atau perpustakaan, dan di luar sekolah, seperti kunjungan wisata dan ke museum yang mempunyai misi dan tujuan pembelajaran, program tersebut berada di bawah tanggung jawab sekolah.

Di lembaga pendidikan formal, seperti madrasah dan sekolah sebagian besar sudah menerapkan kurikulum dengan sudut pandang atau pengertian modern (konsep luas), yaitu mereka membagi tiga kegiatan kurikulum di sekolah, yaitu: (1) intra-kurikuler (kegiatan pembelajaran yang terjadwal di

---

<sup>19</sup> Daniel Tanner dan Laurel Tanner, *Curriculum Development: Theory into Practice*, 4<sup>th</sup> Edition, (Upper Saddle River, N.J: Merrill/Prentice Hall, 2007) , h.99

<sup>20</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 2005



dalam kelas yang bersifat tetap); (2) ko-kurikuler adalah kegiatan yang mendampingi kegiatan intra kurikuler (PR, les pelajaran tambahan, dan tugas lainnya), dan (3) ekstra-kurikuler (kegiatan diluar jadwal resmi bahkan dapat dilaksanakan pada hari libur), seperti pengembangan diri dalam kurikulum KTSP 2006. Konsep ini berlanjut pada kurikulum 2013 yang saat ini sudah diimplementasikan di sekolah-sekolah.

## **2. Pengertian Pengembangan Kurikulum**

Soetopo dan Soemanto mengemukakan bahwa istilah “pengembangan menunjuk pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara baru, yang selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terus dilakukan.”<sup>21</sup> Di kehidupan nyata banyak hasil pengembangan yang dapat dijumpai, seperti: modernisasi alat masak, alat pembersih, dan alat komunikasi.

Pengertian pengembangan kurikulum mempunyai langkah-langkah sbb:

- 1) Mendesain kurikulum baru atau mendesain kembali (*redesign*) kurikulum agar tetap sesuai dengan situasi dan kondisi (*up to date*).
- 2) Implementasi terbatas (uji coba) kurikulum baru di sekolah/madrasah tertentu yang diikuti dengan penilaian yang intensif.
- 3) Merevisi dan menyempurnakan terhadap komponen tertentu dalam kurikulum berdasarkan hasil penilaian pada poin 2).<sup>22</sup>

Oemar Hamalik mengutip pendapat Audrey Nichols dan S. Howard Nichols mengemukakan definisi pengembangan kurikulum (*curriculum*

---

<sup>21</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h, 45

<sup>22</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h. 46

*development*) adalah: “*the planning of the learning opportunities intended to bring about certain desired in pupils, and assesment of the extent to which these changes have taken place*”.<sup>23</sup>

Jika sebuah kurikulum baru sudah dianggap cukup mantap atau sempurna, maka tugas pengembangan kurikulum berakhir dan melahirkan kurikulum baru. Selanjutnya, kurikulum tersebut didiseminasi atau disebarluaskan, kemudian diterapkan ke sekolah atau madrasah secara masif dengan batas waktu tertentu, sambil melakukan pembinaan kurikulum. Hal ini yang disebut pembinaan kurikulum. Jadi istilah pengembangan kurikulum berasal dari *curriculum development* yang berarti peralihan total atau substansial mengenai beberapa komponen yang terdapat dalam sebuah kurikulum.

Pengembangan kurikulum tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek yang turut mempengaruhinya, seperti *mind set*, sistem nilai, proses pengembangan itu sendiri, termasuk kebutuhan peserta didik, masyarakat pemakai lulusan (*the user*), dan masyarakat umum.<sup>24</sup> Aspek-aspek tersebut dijadikan bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Sementara itu, “model pengembangan kurikulum merupakan satu alternatif prosedur dalam rangka mendesain (*designing*), menerapkan (*implementation*), dan mengevaluasi (*evaluation*)”.<sup>25</sup> Oleh karena itu, kurikulum bersifat dinamis,

---

<sup>23</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Cet. IV.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 96

<sup>24</sup> Kementerian Dikbud, *Pedoman Penerapan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta: Hotel UT, 2014), tth.

<sup>25</sup> Tim Pengembangan MKDP, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 78

dan selalu berkembang, sehingga terjadilah pembaharuan (*inovasi*) dalam sebuah kurikulum yang mengharuskan para pengembang (*curriculum designer and curriculum worker*) berupaya untuk menyahtuti berbagai tuntutan dan perubahan yang terjadi dengan mengembangkan kurikulum agar tetap relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. Konsep pengembangan dalam konteks penelitian ini lebih mengarah kepada *curriculum improvement*, yakni berusaha mendesain kembali (*redesign*) kurikulum pendidikan diniyah di beberapa lembaga pendidikan keagamaan di Kalimantan Selatan

### **3. Komponen-komponen Kurikulum**

Menurut bahasa komponen berarti “bagian dari keseluruhan atau unsur.”<sup>26</sup> Menurut istilah, komponen didefinisikan “sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam sebuah sistem.”<sup>27</sup> Sebuah kurikulum merupakan satu sistem yang sangat kompleks yang di dalamnya terdapat beberapa komponen, antara satu komponen dengan komponen lainnya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, antara satu unsur dengan unsur lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sukmadinata mengemukakan bahwa “kurikulum diumpamakan sebagai organisme makhluk hidup yang mempunyai unsur-unsur anatomi tertentu”.<sup>28</sup> Kurikulum yang mempunyai susunan unsur-unsur yang saling berhubungan dan

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 585

<sup>27</sup> Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Teori dan Praktek*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), h. 24

<sup>28</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan dan Prinsip Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1988), h. 110

mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, pihak pengembang kurikulum harus dapat menentukan apa saja komponen utama kurikulum, yang urgen dan berpengaruh dalam mendesain dan mengimplementasi, bahkan sampai kepada mengevaluasi dan merevisi kurikulum sekolah/madrasah.

Kurikulum adalah satu sistem yang cukup kompleks. Oleh karena itu, para ahli kurikulum berbeda sudut pandang mereka dalam menetapkan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah kurikulum. Sixten Marklund dalam Soetopo dan Soemanto, mengemukakan bahwa kurikulum terdiri tiga belas komponen yang terperinci, mulai dari unsur regulasi pendidikan sampai kepada unsur administrasi dan kerjasama antara guru dan siswa. Selanjutnya, Soetopo dan Soemanto, mencoba menyederhanakan pendapat Marklund tersebut menjadi tujuh komponen. Hal yang senada juga terdapat dalam kurikulum tahun 1975 yang menetapkan tujuh komponen.<sup>29</sup> Sementara itu, Subandijah membagi komponen kurikulum kepada dua klasifikasi, yaitu komponen pokok yang terdiri dari lima komponen, yaitu: (1) tujuan, (2) isi/materi, (3) organisasi/strategi, (4) media, dan (5) PBM. Sedangkan komponen penunjang terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) sistem administrasi dan supervisi, (2) pelayanan BP, dan (3) sistem evaluasi<sup>30</sup>. Sebenarnya Abdullah Idi sependapat dengan Subandijah dengan lima komponen pokok, namun yang berbeda dengan Subandijah adalah menempatkan komponen evaluasi sebagai komponen penunjang<sup>31</sup>. Oleh karena

---

<sup>29</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h. 24

<sup>30</sup> Subandijah. *Pengembangan dan Inovasi ...*, h. 6

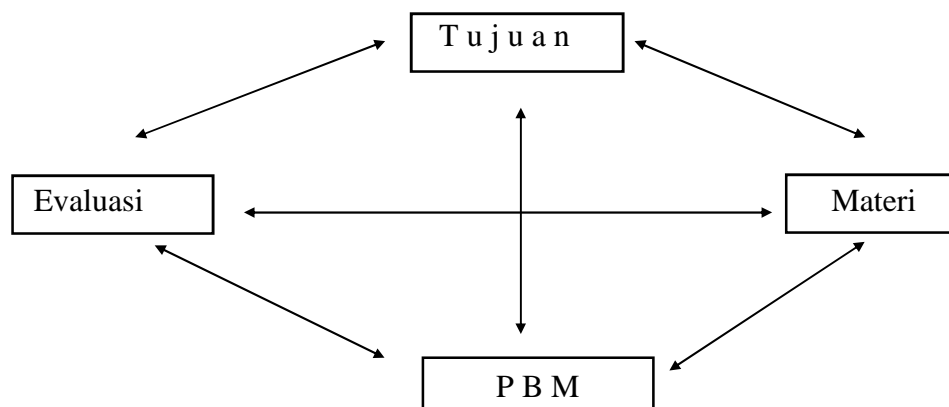
<sup>31</sup> Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 78

itu, Abdullah Idi menambahkan komponen evaluasi sebagai komponen utama, sehingga Abdullah Idi menetapkan unsur/komponen kurikulum menjadi enam komponen.

Dari yang sudah diutarakan di atas, sebagian besar para pakar berpendapat ada empat komponen kurikulum, para pakar tersebut diantaranya S. Nasution, John F. Kerr , Fuaduddin dan Sukama Karya, dan Nana Syaodih Sukmadinata. Empat komponen kurikulum tersebut, yaitu: (1) komponen tujuan (*objectives*); (2) komponen isi/materi kurikulum (*knowledges*); (3) komponen PBM (*school learning experiences*; dan (4) komponen evaluasi (*evaluation*).

Penulis mengambil pendapat yang terakhir, bahwa sebuah kurikulum terdiri atas empat komponen. Keempat komponen utama ini dijadikan fokus dalam penelitian penulis terhadap kurikulum pendidikan diniyah, yaitu untuk mengetahui keberadaan dan keterkaitan masing-masing komponen dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kurikulum adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Secara sederhana hubungan atau interkoneksi masing-masing komponen dapat dikemukakan seperti gambar berikut:



Gambar: 2.1. Keterkaitan komponen-komponen kurikulum dalam satu sistem<sup>32</sup>

Bagan di atas memperlihatkan bahwa masing-masing komponen saling ketergantungan, dan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan (makro) tergantung dari lancarnya dan mendukungnya antara satu komponen dengan komponen lainnya. Oleh karena itu, semua pihak harus benar-benar memperhatikan tiap-tiap komponen agar jangan sampai satu komponen menjadi penghambat terhadap jalannya proses pelaksanaan kurikulum itu sendiri.

#### 4. Landasan-Landasan Pengembangan Kurikulum

Secara etimologi landasan berarti “alas; bantalan; paron; dasar atau tumpuan.”<sup>33</sup> Oleh karena itu, landasan merupakan yang mendasari dalam pengembangan kurikulum. Istilah landasan dalam beberapa literatur kurikulum terkadang juga dikenal dengan istilah azas, dasar atau acuan. Namun apapun namanya, baik azas, dasar ataupun landasan semuanya merupakan yang

<sup>32</sup> S. Nasution, *Asas-asas ...*, h. 34

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ...*, h. 633

mendasari dalam pengembangan kurikulum, yang menjadi pondasi dalam mengkonstruksi sebuah kurikulum. Apabila sebuah kurikulum memiliki pondasi yang memenuhi standar dan persyaratan, maka berdampak pada kurikulum yang dikembangkan, kurikulum menjadi kokoh dan kuat, sehingga kurikulum sekolah atau madrasah yang dihasilkan diharapkan dapat diterima masyarakat dan bertahan lama.

Muhammad Ali mengemukakan bahwa pemilihan acuan dan asas-asas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tolok ukur sebagai berikut:

- a. Kurikulum harus mengacu kepada kebenaran dan kebaikan masyarakat.
- b. Pengalaman belajar harus relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (*needs of society*),
- c. Isi atau konten kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.
- d. Proses pembelajaran (*teaching-learning process*) harus berpedoman pada teori-teori psikologi belajar dan psikologi perkembangan.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, paling tidak ada empat landasan pengembangan kurikulum, yaitu: (1) landasan yang berkaitan dengan kebenaran (filosofis); (2) landasan yang berkaitan dengan masyarakat (sosiologi); (3) landasan yang berkaitan dengan IPTEK; dan (4) landasan psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Nana Sudjana mengemukakan tiga landasan pengembangan kurikulum, yaitu: (1) landasan filosofis; (2) landasan sosial

---

<sup>34</sup> Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Edisi kedua (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 31

budaya; dan (3) landasan psikologis.<sup>35</sup> Kemudian S. Nasution mengemukakan ada empat dasar dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) dasar filosofis; (2) dasar psikologis; (3) dasar sosiologis; dan (4) dasar organisatoris.<sup>36</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyajikan sebanyak enam landasan yang menulis cukup relevan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, yaitu:

a. Landasan Filosofis

Filsafat secara harfiah berasal dari *philein* (cinta) dan *sophia* (kebajikan).<sup>37</sup> Filsafat juga diartikan sebagai cinta pada kebijaksanaan (*love of wisdom*).<sup>38</sup> Sedangkan, ilmu filsafat sendiri merupakan induk ilmu pengetahuan, dari ilmu filsafat terlahir berbagai disiplin ilmu sebagai turunannya berupa cabang-cabang ilmu. Oleh karena itu, ilmu pendidikan (kurikulum) tidak dapat dilepaskan dari ilmu filsafat, seperti norma/nilai (*value*) yang eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Pendidikan pada dasarnya harus bersifat normatif yang dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh lembaga pendidikan dan masyarakatnya sendiri. Sistem nilai tersebut akan mewarnai dan mempengaruhi terhadap tujuan dan isi (*content*) kurikulum yang dikembangkan.

---

<sup>35</sup> Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1988), h. 56

<sup>36</sup> S. Nasution, *Asas-Asas ...*, h. 67-72

<sup>37</sup> Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Jokjakarta: Ar Ruzz Media, 2011), h. 88

<sup>38</sup> Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 23



Program pendidikan di Indonesia mengemban misi yaitu membina warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum pada sila pertama Pancasila. Sedangkan Pancasila adalah sebagai pandangan hidup, falsafah bangsa sekaligus sebagai ideologi berbangsa dan bernegara.

Landasan filosofis sebagai salah satu yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum memiliki beberapa sumber yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan landasan dalam mengembangkan kurikulum di Indonesia, yaitu:

1) Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila juga sebagai sumber tertinggi dalam perundang-undangan di Indonesia termasuk dalam membuat regulasi, undang-undang sistem pendidikan nasional Indonesia harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

2) Falsafah pendidikan.

Secara universal, falsafah pendidikan di Indonesia juga diusahakan berpedoman kepada empat pilar pendidikan yang direkomendasikan UNESCO tahun 1994. Keempat pilar pendidikan tersebut yaitu:

- a) *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), maksudnya adalah proses pembelajaran untuk mengetahui, memahami, dan menghayati apa saja yang dipelajari.

- b) *Learning to do* (belajar untuk berbuat), belajar tidak cukup sekedar mengetahui dan memahami, tetapi ilmu pengetahuan harus diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- c) *Learning to live together* (belajar untuk tinggal bersama/toleransi). Proses pembelajaran juga bertujuan untuk hidup toleran, tenggang rasa, gotong royong saling membantu, dan hidup bersama-sama secara rukun dan damai.
- d) *Learning to be* (belajar untuk menjadi diri sendiri). Maksudnya dalam pembelajaran harus dapat menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga dapat menemukan jati dirinya sendiri dan dapat menghargainya.<sup>39</sup>

Keempat pilar pendidikan di atas sangat sesuai dan relevan dengan konsep pendidikan Islam. Oleh karena itu, keempat pilar tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan kurikulum pendidikan diniyah di lembaga pendidikan keagamaan.

### 3) Falsafah lembaga pendidikan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan sistem pendidikan di Indonesia memiliki jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu, setiap jalur pendidikan formal dan nonformal, kemudian jenjang pendidikan dasar sampai kepada jenjang pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan yang terdiri dari jenis pendidikan umum, keagamaan, kedinasan, kejuruan, akademik, profesi, dan pendidikan

---

<sup>39</sup> Mastuki, dkk., *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren suatu Konsep Pengembangan Mutu Madrasah*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Depag. RI, 2004), h, 30-31

luar biasa. Setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki ciri khas dan nilai-nilai tertentu yang dijadikan sebagai pandangan hidup (filsafat lembaga pendidikan).

Lembaga pendidikan keagamaan merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional yang berada pada jalur formal dan nonformal termasuk jenis pendidikan keagamaan yang memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri. Selain itu, lembaga pendidikan keagamaan memiliki filosofi yang khas menjadikan lembaga pendidikan ini berbeda dengan lembaga pendidikan lain pada umumnya. Lembaga ini memiliki tradisi dan budaya atau kultur santri yang hidup sederhana dan bersahaja. Landasan ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pengembang kurikulum (*curriculum designer*), agar kurikulum yang dihasilkan tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan landasan filosofis tersebut.

#### b. Landasan Sosiologis

Aspek sosiologis berperan penting dalam upaya mendesain kurikulum sekolah/madrasah yang berorientasi pada masyarakat. Sebuah kurikulum pada dasarnya dapat mengakomodasi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pihak pengembang kurikulum sekolah/madrasah diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai hambatan dan problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan sudut pandang sosiologis, sistem pendidikan dan institusi pendidikan yang ada didalamnya mempunyai fungsi untuk kepentingan masyarakat. S. Nasution mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dalam mengembangkan kurikulum sekolah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan revisi bahkan perombakan sosial;
- 2) Mempertahankan kebebasan akademis dan kebebasan melaksanakan penelitian ilmiah.
- 3) Mendukung dan turut memberi kontribusi kepada pembangunan;
- 4) Menyampaikan kebudayaan dan nilai-nilai tradisional dan mempertahankan status quo;
- 5) Mengeksploitasi orang banyak demi kesejahteraan golongan elite;
- 6) Mewujudkan revolusi sosial untuk melenyapkan pengaruh pemerintahan terdahulu;
- 7) Mendukung kelompok-kelompok tertentu, antara lain kelompok militer, industri atau politik;
- 8) Menyebarkan falsafah, politik atau kepercayaan tertentu;
- 9) Membimbing dan mendisiplin jalan pikiran generasi muda;
- 10) Mendorong dan mempercepat laju kemajuan pengetahuan dan teknologi;
- 11) Mendidik generasi muda agar menjadi warga negara nasional dan warga dunia;
- 12) Mengajarkan keterampilan pokok, misalnya membaca, menulis, dan berhitung; dan
- 13) Memberikan keterampilan dasar bertalian dengan matapencapaian.<sup>40</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, pihak perancang kurikulum (*curriculum designers*) harus melaksanakan peran dan tanggung jawab, meliputi: (1) mempelajari kebutuhan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan, dan peraturan pemerintah lainnya; (2) Mempelajari keadaan masyarakat di mana sekolah berada; (3) menganalisis kebutuhan dan standar terhadap dunia kerja; dan (4) menginterpretasikan kebutuhan individu dalam lingkup kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>41</sup>

Beranjak dari peran dan tanggung jawab tersebut, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus diseleksi dan dipilah supaya dapat membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum sekolah, sementara tugas dan tanggung jawab para perancang dan pengembang kurikulum sangat kompleks.

---

<sup>40</sup> S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bina Aksara, 2010), h. 23-24

<sup>41</sup> Sudirman, N. dkk. *Ilmu Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 174

Dengan demikian, apa yang ditawarkan oleh madrasah dalam isi kurikulumnya diharapkan relevan dan kontekstual dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

c. Landasan Psikologis

Landasan psikologis berbeda dengan landasan sebelumnya, yakni landasan filosofis dan landasan sosiologis yang mengarah tujuan akhir (*the end-product*). Sementara itu, landasan psikologis ini diharapkan dapat membantu bagi pengembang kurikulum agar realistis dalam memilih tujuan yang sesuai dengan aspek kejiwaan peserta didik.

Seleksi dan pemilahan pengalaman belajar (*learning experience*) harus relevan dengan aspek psikologi. Hal ini secara umum sangat membantu dalam mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah, seperti teori-teori belajar, teori-teori kognitif, perkembangan mental anak, dinamika kelompok, dan perbedaan kemampuan individual anak. Hal-hal tersebut sangat relevan dalam merencanakan pengalaman pembelajaran (*learning experiences*) peserta didik.

Teori-teori psikologi mengenai belajar, seperti psikologi daya, teori *mental state* dengan motto "*knowledge is power*", psikologi behaviorisme, teori koneksionisme (*the law of exercise, the law of effect, and the law of readiness*), dan psikologi gestalt<sup>42</sup> harus dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengorganisasi kurikulum di sekolah/madrasah. Teori-teori tersebut, secara eksplisit dapat memberikan petunjuk yang tepat yang praktis, efisien, dan efektif dalam dunia pendidikan, terutama pada kemajuan belajar peserta didik.

---

<sup>42</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 107-108

Berkaitan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum sekolah ada dua disiplin ilmu yang menopang landasan ini, yaitu psikologi belajar dan psikologi anak.

#### 1) Psikologi Belajar

Psikologi belajar berkaitan dengan tentang bagaimana proses belajar itu berlangsung dalam diri peserta didik. Teori belajar sangat berpengaruh dalam penyusunan dan penyajian kurikulum secara efisien dan efektif. Psikologi belajar turut menentukan pemilihan bahan pembelajaran yang harus disajikan dalam sebuah kurikulum.

#### 2) Psikologi Anak

Anak adalah manusia kecil yang unik untuk dipelajari dalam konteks proses pembelajaran. Anak tidak saja memiliki jasmani/biologi, anak juga memiliki rohani/jiwa/mental yang merupakan bagian integral dalam diri seorang peserta didik. Pendidikan berupaya menghantarkan peserta didik kepada perkembangan kedewasaan yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak.

Berdasarkan teori psikologi anak, bahwa bagaimana anak (peserta didik) dapat belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya, diperlukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

- a) Menyeleksi dan organisasi bahan pelajaran yang menjadi isi kurikulum
- b) Memilah dan menentukan kegiatan belajar anak yang relevan dan serasi dengan perkembangan individu anak.
- c) Merencanakan dan merancang situasi dan kondisi belajar anak agar diperoleh hasil belajar optimal.
- d) Menyeleksi metode, teknik, dan strategi yang tepat terhadap tingkat kematangan belajar peserta didik.

- e) Merancang dan menetapkan prosedur dan teknik evaluasi yang relevan dengan perkembangan jiwa peserta didik.<sup>43</sup>

d. Landasan Organisatoris

Materi pelajaran yang menjadi isi kurikulum adalah sangat penting diorganisasikan sesuai dengan *scope*, *sequence*, dan jenjang sekolah di mana materi disajikan. Sebagai salah satu komponen kurikulum, materi/bahan pelajaran perlu diorganisasi dengan baik sebelum menjadi isi kurikulum yang disajikan dalam kurikulum sekolah/madrasah. Menurut S. Nasution “Pengorganisasian bahan dapat berdasarkan tema/topik, kronologis, konsep, isu, problematika, logika, dan proses disiplin.”<sup>44</sup>

Pengorganisasian bahan pelajaran yang dipilih harus memenuhi kaidah dalam penyajian materi sesuai dengan jenis *sequence*-nya, misalnya bahan pelajaran disajikan dari materi yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret kepada abstrak, dan dari ranah (domain) tingkat rendah kepada yang lebih tinggi mencakup semua domain (*cognitive*, *affective*, dan *psychomotoric*). Dalam konteks pendidikan Islam, isi kurikulum hendaknya mengacu kepada ranah *ta'lim*, *ta'dib*, *tazkiyah* dan *tarbiyah wal maharah*.

Pengorganisasian bahan terkait langsung dengan jenis-jenis organisasi bahan, seperti *separated subject-curriculum* (jenis kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah), jenis ini disebut juga dengan *nazhariatul fur'ida*; *correlated curriculum* (jenis kurikulum yang dihubung-hubungkan); *broad field/all in one system* atau *nazhariyatul wahdah*, kurikulum satu kesatuan yang tidak terpisah-

---

<sup>43</sup> S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2001), h. 57

<sup>44</sup> S. Nasution, *Kurikulum dan ...*, h. 46

pisah. Kurikulum terpadu disajikan dalam bentuk unit atau tema, seperti Kurikulum Tahun 2013 di tingkat SD/MI.

Kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah (*separated subject curriculum*) adalah kurikulum yang terdapat pada lembaga pendidikan agama dan keagamaan Islam (PAKIS). Organisasi kurikulum berkorelasi (*correlated curriculum*) diberlakukan di madrasah/sekolah yang berciri khas agama Islam, seperti mata pelajaran al-Qur'an Hadits, Ibadah Syari'ah, dan Aqidah Akhlak. Sementara organisasi kurikulum *broad field*, seperti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terdapat di sekolah umum, di SD, SMP, dan SMA.

Selain empat landasan tersebut, Soetopo dan Soemanto menambahkan lagi dua landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan historis dan landasan saintifik (IPTEK).<sup>45</sup>

#### e. Landasan Historis

Sesuai dengan sejarah perkembangan suatu bangsa, maka faktor sejarah (historis) sedikit banyaknya akan mempengaruhi perkembangan kurikulum yang ada. Khususnya di Indonesia, sewaktu Orde Lama dan sebelumnya, mata pelajaran Agama bukan mata pelajaran yang wajib di lembaga sekolah. Setelah terjadi G.30 S PKI dan organisasi NASAKOM (Nasional Agama Komunis) dan berbagai akibat-akibatnya, barulah mata pelajaran Agama diwajibkan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, tidak dibenarkan nilai mata pelajaran Agama dibawah 6 atau 60. Jika nilainya dibawah 6 atau 60, maka siswa tidak dapat naik kelas atau lulus meskipun semua nilai mata pelajaran lainnya baik.

---

<sup>45</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h. 47



f. Landasan IPTEK (*scientific foundation*).

Sains dan teknologi selalu berkembang, dan perkembangannya terkadang lebih cepat daripada antisipasi kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum harus bersifat visioner, yakni mampu menjangkau kemajuan sains dan teknologi 10 sampai 20 tahun ke depan. Salah satu ciri kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu mengantisipasi ke masa depan (*anticipatory*), yakni kurikulum dapat memprediksi apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang.

Seorang *curriculum designer* dituntut untuk mempelajari semua landasan tersebut, supaya kurikulum yang dikembangkan mempunyai pondasi yang kokoh dan dapat diterima oleh masyarakat, sesuai dengan ideologi Pancasila, relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, relevan dengan perkembangan IPTEK, dan lain-lain, sehingga kurikulum sekolah yang dihasilkan benar-benar dapat mencapai tujuan yang maksimal sesuai dengan amanat perundang-undangan dan harapan banyak pihak.

## **5. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum PAI**

Prinsip dapat dimaknai sebagai *way of life* atau pandangan hidup, atau kriteria atau rambu-rambu yang mesti diindahkan. Dalam konteks ini prinsip diartikan sebagai kriteria atau aturan main (*rule of the games*), yaitu sebagai pedoman dan ketentuan yang mesti dipertimbangkan oleh *curriculum designer* dalam mendesain dan merancang kurikulum sekolah/madrasah.

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum mengemban amanah agar kurikulum yang dirancang dan yang dihasilkan diharapkan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (*the needs of society*) atau semua pihak,

yakni peserta didik, wali/orangtua siswa, masyarakat umum, pemakai lulusan, bangsa dan yang paling urgen adalah bagaimana misi kurikulum dapat meninggikan agama Allah (*li i'lai kalim tillah*).

S. Nasution, Soetopo dan Soemanto mengemukakan empat prinsip. Sedangkan Fuaduddin dan Karya menamakan prinsip dengan istilah kriteria. Ahli lain, Tyler mengemukakan tiga kriteria, yaitu berkelanjutan (*continuity*), berurutan (*sequence*), dan keterpaduan (*integration*). Selanjutnya, menurut Sudirman dkk ada sepuluh prinsip pengembangan kurikulum. Sementara itu, Subandijah mengemukakan enam prinsip yang senada dengan pendapat Abdullah Idi.

Prinsip yang disajikan dalam pembahasan ini ada enam, sebagai berikut:

a. Prinsip Relevansi

Kata relevansi berasal dari bahasa Inggris *relevant* atau *relevance*. Menurut kamus *Oxford Advanced Dictionary of Current English* kata *relevant* berarti “*closely connected with sth, appropriate in the circumstances.*”<sup>46</sup> Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka harus ada penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat (*the needs of society*). Pendidikan dapat dinyatakan relevan atau sesuai apabila *output* atau hasil yang didapat peserta didik bermanfaat bagi kehidupannya dalam konteks dunia nyata dan kondisi kekinian.

Soetopo dan Soemanto mengemukakan tiga relevansi, yaitu (1) Relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup; (2) Relevansi dengan

---

<sup>46</sup> A. S. Hornby, AS, *Oxford Advanced Dictionary of Current ...*, h. 987

perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang; dan (3) Relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan.<sup>47</sup>

Sementara Subandijah mengungkapkan prinsip relevansi terbagi ke dalam empat relevansi, sebagai berikut<sup>48</sup>:

- 1) Relevansi program pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik  
Relevansi tersebut berupaya menghubungkan program pembelajaran dengan lingkungan hidup peserta didik, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching-learning/CTL*).
- 2) Relevansi program pendidikan dengan kehidupan kekinian dan kehidupan yang akan datang

Isi kurikulum yang disajikan pada generasi sekarang seyogyanya berguna terutama bagi dirinya sendiri dalam menghadapi problem kehidupan masa kini dan di masa yang akan datang yang sudah tentu tantangannya jauh lebih berat dari generasi sebelumnya. Menurut penulis kurikulum harus mampu menjangkau jauh ke masa depan (*visioner*), kurikulum juga harus dapat memprediksi (*anticipatory*) apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابن عمر عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علموا أولادكم

السباحة والرماية وركوب الخيل. (رواه النسائي)<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h. 49-50

<sup>48</sup> Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi ...*h. 49-50.

<sup>49</sup> Maktabah Sh milah, No. 6316, Kitab 'Asyrah Nis li an-Nasa'i , *Mula'abah ar Rajul Zaujatihi*, Juz 1, h.45

Rasulullah SAW adalah seorang visioner dan mampu meramalkan bahwa Islam berkembang jauh sampai seluruh penjuru dunia hingga beliau memerintahkan perlunya memberikan pendidikan berenang yang pada saat itu belum dirasakan manfaatnya, di tanah Hijaz pada waktu itu tidak ada sungai yang digunakan untuk dapat berenang.

3) Relevansi program pendidikan dengan tuntutan dunia kerja

Di era perkembangan informasi dan globalisasi saat ini, ditambah lagi dengan adanya pasar bebas Asia atau yang dikenal masyarakat ekonomi Asia (MEA), menyebabkan terjadinya persaingan dan pasar kerja yang kompetitif di berbagai negara, sehingga mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi dan berstandar. Bila sebuah negara yang sumber daya manusia dan keterampilan kerja yang dibutuhkan rendah, maka warga negaranya akan tersisih dan hanya menjadi penonton dan pengangguran di negerinya sendiri.

Permasalahan di atas perlu diantisipasi dengan menyusun kurikulum yang relevan dengan tuntutan dunia kerja, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja seperti SMK dan MAK.

4) Relevansi program pendidikan dengan perkembangan IPTEK.

Keberadaan IPTEK dewasa ini berkembang dengan perkembangan yang sangat pesat hampir di seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, menurut penulis pendidikan harus dapat

menyesuaikan diri dan bahkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>50</sup>

Pada dasarnya prinsip relevansi ini sudah dimuat dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1984, kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 1994 dan juga pada kurikulum 1999, yaitu program pendidikan yang menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja, bahkan hal ini dimaksimalkan lagi pada kurikulum KBK Tahun 2004, KTSP Tahun 2006 dan kurikulum terakhir yakni Kurikulum Tahun 2013 dengan pendekatan pembelajaran kontekstual (CTL).

b. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

1) Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas dalam kurikulum adalah sejauhmana target atau sasaran program pendidikan dapat dicapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>51</sup> Sebagai contoh, guru telah merencanakan 6 sasaran atau indikator yang ingin dicapai, dan setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran dari 6 target sebut ternyata 3 indikator saja yang dapat dicapai. Hal ini berarti kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru belum efektif, dengan kata lain belum memenuhi prinsip efektivitas.

Prinsip efektivitas dapat dikelompokkan kepada 2 (dua) segi, yakni:

a) Prinsip efektivitas mengajar

---

<sup>50</sup> Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama ...*, h. 48 – 49

<sup>51</sup> Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2010), h. 65

Prinsip segi ini berhubungan dengan program pembelajaran yang direncanakan dan diimplementasikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan efektivitas perencanaan pembelajaran, seperti silabus dan RPP, pemilihan pendekatan, metode, dan penggunaan media sebagai alat bantu pembelajaran.

#### b) Prinsip efektivitas belajar

Setiap peserta didik memiliki tipe dan gaya serta tingkat intelegensi yang beragam sehingga kemampuannya dalam memperoleh hasil pembelajaran juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana program pendidikan dapat memberikan layanan yang adil dan tepat terhadap perbedaan tersebut, agar nantinya kegiatan belajar dapat memperoleh hasil maksimal.

Prinsip efektivitas dalam perkembangan kurikulum selalu berkaitan dengan prinsip efisiensi, sebab kita tidak ingin program pembelajaran berjalan efektif, sementara cara dan penggunaan sumber daya lainnya tidak efisien atau dengan kata lain adanya pemborosan dalam program yang mestinya dihindari.

#### 2) Prinsip Efisiensi

Kata efisien secara etimologi berarti "... dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya."<sup>52</sup> Sedangkan prinsip efisiensi terkadang dianalogikan dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan modal yang kecil/sedikit akan menghasilkan keuntungan yang besar/banyak. Sementara itu, prinsip efisiensi dalam konteks pengembangan dan implementasi kurikulum adalah upaya yang

---

<sup>52</sup>Pusat BahasaDepdinas, *Kamus Besar Bahasa ...*, h. 284

sehemat mungkin menggunakan sumber dana dan sumber daya pendidikan lainnya.

Pelaksanaan kurikulum sekolah dapat dikatakan memenuhi prinsip efisiensi, apabila penggunaan biaya, waktu, sumber daya manusia (tenaga) dan fasilitas sehemat mungkin dan hasilnya optimal atau maksimal. Dengan demikian, bagaimana upaya agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan secara efisien dan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, sehingga kurikulum sebagai program pendidikan dapat dikatakan telah memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi, dan hal tersebut harus menjadi perhatian oleh semua pihak khususnya bagi pengembang dan pelaksana kurikulum sekolah/madrasah.

c. Prinsip Kontinuitas atau Kesenambungan

Prinsip ini dalam pengembangan kurikulum memperlihatkan adanya saling keterkaitan antara tingkat pendidikan, dan mata pelajaran atau bidang studi. Di sini terdapat dua aspek prinsip kesinambungan, yaitu:

1) Kontinuitas antara berbagai tingkat sekolah/madrasah

Materi pelajaran yang telah disajikan pada kelas rendah atau tingkat sekolah rendah harus berkaitan dan berkelanjutan pada tingkat kelas atau sekolah yang ada di atasnya. Sebagai contoh dalam kurikulum PAI di sekolah umum, di SD siswa telah belajar shalat wajib, di SMP diberikan lagi tentang shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat dua hari raya dan lain-lain, yakni tidak harus mengulang materi yang persis sama.

2) Kesenambungan antara berbagai bidang studi

Kesinambungan antara berbagai mata pelajaran dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya, contoh dalam kurikulum PAI pada mata pelajaran Fiqih adalah tentang materi bahasan shalat, seharusnya pada mata pelajaran Tauhid/Aqidah-Akhlak sudah disajikan tentang bahasan rukun iman yakni iman kepada Allah SWT, begitu juga pada mata pelajaran al-Quran tentang hapalan surah al-Fatihah dan surah-surah pendek memang harus sudah disajikan sebelumnya. Dengan demikian, terdapat korelasi dan hubungan yang erat antara bidang studi Fiqih, Tauhid, Akhlak dan al-Quran Hadits.

Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah dan antar bidang studi berarti bahwa kurikulum harus disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Materi pelajaran yang diperlukan sekolah yang lebih tinggi harus sudah disajikan di sekolah sebelumnya;
- b) Materi pelajaran yang sudah diberikan di sekolah yang lebih rendah tidak perlu disajikan pada sekolah yang lebih tinggi.
- c) Pengembangan perlu dilakukan serempak dan bersama-sama, perlu ada komunikasi dan kerjasama antara para pengembang kurikulum.<sup>53</sup>

Dengan demikian kesinambungan materi kurikulum berkaitan dengan antar tingkat pendidikan ataupun yang menjadi prasyarat terhadap materi pada bidang studi yang lain, sehingga prinsip ini dapat berjalan dengan baik dan kesinambungan materi dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik.

#### d. Prinsip Keluwesan (*Flexibility*)

Fleksibel berarti tidak kaku, lentur atau elastis, sebagai contoh benda yang fleksibel adalah karet dan per. Sedangkan prinsip fleksibilitas (*flexibility*)

---

<sup>53</sup> Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 111



dalam pengembangan kurikulum adalah kurikulum tidak kaku dalam artian ada sedikit ruang gerak yang diperuntukan bagi guru dalam berinovasi dan berkreasi, sehingga diharapkan guru mempunyai ide kreativitas dalam mengembangkan kurikulum lebih operasional sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing guru.

Prinsip fleksibilitas dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan

Fleksibilitas dalam kaitan ini adalah program pendidikan alternatif seperti jurusan pendidikan, program spesialis, kegiatan ekstra kurikuler. Ekstra kurikuler identik dengan pengembangan diri dalam kurikulum KBK Tahun 2004 dan KTSP Tahun 2006, yang dapat dipilih peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukmadinata yang menyatakan bahwa:

Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dapat dibuka program pendidikan pilihan (jurusan), sehingga peserta didik diberi kesempatan (kebebasan) dalam memilih program pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan, dan lingkungan.<sup>54</sup>

2) Fleksibilitas dalam pengembangan program pembelajaran

Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan pembelajaran, yaitu memberikan peluang atau kesempatan kepada guru untuk mengembangkan program-program pembelajaran (*teaching-learning program*), baik yang berkenaan reorganisasi materi pelajaran, pemilihan pendekatan, metode dan strategi yang tepat, dan lain-lain.

---

<sup>54</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 151

e. Prinsip Berorientasi pada Tujuan

Umumnya pengembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari penyusunan komponen tujuan dari tujuan pendidikan yang jelas akan memudahkan dalam merancang komponen kurikulum yang lain, seperti komponen isi kurikulum, komponen proses dan komponen evaluasi.

Subandijah menegaskan bahwa “prinsip yang berorientasi pada tujuan berarti sebelum bahan ditentukan maka langkah yang pertama dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu.”<sup>55</sup> Tujuan kurikulum harus memuat ranah kognitif (*ta’lim*), afektif (*tazkiyah*), dan ranah psikomotor (*tarbiyah wal mah rah*). Hal ini dilakukan agar semua aktivitas pembelajaran betul-betul terarah kepada tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan tujuan pembelajaran yang terinci dan jelas, diharapkan pendidik dapat memilih dan menetapkan pendekatan, metode, strategi, media pembelajaran, prosedur, dan teknik evaluasi yang akurat dan tepat.

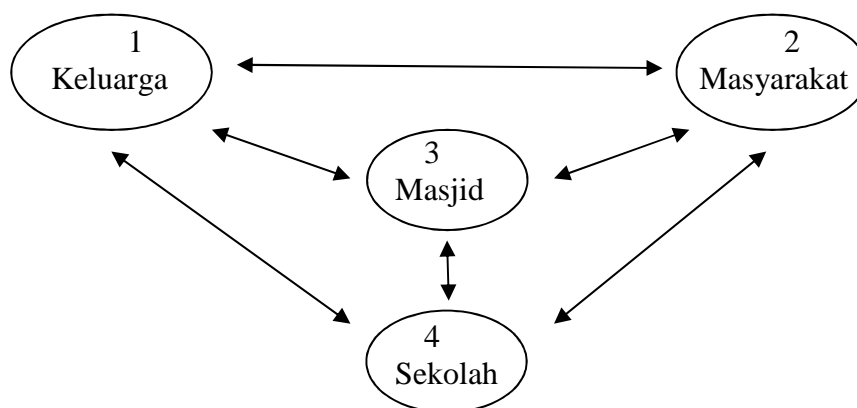
g. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup (*Long Life Education*)

Pendidikan sebenarnya berlangsung sepanjang hayat (*th lul hay h*), bahkan dalam konteks ajaran Islam, bahwa pendidikan berlangsung jauh sebelum bayi dilahirkan yakni saat memilih pasangan hidup suami atau isteri yang berkaitan dengan bibit, bebet dan bobot, kemudian dilanjutkan pendidikan *pra natal* dan *post natal* dianjurkan oleh Islam menyapihnya selama dua tahun lamanya. Jika selama ini kita mengenal tri-pusat pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, namun dalam komunitas umat

---

<sup>55</sup> Subandijah. *Pengembangan dan Inovasi ...*.h. 54

Islam masih perlu satu pusat pendidikan lagi, sehingga menjadi catur-pusat pendidikan (masjid), sebagai pusat terpenting bagi pemberdayaan dalam segala bidang. Bila diilustrasikan antara pusat pendidikan di keluarga, sekolah, masyarakat dan masjid tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>56</sup>



Gambar 2.2: Catur (empat) pusat pendidikan Islam

Dengan empat pusat pendidikan Islam di atas, proses pendidikan menurut pandangan pendidikan Islam berlangsung sepanjang hayat (*th lul hay h*). Dengan demikian untuk membentuk *Ins n K mil* tidak dapat dilakukan hanya pada pendidikan formal semata tetapi harus terintegrasi dengan pendidikan informal dan nonformal di masjid dan di masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat (*long life education*).

## 6. Model-Model Pengembangan Kurikulum

Model dapat diartikan sebagai satu pola, bentuk atau organisasi dalam merancang sesuatu baik berupa bangunan, *fashion*, maupun alat. Namun bila model dikaitkan pengembangan kurikulum, maka ia merupakan satu prosedur

<sup>56</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam (Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 53-54

dalam merancang, mengimplementasi sampai kepada penilaian dan menindak lanjuti hasil rancangan sebuah kurikulum.

Sebenarnya banyak terdapat model pengembangan yang ditawarkan oleh para ahli, paling tidak ada sembilan model yang terkenal menurut Syaifuddin Sabda, yaitu:

- a. *The Administrative (Line-Staff) Model*
- b. *The Grass-Roots Model*
- c. *The Demonstration Model*
- d. *Taba's Inverted Model*
- e. *Beauchamps Model*
- f. *Rogers Interpersonal Relation Models*
- g. *Miller and Seller Model*
- h. *Gagne (Transmission) Model*
- i. *Peter F Oliva Model.*<sup>57</sup>

Dari sembilan model yang disebutkan di atas tidak semuanya dibahas dalam tulisan ini, melainkan hanya beberapa model yang dikaji untuk kepentingan perbandingan dengan model yang menjadi garapan dalam penelitian ini. Pada pembahasan kali ini penulis hanya menyajikan sebanyak lima model pengembangan kurikulum, yaitu:

- a. *The Administrative Model*

Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai adanya ide atau gagasan dari struktur yang tertinggi kemudian berlanjut ke tingkat bawah secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi birokrasi dalam suatu negara. Pengembangan kurikulum bermula dari wewenang administrator seperti direktur atau kepala kantor wilayah satu daerah yang membentuk panitia pengarah pengembangan kurikulum yang didalamnya terdapat berbagai pakar (ahli pendidikan, ahli berbagai disiplin ilmu, penguasa,

---

<sup>57</sup> Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan ...*, h. 219 - 244

dan *stakeholders*). Tugas panitia pengarah berupaya merancang konsep dasar, azas-azas, dan hal-hal yang urgen yang berkaitan dengan perancangan kurikulum sekolah/madrasah.

Setelah hal yang fundamental dari pengembangan kurikulum sudah dilakukan pengkajian yang mendalam, selanjutnya panitia pengarah membentuk panitia kerja atau semacam *steering committee/team work* yang terdiri dari berbagai ahli dalam bidang disiplin ilmu tertentu termasuk praktisi pendidikan seperti guru dan tenaga pendidik lainnya yang dianggap cukup berpengalaman.

Model administratif ini disebut juga *top-down* atau *line staff model*, tidak selalu segera berjalan dengan lancar, sebab menuntut berbagai kesiapan dari pelaksanaannya, terutama guru-guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum pada tingkat operasional di kelas. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya kegiatan yang bersifat sosialisasi, orientasi, penataran, seminar, dan workshop merupakan suatu keharusan.

#### *b. The Grassroots Model*

Pada model ini mekanisme dan prosedur pengembangan kurikulum merupakan kebalikan dari *administrative model* yang berorientasi *top-down*, sementara *grassroots model* adalah pengembangan kurikulum dimulai dari tingkat yang paling bawah yakni seorang guru dan sekelompok guru (akar rumput), sehingga dapat dikatakan model ini adalah model *bottom-up*. Oleh karena itu, model ini dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum jika pendekatan sistem pendidikannya menganut sistem desentralisasi, artinya memberikan kewenangan pada tingkat yang paling bawah secara otonom dapat

mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri.

Pembahasan lebih lanjut mengenai *grassroots* model ini dalam pengembangan kurikulum akan dibahas secara mendalam dan terperinci pada uraian tersendiri.

### c. Model *Beauchamp*

Model yang satu ini dikembangkan oleh seorang ahli kurikulum yang bernama George A. Beauchamp, model pengembangan kurikulumnya pun diambil dari namanya sendiri. Beauchamp mengemukakan lima langkah dalam penerapan model tersebut, yaitu:

- 1) Menetapkan lingkup wilayah atau area yang dicakup oleh kurikulum tersebut.
- 2) Menetapkan anggota personalia yang terlibat dalam pengembangan kurikulum.
- 3) Menetapkan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum.
- 4) Melaksanakan implementasi kurikulum.
- 5) Melaksanakan evaluasi dan dilanjutkan revisi dan penyempurnakan desain kurikulum.<sup>58</sup>

Langkah-langkah tersebut, merupakan bagian integral yang harus dijalankan dalam menggunakan model tersebut. Dengan demikian, hasil kurikulum diharapkan hasil kurikulum nantinya sesuai dengan prosedur pengembangan yang dikehendaki, dan dapat bermanfaat apabila diterapkan di

---

<sup>58</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1988), h. 180 -182

lembaga pendidikan secara masif. Namun, setiap model mempunyai kelemahan di samping ada kelebihan masing-masing, tergantung bagaimana para pengembang kurikulum (*curriculum developers*) mempertimbangkan untuk menggunakannya.

d. *The Demonstration Model*

Model demonstrasi ini pada dasarnya ada kemiripan dengan model *grass-roots*, dimana ide pengembangan kurikulum datang dari guru atau sekelompok guru yang tidak puas dengan hasil kurikulum selama ini. Umumnya, model ini dilakukan dalam *scope* (skala) kecil. Selanjutnya, model ini dipakai dalam ruang lingkup (skala) yang lebih besar atau lebih luas. Menurut sebagian ahli, dalam prosesnya tidak jarang adanya hambatan, tantangan dan ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu.

Menurut Sukmadinata terdapat beberapa kebaikan model demonstrasi ini dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

- 1) Kurikulum yang didesain dalam situasi yang nyata, sehingga aspek yang ada dalam kurikulum yang dihasilkan bersifat lebih praktis.
- 2) Inovasi dan penyempurnaan kurikulum dalam skala kecil, resistensi atau penolakan dari administrator kemungkinan juga relatif lebih kecil, jika dibandingkan dengan perubahan dalam *scope* yang lebih besar.
- 3) Kemungkinan besar dapat menembus kendala yang sering dihadapi guru jika tidak memiliki dokumen kurikulum tertulis.
- 4) Karena sifatnya *grassroots* (akar rumput), sehingga memberikan kesempatan pada guru dalam mengambil inisiatif dan inovatif yang dapat menjadi pendorong bagi para administrator untuk mengembangkan program pembelajaran baru.<sup>59</sup>

Berbagai kebaikan model kurikulum ini, bukan berarti model ini tidak mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahan model ini menurut Syaifuddin

---

<sup>59</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Prinsip dan Landasan Pengembangan ...*, h. 182-183.

Sabda adalah “lebih pada implementasi dan diseminasi produk yang dihasilkan untuk bisa diterima dalam skala yang lebih luas.”<sup>60</sup> Terkadang ditemukan adanya guru-guru yang enggan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum menjadi apatis, tidak ada keinginan untuk melakukan inovasi kurikulum, dan ini juga merupakan kelemahan dari model ini.

e. Model Taba (*Inverted Model*)

Model Taba ini, dikatakan model terbalik (*inverted model*), karena model ini berupaya mengembangkan kurikulum dengan teknik induktif berbeda dengan Tyler model tradisional yang menggunakan secara deduktif. Teknik induktif yang dipelopori Taba adalah dalam mengembangkan kurikulum mulai dari *needs assessment* atau dari kondisi nyata di lapangan. Sementara teknik induktif adalah pengembangan kurikulum berangkat dari asumsi, hipotesis dan komitmen-komitmen dasar berdasarkan teori literatur. Menurut Taba kelemahan pengembangan kurikulum deduktif adalah (1) cenderung mereduksi lahirnya inovasi kreatif; (2) perencanaan kurikulum yang nampaknya tepat terkadang dalam implementasinya tidak terpenuhi; dan (3) kurikulum yang dihasilkan cenderung sangat umum, abstrak, dan formula pembelajaran yang baku.<sup>61</sup> Oleh karena itu, guru dituntut kreatif dan aktif dalam pengembangan kurikulum sekolah/madrasah. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum ini

---

<sup>60</sup> Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan ...*, h. 227

<sup>61</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development; Theory and Practice*, (San Francisco: Brace & World, Inc., 1962), h. 441.



merupakan salah satu karakteristik dalam model pengembangan kurikulum versi Taba.

Ada lima langkah pengembangan kurikulum model Taba, yaitu:

- 1) Menghasilkan unit-unit percobaan (*pilot unit*) melalui langkah-langkah:
  - a. mendiagnosis kebutuhan;
  - b. merumuskan tujuan-tujuan khusus;
  - c. memilih isi dan mengorganisasi isi;
  - d. memilih dan mengorganisasi pengalaman belajar;
  - e. mengevaluasi; dan
  - f. melihat sekuens dan keseimbangan
- 2) Menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunaannya.
- 3) Mengadakan revisi dan konsolidasi unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba.
- 4) Mengembangkan seluruh kerangka kurikulum
- 5) Implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah teruji.<sup>62</sup>

Mencermati langkah-langkah model Taba dalam pengembangan kurikulum di atas, Secara umum model ini mempunyai banyak kemiripan dengan model *grassroots*, yaitu mengembangkan kurikulum dimulai dengan melakukan *needs assessment*, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, dilanjutkan dengan merumuskan tujuan-tujuan yang lebih khusus dan menentukan dan mengorganisasi *content* kurikulum, mendesain dan menetapkan pengalaman belajar, dan menetapkan standar evaluasi, sampai kepada uji coba dan diseminasi.

Sebenarnya masih ada beberapa model dalam pengembangan kurikulum yang lain, penulis hanya membatasi pembahasan pada lima model di atas. Pada pembahasan selanjutnya penulis membahas secara lebih mendalam tentang model pengembangan kurikulum pendekatan *grassroots* yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>62</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development; Theory and ...*, h.12

## **B. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam dan Kurikulum Pendidikan Diniyah di Indonesia**

### **1. Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam**

Tidak berbeda halnya dengan sejarah lahirnya lembaga pendidikan lainnya, lembaga pendidikan keagamaan Islam berkembang dari bentuk yang sangat sederhana, yaitu dimulai dari pengajian di rumah-rumah tuan guru (ulama), surau-surau, langgar/mushalla dan masjid-masjid. Lembaga pendidikan keagamaan Islam terlahir dari yang sangat sederhana dan bersahaja, dari pengajian keagamaan berkembang menjadi sebuah padepokan pesantren. “Persinggungannya dengan sistem madrasa, model pendidikan Islam mengenal pola pendidikan madrasah.”<sup>63</sup> Sistem pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan Islam pada mulanya adalah sistem mempelajari kitab-kitab dengan metode halaqah, dan bandongan, kemudian tokoh-tokoh ulama atau tuan guru dan masyarakat yang peduli pada pendidikan. Saat itu, para ulama berupaya memadukan pendidikan pola pesantren dengan sistem persekolahan seperti pola pendidikan kolonial Belanda yang menggunakan sistem klasikal. Hal ini dilakukan agar madrasah mampu menyaingi pendidikan penjajah sekaligus modernisasi dalam sistem pendidikan Islam.

Sebenarnya pengajian agama yang diselenggarakan di surau, langgar dan masjid, merupakan adaptasi dari awal lembaga pendidikan dimasa dakwah Rasulullah SAW, *Khul faur Rasyidin* dan *T b' n* dalam bentuk *kuttab*, kemudian dilanjutkan dengan madrasah. Madrasah ini mulai dikenal pada abad

---

<sup>63</sup>Depag. RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2003) h. 21

ke-11 Masehi, semula madrasah adalah lembaga pendidikan orang dewasa, sebagai kelanjutan dari *kuttab* yang setingkat di bawahnya. “Madrasah dalam bentuk sekarang pertama kali didirikan oleh Nizam al-Mulk (1018-1092) di Baghdad pada tahun 1067 dengan nama *Madrasah Nizh miyah*.”<sup>64</sup>

Berdasarkan sejarah lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, madrasah yang tertua adalah Madrasah Mamba’ul Ulum berdiri tahun 1905, kemudian Madrasah Nahdatul Watan, Madrasah Hizbul Wathan, dan Madrasah Tasywirul Afkar, Sekolah Diniyah tahun 1915, Madrasah Sumatera Thawalib tahun 1916, dan Madrasah Diniyah Puteri berdiri pada tahun 1923.<sup>65</sup>

Lahirnya pendidikan keagamaan dengan sistem persekolahan, lembaga pendidikan Islam di Indonesia terbentuk dimulai adanya kesadaran dari para ulama, tuan guru dan intelektual Islam serta tokoh masyarakat untuk memajukan pendidikan bagi umat Islam. Hal ini disebabkan pendidikan Belanda dianggap jauh lebih maju. Namun menurut para ulama Islam saat itu bahwa pendidikan yang berada di bawah pemerintah Hindia Belanda adalah pendidikan yang hanya berorientasi pada keduniaan semata dan sekuler, sehingga para ulama berupaya mendirikan lembaga pendidikan keagamaan Islam baik secara perorangan maupun kelompok atau organisasi keagamaan, lembaga pendidikan yang akhirnya dinamakan madrasah atau sekolah Arab/diniyah.

---

<sup>64</sup> Ade Armando, *Enseklopedi Islam untuk Pelajar*, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), h.3

<sup>65</sup> Ade Armando, *Enseklopedi Islam untuk ...*, h.3

Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut antara lain:

- a. Madrasah (*Adabiyah School*), madrasah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang. Belum cukup satu tahun madrasah ini gagal berkembang dan dipindahkan ke Padang. Pada Tahun 1915 madrasah ini mendapat pengakuan dari Belanda dan berubah menjadi *Holland Inlandsche School* (HIS).
- b. Sekolah Agama (*Madras School*) didirikan oleh Syikh M. Thaib Umar di Sengayang Batusangkar pada tahun 1910. Madrasah ini pada tahun 1913 terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan tempat. Pada tahun 1918, Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai kelanjutan dari Madras School.
- c. Madrasah Diniyah (*Diniyah School*). Madrasah ini didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915 oleh Zainuddin Labai El Yunusiy di Pandang Panjang.
- d. Madrasah Salafiyah. Madrasah ini didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari pada Tahun 1916 di Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur. Madrasah ini berada di bawah naungan organisasi Nahdatul Ulama (NU)
- e. Madrasah Muhammadiyah, madrasah ini tidak diketahui tahun berdirinya, tapi diperkirakan berdiri pada tahun 1918 oleh organisasi Muhammadiyah.
- f. Arabiyah School. Madrasah ini didirikan pada tahun 1918 di Lading Lawa oleh Syekh Abbas.
- g. Sumatera Thawalib didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1921 di Padang Panjang, Bukit tinggi, Sungayang, Batusangkar, dan Maninjau.

h. Madrasah Diniyah Puteri berdiri pada tahun 1923.<sup>66</sup>

Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam di atas merupakan perintis/pemula (*pionir*) dalam pendirian pendidikan Islam berikutnya di berbagai daerah di Nusantara. Pada saat itu, keberadaan lembaga pendidikan keagamaan tersebut mampu memberikan yang terbaik bagi warga pribumi dalam mengecap pendidikan dasar yang seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang dilaksanakan secara klasikal.

Dilihat dari sejarahnya, menurut Muhaimin, setidaknya ada dua faktor pentingnya yang melatar-belakangi lahirnya madrasah (lembaga pendidikan keagamaan Islam), yaitu:

- a. Pandangan yang mengatakan sistem pendidikan Islam tradisional dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat saat itu;
- b. Kekhawatiran majunya persekolahan yang dikelola pemerintah kolonial Belanda yang menimbulkan sekularisme di kalangan masyarakat muslim Indonesia.<sup>67</sup>

Jadi, lahirnya lembaga pendidikan Islam dari lembaga tradisional (surau) ke sistem pendidikan persekolahan (klasikal) merupakan upaya dari para ulama reformis untuk menandingi sistem persekolahan Belanda yang bersifat sekuler dan sekaligus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat berkiprah dalam kehidupan yang pragmatis.

---

<sup>66</sup> Maswardi, *Pola Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara pada Masa Awal sampai Sebelum Kemerdekaan*, (dalam Sejarah Pendidikan Islam: Editor; Samsul Nizar), (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 292-293

<sup>67</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.183.

Setelah Indonesia merdeka, lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan bebas dapat mengembangkan kiprahnya dan memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga lembaga pendidikan keagamaan ini diakui oleh pemerintahan Bung Karno di zaman Orde Lama. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya kebijakan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam, yaitu pada tanggal 22 Desember 1945 BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengumumkan, “Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan dipercepat.”<sup>68</sup> Meskipun demikian, pada awal kemerdekaan sampai dengan akhir pemerintahan Orde Lama, perhatian pemerintah dari segi pendanaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan masih dirasakan sangat tidak adil, bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum seperti sekolah rakyat (SR) dan lainnya.

Dengan perlahan namun pasti, tahap demi tahap sesuai dengan dinamika dan perjalanan lembaga pendidikan keagamaan akhirnya dapat terintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Adanya Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950 yang menyatakan bahwa: “Belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.”<sup>69</sup> Hal ini merupakan bukti bahwa pendidikan keagamaan baru diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

---

<sup>68</sup> Hanun Asrohah. *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, cetakan I, 1999), h. 177

<sup>69</sup> Hanun Asrohah. *Sejarah Pendidikan...*, h, 178

Pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu pada tanggal 24 Maret 1975 lahir Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Mendikbud, dan Menteri Agama, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. SKB 3 Menteri tersebut sebagai solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan tentang keberadaan pendidikan Islam dan di sisi lain memberikan kepastian pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dengan munculnya SKB 3 Menteri tersebut, akhirnya masyarakat mulai menyadari dan memahami urgensinya keberadaan pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional.

Sejumlah diktum dalam undang-undang pendidikan nasional nampaknya memperkuat posisi pendidikan Islam yang lebih ditegaskan lagi dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I pasal 1 ayat (2) dinyatakan: madrasah itu meliputi tiga tingkatan: (1) Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar, (2) Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, (3) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya di dalam bab II pasal 2 dinyatakan, bahwa: (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; (2) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; dan (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>70</sup>

Pada era reformasi saat ini, eksistensi lembaga pendidikan keagamaan Islam tetap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan

---

<sup>70</sup>Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.150-151

nasional yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti pondok pesantren dan pendidikan diniyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dari jenis pendidikan keagamaan Islam yang diakui pemerintah. Hal ini tertuang dalam PP. RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan PMA. RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

## **2. Kurikulum Pendidikan Diniyah**

Kurikulum merupakan salah satu komponen wajib dalam sebuah sistem pendidikan, tidak terkecuali di lembaga pendidikan keagamaan Islam (kurikulum pendidikan diniyah). Dalam arti sempit kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran/bidang studi atau silabus dan isi dari pendidikan dan pembelajaran. Isi kurikulum (bidang studi) pada lembaga pendidikan keagamaan Islam, sebagian besar dan bahkan 100% adalah mata pelajaran agama Islam (kurikulum pendidikan diniyah) yang diambil dari kitab-kitab kuning/klasik yang diberikan secara bertahap dari sekuens yang sangat rendah atau sederhana menuju kepada kitab atau bahasan yang lebih tinggi atau kompleks sesuai dengan tingkat penjenjangan santri. Pada masing-masing lembaga pendidikan keagamaan Islam biasanya mempunyai pandangan yang berbeda tentang menentukan kurikulum pendidikan diniyah yang menjadi konsumsi para santrinya.

Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 26, tertulis bahwa:



Kurikulum pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum pendidikan keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. Kemudian pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan: “Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada pasal 26 pada satuan pendidikan pendidikan formala wustha paling sedikit memuat: (a) Al-Qur’an, (b) Tafsir-Ilmu Tafsir, (c) Hadits-Ilmu Hadits, (d) Tauhid, (e) Fiqh-Ushul Fiqh, (f) Akhlak-Tasawuf, (g) Tarikh, (h) Bahasa Arab, (j) Balaghah, dan (k) Ilmu Kalam.<sup>71</sup>

Kurikulum pendidikan diniyah harus memuat tentang pembelajaran al-Qur’an dan Tafsir al-Qur’an, Hadist dan Mustalahal Hadits, Tajwid, Tauhid, Fiqih, Akhlak, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Imla dan Khat) dan Tarikh. Namun pihak penyelenggara pendidikan diniyah dalam menentukan referensi kitab-kitab yang dipakai yang dijadikan kurikulum tentu berbeda-beda, meskipun demikian biasanya mereka lebih banyak menggunakan kitab-kitab klasik yang *mu’tabarah* atau kitab-kitab yang sanad keilmuannya sampai kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Khusus muatan atau isi kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha pada lembaga pendidikan keagamaan Islam berlaku bidang-bidang keilmuan dan kitab-kitabnya, sebagai berikut ini:

- a. Bidang Tajwid, kitab yang digunakan adalah *Tuhfah al-Athfal*, *Hidayah al-Mustafid*, *Mursyid al-Wildan*, *Syafa’ al-Rahman*.
- b. Bidang Tauhid, kitab kitab yang digunakan adalah *Aqadah al-Awwam*, *Al Dina al-Islami*.
- c. Bidang Fiqih, kitab yang digunakan adalah *Fath al-Qarib* (Taqrib), *Minhaj al-Qawim Safinah al-Shalah*.
- d. Bidang Akhlak, kitab yang digunakan adalah *Ta’lim al-Muta’allim*.
- e. Bidang Nahwu, kitab yang digunakan adalah *Jurumiyah*, *Mutammimah*, *Nazham ‘Imrithi*, *al-Makudi*, *al’Asymawy*.
- f. Bidang Sharaf, kitab yang digunakan adalah *Nazham Maksud*, dan *al-Kailani*.
- g. Bidang Tarikh, kitab yang digunakan adalah *N r al-Yaq n*.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang *Pendidikan Keagamaan Islam*, tth, h. 9 – 10

<sup>72</sup> Depag. RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah ...*, h. 33

Dari berbagai bidang keilmuan dan kitab-kitab tersebut di atas, kemudian didistribusikan ke masing-masing jenjang kelas dan semester ganjil dan genap secara berkesinambungan. Selain itu, juga diperlukan penambahan beberapa bidang keilmuan lain seperti Bahasa Inggris dan ilmu lain yang dapat menunjang alumni lembaga pendidikan keagamaan.

Salah satu kurikulum pendidikan diniyah di Pondok Pesantren al-Falahiyah tingkat wustha yang didistribusikan dalam jenjang kelas dan semester, sebagai berikut:

### **KURIKULUM DINIYAH KELAS I TINGKAT WUSTHA<sup>73</sup>**

#### **I. Tujuan Kurikulum:**

Mendalami ilmu-ilmu Hal dan Fiqhi, Tauhid, Ahlaq dan menghafal, memahami Ilmu-ilmu alat Nahwu, Shorof, I'lal dan mentarkib ditambah mulai pratek membaca kitab gundul (kuning) ditambah hafalan Hadist, dan Tarekh.

#### **II. Isi Kurikulumnya:**

NO	FAK	KITAB	S. GANJIL		S. GENAP	
			MATERI P.	JML	MATERI P.	JML
1	Nahwu	نظم العمرىطى				
2	Shorof					
3	Fiqih	مبادئ الفقهية 4				
4	Tauhid	جواهر الكلامية				
5	Tarekh	نور اليقين 3	22		22	
6	Tajwid	هداية المستفيد				

<sup>73</sup> <http://www.KurikulumMadrasah/KurikulumDiniyahalFalahiyah>, 08/07/2014.

7	Hadist	أربعين النووية	مقدمة الى حديث 22		حديث 22	
8	Akhlaq	وصايا الابناء	11		11	
9	B. Arab	محاورة الحديثية	14		14	
10	I'lal/tashil		31		31	
11	B. Inggris	ميوسل	ميوسل		ميوسل	

## KURIKULUM DINIYAH KELAS II TINGKAT WUSTHA

### I. Tujuan Kurikulum:

Mendalami ilmu-ilmu Hal dan menghafal, memahami dan mendalami ilmu faroidl dan ilmu alat ditambah Tafsir dan Hadist, Tarekh dan Persiapan Hafalan Alfiyah.

### II. Isi Kurikulum

NO	FAK	KITAB	S. GANJIL		S. GENAP	
			MATERI P.	JML	MATERI P.	JML
1	Nahwu	متممة الأجرومية				
2	Shorof					
3	Fiqh	متن الغاية والتقريب				
4	Tauhid	السنوسية				
5	Tarekh	1				
6	Faroidl					
7	Hadist	ترغيب والترهيب				
8	Akhlaq	التربية والتحلية				
9	B. Arab	محاورة الحديثية 2				
10	B. Inggris	ميوسل	ميوسل		ميوسل	

## KURIKULUM DINIYAH KELAS III TINGKAT WUSTHA<sup>74</sup>

### I. Tujuan Kurikulum:

Menghafal, memahami, mendalami dan mempraktekkan kitab Alfiyah ke dalam kitab Taqrib yang menjadi standart mutu santri, disamping mulai dikenalkan penalaran dan penguasaan wawasan dalam memahami kitab gundul (kuning).

### II. Isi Kurikulum

NO	FAK	KITAB	S. GANJIL		S. GENAP	
			MATERI P.	JML	MATERI P.	JML
1	Nahwu	الفية ابن مالك				
2	Fiqih	فتح القريب المجيب				
3	Tarkib	فتح القريب المجيب				
4	Tauhid	كفاية العوام				
5	Tarekh	2				
6	Akhlaq	تعليم المتعلم	مقدمة الى بداية		فصل في بداية	
7	Hadist	حجة اهل السنة	مقدمة الى زيارة		زيارة القبور	
8	Faroidl		ميوسل		ميوسل	
10	B. Inggris	ميوسل	ميوسل		ميوسل	

Gambaran kurikulum diniyah pada tingkat waustha di atas, merupakan salah satu bentuk varian kurikulum pendidikan diniyah. Sebenarnya masing-masing lembaga pendidikan keagamaan memiliki bentuk kurikulum yang berbeda, baik mengenai jumlah mata pelajaran, jenis kitab yang digunakan

<sup>74</sup> <http://www.kurikulummadrasah/kurikulummadinalfalahiyah>, 08/07/2014

maupun jumlah jam pelajaran yang diberikan setiap harinya. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh visi, misi, tujuan, dan ciri khas lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Meskipun demikian secara umum, lembaga pendidikan keagamaan mempunyai beberapa kesamaan materi kurikulum, terutama kitab-kitab yang menjadi rujukan yang dijadikan pegangan, baik bagi guru maupun bagi santri.

### **3. Hubungan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam dengan Masyarakat**

Pada paparan sejarah pendidikan Islam, nampak bahwa pendidikan Islam pada saat itu terkesan sebagai pendidikan yang tradisional, dan jauh dari sentuhan-sentuhan kemajuan atau modernisasi, sehingga melahirkan berbagai regulasi pemerintah yang membuat lembaga pendidikan keagamaan tersingkirkan dan terkadang membuat merasa terakomodasi dalam sistem pendidikan nasional.

Keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan wujud dari kesadaran keberagaman umat Islam terhadap pentingnya mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki kompetensi dan pemahaman agama yang lebih baik, sehingga dapat dipahami bahwa perkembangan lembaga pendidikan keagamaan Islam tergantung dari dukungan dan perhatian umat Islam atau masyarakat Islam dalam menjaga dan memelihara eksistensi dan keberlangsungan lembaga pendidikan Islam.

Fakta membuktikan bahwa lembaga pendidikan keagamaan Islam banyak terdapat dipedesaan dan berada di tengah-tengah masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Kondisi tersebut secara kasat mata memunculkan persepsi pada sebagian masyarakat, bahwa pendidikan keagamaan

identik dengan pendidikan yang kelas dua (*second class*) yang hanya diperuntukkan untuk kalangan warga perdesaan yang berekonomi rendah pula. Persepsi tersebut, ketika itu melahirkan asumsi bahwa pengelolaan pendidikan diniyah diselenggarakan seadanya.<sup>75</sup>

Selain itu, asumsi-asumsi terhadap pendidikan ini juga dikuatkan oleh adanya kondisi pendidikan Islam yang kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah pada waktu itu dan mungkin berlangsung sampai hari ini (2015), sehingga pelayanan pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dikelola masyarakat termarjinalkan daripada sekolah-sekolah atau pendidikan umum yang dikelola pemerintah.

Masyarakat didefinisikan oleh banyak para ahli, Hasan Shadily mendefinisikan “Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain.”<sup>76</sup> Selanjutnya, Hamalik mendefinisikan masyarakat sebagai “Suatu sistem atau totalitas, yang di dalamnya terdapat berbagai subsistem yang berjenjang secara struktural, mulai dari subsistem kepercayaan, subsistem nilai atau norma-norma, subsistem kebutuhan, dan subsistem permintaan.”<sup>77</sup> Dari pengertian tersebut, masyarakat adalah kumpulan orang yang memiliki norma atau nilai yang mempengaruhi lembaga pendidikan yang dikelolanya.

---

<sup>75</sup> A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 74

<sup>76</sup> Hassan Shadily. *Ensiklopedi Indonesia*.(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 315

<sup>77</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Cet IV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset), 2011, h.74

Berawal dari subsistem kepercayaan tersebut umat/masyarakat muslim menemukan nilai berupa pahala dan lahirkan kebutuhan untuk melestarikan budaya dan kehidupan, selanjutnya melahirkan permintaan akan adanya pendidikan yang terorganisir. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dengan lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan keagamaan Islam tidak dapat dipisahkan, baik masyarakat maupun lembaga pendidikannya. Oleh karena itu, kedua belah pihak memperoleh manfaat masing-masing. Hal ini dapat dikatakan semacam hubungan simbiosis mutualisme.

Lembaga pendidikan keagamaan Islam hadir atas prakarsa dan swadaya masyarakat, hidup dan matinya lembaga pendidikan maupun maju dan mundurnya tergantung kepada dukungan masyarakat, keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam tidak dapat dipisahkan dari peranserta dan keberadaan masyarakatnya.

Berkaitan dengan *parental choice of education*, A. Malik Fadjar menyatakan:

Masyarakat akhir-akhir ini terjadi adanya pergeseran pandangan terhadap pendidikan seiring dengan tuntutan masyarakat (*social demand*) yang berkembang dalam skala yang lebih makro. Kini masyarakat melihat terhadap perolehan pengetahuan dan keterampilan atau lebih kepada pandangan pragmatisme.<sup>78</sup>

Pandangan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan keagamaan lambat laun mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan tingkat kesadaran masyarakat, terbukti ada kecenderungan masyarakat perkotaan untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pondok pesantren. Hal ini menjadi angin segar dan berdampak

---

<sup>78</sup> A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan ...*, h. 76.

positif terhadap eksistensi dan kelangsungan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan keagamaan Islam dan sesuai dengan konsep manajemen modern, dirasa perlu untuk merevitalisasi hubungan lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini sangat urgen, karena lembaga pendidikan Islam memerlukan asistensi dan dukungan (*support*) masyarakat dalam menyusun program (kurikulum) yang relevan dengan masyarakat dan dapat mengimplementasinya. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kontribusi lembaga pendidikan untuk mendapatkan program-program pendidikan yang ditawarkan. Hubungan semacam ini dapat terlaksana jika pihak pengelola lembaga pendidikan Islam dapat menjalin hubungan (relasi) kepada masyarakat secara aktif dan kreatif yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

E. Mulyasa mengemukakan hubungan lembaga pendidikan keagamaan Islam dan masyarakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kemajuan madrasah,
- b. Mengevaluasi kurikulum dan program pendidikan di madrasah,
- c. Memupuk kerjasama antara orangtua santri dengan pihak madrasah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan santri,
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan madrasah terutama memelihara aqidah dalam era globalisasi dan informasi saat ini,
- e. Membangun dan meningkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pengelolaan dan program madrasah;
- f. Menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan dan program madrasah; dan
- g. Mengerakkan *support* dan bantuan bagi peningkatan program madrasah secara keseluruhan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> E. Mulyasa dkk, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Depag, 2005), h. 12



Apabila terjalin hubungan antara pengelola lembaga pendidikan keagamaan dengan masyarakat secara harmonis, maka sangat besar manfaat yang dirasakan. Manfaat yang dirasakan pihak lembaga pendidikan, yaitu pembinaan dan dukungan berupa dukungan moral, material dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar dan sebagai sumber inspirasi. Sementara itu, manfaat yang dirasakan masyarakat adalah mendapatkan kontribusi yang positif dari kegiatan atau program pendidikan, dan berbagai inovasi yang dihasilkannya, memberikan masukan dan penilaian konstruktif terhadap program (kurikulum) yang ditawarkan lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu, hubungan masyarakat dan pihak lembaga pendidikan keagamaan pada hakikatnya merupakan sarana yang paling efektif dan bermanfaat dalam membina mengembangkan pertumbuhan dan meningkatkan *output* lulusan pendidikan Islam. Oleh karena itu, perlu menjaga dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang harmonis antara pihak lembaga pendidikan keagamaan dan masyarakat maupun sebaliknya agar dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program di lembaga pendidikan keagamaan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas dengan sendirinya dapat mengangkat citra lembaga pendidikan keagamaan.

### **C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah**

#### **1. Landasan Sosiologis dalam Pengembangan Kurikulum**

Setiap masyarakat mempercayai adanya norma atau nilai (*value*) dalam sebuah adat istiadat (budaya) yang harus dipatuhi dan ditaati. Norma atau nilai

tersebut memiliki corak nilai yang berbeda-beda. Selain itu, masing-masing komunitas juga memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda pula. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam pengembangan sebuah kurikulum, termasuk perubahan tatanan masyarakat akibat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga masyarakat dijadikan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan sosiologis.

Secara konseptual, pendidikan yang berlandaskan pada masyarakat adalah “model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip: dari masyarakat oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”<sup>80</sup> Pada konteks ini, masyarakat dibutuhkan peran serta aktif dalam pengembangan desain kurikulum di lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan keagamaan Islam (kurikulum pendidikan diniyah).

Pendidikan adalah proses menyiapkan generasi agar menjadi warga negara yang diharapkan, juga merupakan proses sosialisasi. Berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah proses inkulturasi budaya. Dengan pendidikan, tidak diharapkan lahir generasi yang merasa asing terhadap masyarakatnya, namun yang diharapkan ialah warga masyarakat lebih bermutu, mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada asas sosiologis.

Upaya untuk menjadikan peserta didik menjadi warga masyarakat yang diharapkan, pendidikan memiliki peranan penting dimana kurikulum sebagai

---

<sup>80</sup> Zubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 131

salah satu komponen pendidikan, harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mampu bekerjasama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang sosial yang berbudaya. Dalam konteks pendidikan Islam peserta didik diharapkan mampu mengemban tugas sebagai *khal fatullah* dan sebagai *'abdullah* di tengah-tengah masyarakat.

Sosiologi mempunyai empat peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

- a. Sosiologi mempunyai peranan dalam proses penyelarasan *value* yang ada dalam masyarakat;
- b. Sosiologi memiliki peranan terhadap penyesuaian norma dan nilai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Sosiologi berperan dalam menyediakan proses sosial, dan
- d. Sosiologi berupaya memahami dinamika dan keunikan santri, masyarakat dan daerah.<sup>81</sup>

Berkaitan hal tersebut, Sukmadinata mengemukakan tiga sifat penting program pendidikan menggunakan landasan sosiologis, yaitu:

- a. Pendidikan memuat norma atau nilai (*value*), dan juga memberikan pertimbangan nilai yang ada yang diharapkan masyarakat
- b. Pendidikan tidak sekadar pendidikan teoritis tapi yang lebih penting menyiapkan generasi untuk kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>81</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 124

c. Lingkungan masyarakat tempat pendidikan berlangsung sangat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan.<sup>82</sup>

Secara universal, tujuan pendidikan adalah dalam rangka menyiapkan generasi muda menjadi orang dewasa sebagai anggota masyarakat, warga negara sekaligus warga dunia (*citizen of world*) yang mandiri, kompeten, kreatif, dan produktif, untuk itu perlunya gagasan (ide) adanya tuntutan individu agar generasi muda dapat mengembangkan kepribadiannya sendiri, mengembangkan segala potensi (*fithrah* atau *ghar zah*) yang dimilikinya. Sementara itu, tuntutan masyarakat agar generasi muda (peserta didik) mampu berakhlak mulia, bekerja, dan hidup dengan baik dalam berbagai kondisi, dan diharapkan pula relevan dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip relevansi dengan lingkungan hidup peserta didik. Dengan prinsip relevansi ini tujuan pendidikan yang berorientasi pada masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sudjana menambahkan bahwa pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup yang ada, sehingga mampu menyiapkan anak didik untuk dapat hidup wajar sesuai dengan sosial budaya masyarakat.<sup>83</sup> Dalam konteks ini, kurikulum sebagai program pendidikan yang terencana harus dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap tantangan dan tuntutan sosial budaya tersebut. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum lembaga pendidikan penting sekali guru dan para pengembangan kurikulum lainnya untuk lebih peka dan peduli

---

<sup>82</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori ...*, h.58-69

<sup>83</sup> Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum ...*, h. 13

dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan masyarakat, agar apa yang menjadi isi (*content*) kurikulum sebagai program pendidikan yang diperoleh peserta didik harus sesuai (relevan) dan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik dalam hidup masyarakat, selanjutnya dapat memberikan kontribusi pada perbaikan tatanan masyarakat.

## **2. Kurikulum Berdasarkan *Needs Assessment***

*Needs assessment* (analisis kebutuhan) adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan/seharusnya (*should be/ ought to be*) atau diharapkan dengan kondisi yang ada (*what is*). Metode *needs assessment* dibuat untuk dapat mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah ada atau nyata.

Menurut Paul F. McCawley pengertian *needs assessment* adalah “... a systematic approach to studying the state of knowledge ability, interest, or attitude of defined audience or group involving a particular subject.”<sup>84</sup>

Ada beberapa hal yang melekat pada pengertian *needs assessment*, yaitu:

- a. *Needs assessment* merupakan suatu proses, artinya ada rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan *needs assessment*. *Needs assesement* bukanlah suatu hasil, tetapi suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan.
- b. Kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. *Needs assessment* merupakan kegiatan mengumpulkan

---

<sup>84</sup> Paul F. McCawley, *Methods for Conducting an Educational Needs Assessment*, (Mascow: University of Idaho Extension, 2010), h. 3

informasi tentang kesenjangan antara yang seharusnya dimiliki setiap siswa dengan apa yang telah dimiliki,

Analisis kebutuhan merupakan alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok dan individu. Perubahan ini menunjukkan upaya formal yang sistematis menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara “seperti apa yang ada” dengan “bagaimana seharusnya”.

Analisis kebutuhan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat (kesenjangan) proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran (*goals and objectives*) yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan.

Seel dan Dijkstra menyebutkan bahwa desain sistem pembelajaran (kurikulum) yang disebutnya dengan *instructional systems design, though systematic in proses, is systemic in approach. A systemic analysis is specifically required in the needs assessment phase. A holistic understanding of entire system and how the parts interact and impact each other is needed to design a reasoned instructional solution.*<sup>85</sup>

Kurikulum sebagai program pendidikan, adalah salah satu komponen dalam proses pendidikan, keberadaannya menduduki posisi yang sangat urgen untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun tujuan pendidikan yang diharapkan hendaknya sesuai (relevan) dengan tuntutan peserta didik, orangtua, dan masyarakat. Terkadang tidak jarang isi kurikulum tidak sesuai dengan berbagai harapan di atas, dan untuk mengetahui dan mengatasi permasalahan tersebut perlu

---

<sup>85</sup> Norbert M. Seel and Sanne Dijkstra, *Curriculum, Plans, and Processes in Instructional Design*, (London, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004), h. 171

adanya analisa kebutuhan (*needs assessment*) atau dengan istilah lain studi kelayakan.

Pada tahap ini, pengembangan kurikulum melakukan analisis kebutuhan suatu program dan merumuskan berbagai pertimbangan, termasuk hal-hal apa yang harus dirancang dan dikembangkan dalam kurikulum. Analisis kebutuhan (*needs assessment*) terhadap beberapa aspek seperti dikemukakan Zainal Arifin yang intinya antara lain:

- a.. Menganalisis apa yang menjadi kebutuhan peserta didik,
- b. Mempelajari dan mengkaji kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, dan
- c. Menganalisis kebutuhan pembangunan nasional dan pemerintah daerah.<sup>86</sup>

Akhir-akhir ini permasalahan kurikulum dirasakan mempunyai peran dan fungsi yang kompleks. Hal ini disebabkan kurikulum merupakan alat yang sangat utama dalam mewujudkan tercapainya tujuan program pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal, sehingga gambaran program pendidikan secara utuh dapat terlihat jelas dalam kurikulum tersebut. Sejalan dengan tuntutan zaman, perkembangan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arus informasi dan era globalisasi, sudah saatnya dunia pendidikan harus peka terhadap dampak tersebut dengan melakukakn berbagai terobosan dan inovasi agar pendidikan dapat berjalan mencapai sasaran yang diinginkan oleh semua pihak *stakeholders*. Oleh karena itu, analisis kebutuhan dalam sebuah kurikulum sangat urgen, demi tercapainya rencana dan sasaran tersebut.

---

<sup>86</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan ...*, h. 43.

Tujuan dilakukannya fase analisis atau analisis kebutuhan adalah untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi objektif di lapangan sehingga akan memberikan kejelasan dalam membuat keputusan yang responsif sekaligus informatif. Hal tersebut senada dengan pendapat Seel dan Dijkstra yang mengemukakan tujuan analisis kebutuhan, yaitu: *“the purpose of the analysis phase is to gather enough information so that designers can make informed and responsive decisions”*.<sup>87</sup> Fase analisis kebutuhan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang memadai, sehingga para perancang kurikulum dapat membuat keputusan yang informatif sekaligus responsif terhadap permasalahan di lapangan. Selanjutnya selama pengumpulan data dan informasi *needs assessment* untuk menggambarkan kebutuhan faktual apa yang dibutuhkan dan bagaimana menempatkan kebutuhan tersebut dalam keseluruhan sistem organisasi sambil mengkonfirmasi jurang kinerja dan mana yang dapat diakomodasi perancang dari intervensi yang disarankan.

Metode *needs assessment* dibuat untuk dapat mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran peserta didik dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapat/diperoleh. Dalam pengukuran kesenjangan seorang analisis harus mampu mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi dan apa yang terjadi dalam kondisi nyata atau faktual.

a. Langkah-langkah analisis kebutuhan kurikulum

Sebelum merancang atau mendesain sebuah kurikulum memang sebaiknya harus melakukan analisis kebutuhan (*needs assessment*), Untuk

---

<sup>87</sup> Norbert M. Seel dan Sanne Dijkstra, *Curriculum, Plans, and Processes in ...*, h. 172



melaksanakan *needs assessment* yang memiliki tujuan dan fungsi seperti dikemukakan di atas, langkah-langkah (*steps*) tersebut, yaitu:

1) *Identify the performance problem*

Mengidentifikasi problem yang dihadapi para guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

2) *Specify the goal of the needs assessment*

Langkah ini berupaya menentukan tujuan akhir dari kegiatan analisis kebutuhan yang bakal dilaksanakan. Hal ini dilakukan apakah ada dampak perubahan perbaikan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

3) *Specify the ideal*

Para pengembang kurikulum menetapkan standar yang ideal yang mestinya dapat diimplementasikan para pendidik terhadap sumber-sumber belajar.

4) *Substantiating needs—Understanding the use of web resources*

Langkah ini adalah berupaya memperkuat kebutuhan dan memahami baik terhadap lingkungan sekolah yang aktual maupun penggunaan sumber belajar berbasis *web* atau *internet*.

5) *Determining causes and prioritizing recommendations*<sup>88</sup>

Langkah ini dapat menentukan berbagai penyebab yang ditimbulkan sekaligus dapat membuat rekomendasi-rekomendasi yang diprioritaskan.

Berdasarkan langkah-langkah di atas, Seel menggambarkan *needs assessment* dalam bentuk kegiatan yang dimulai dari mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pendidik, sampai dapat menentukan penyebabnya

---

<sup>88</sup> Norbert M. Seel dan Sanne Dijkstra, *Curriculum, Plans, and Processes in ...*, h. 176 - 185

dan memberikan rekomendasi berlandaskan skala prioritas. Sementara itu, McCawley mengemukakan bahwa langkah-langkah (*steps*) untuk melaksanakan kegiatan *needs assessment* adalah langkah utama menyusun perencanaan. Dalam perencanaan harus dapat menjawab pertanyaan 5W+H (*what, when, who, where, why and how*) terhadap sebuah kegiatan. Deskripsi jawaban tersebut menjadi sebuah perencanaan dalam rangka mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan *needs assessment*.

McCawley mengemukakan tujuh langkah dalam *needs assessment*, yaitu:

- 1) *Write objectives: What is it that wants to learn from the needs assessment?*
- 2) *Select audience; who is the target audience? Whose needs*
- 3) *Collect data; How will you collect data that will tell you what you need to know? Will you collect data directly from the target audience or indirectly?*
- 4) *Select audience sample: How will you select a sample of respondents who represent the target audience?*
- 5) *Pick an instrument: What instruments and techniques will you use to collect data?*
- 6) *Analyze data: How will you analyze the data you collect?*
- 7) *Follow up: What will you do with instrument that you gain?*<sup>89</sup>

Langkah-langkah di atas, merupakan pedoman bagi peneliti untuk mencari tahu kebutuhan yang ada dalam suatu komunitas. Namun bukan berarti metode pengumpulan data yang dipentingkan dalam suatu *assessment*, melainkan prosesnya yang harus diselesaikan dan dari hasil *needs assessment* tersebut menjadi sebuah dasar untuk membuat keputusan (*decision making*). Oleh karena itu, untuk membuat suatu keputusan perlu tidaknya mengembangkan suatu kurikulum, maka harus terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan.

---

<sup>89</sup> Paul F. McCawley, *Method for conducting an Educational Needs ...*, h. 4

Pengembangan kurikulum khususnya pada lembaga pendidikan keagamaan merupakan langkah dalam mengimbangi berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, psikologi, sosial politik, ekonomi, dan sebagainya. Pada akhirnya dapat memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan dari produk kurikulum yang ada dan selanjutnya akan diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Oliva bahwa kurikulum yang berpusat pada anak (*the child-centered*) "as concept draws heavily on what is known about learning, growth, and development (psychology and biology), on philosophy (particularly from school of philosophy dan progressivism), and on sociology."<sup>90</sup> Misalnya, jika analisis pengembangan kurikulum yang berpusat pada santri di lembaga pendidikan keagamaan khususnya tingkat wustha, maka pengembangan kurikulum harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik dalam mempersiapkan sebagai anggota masyarakat yang religius yang sehat rohani dan jasmani, dunia dan akhirat.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, pengembangan mengandung makna bahwa kurikulum akan harus berubah sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam setiap bidang kehidupan. Rancangan analisis kebutuhan melibatkan berbagai pilihan. Pemilihan yang mungkin untuk memberi suatu pandangan menyeluruh tentang kebutuhan peserta didik. Hal itu dapat menghadirkan minat yang berbeda jika pembuat keputusan dilibatkan. Keputusan harus dibuat atas prosedur yang praktis dengan cara mengumpulkan, mengorganisir, meneliti, dan melaporkan informasi yang telah diperoleh. Hal tersebut penting untuk

---

<sup>90</sup> Peter F Oliva, *Developing the ...*, h. 12

menyakinkan bahwa analisis kebutuhan tidak menghasilkan suatu beban informasi yang terlalu berat.

Analisis kebutuhan diperlukan atas satu alasan yang jelas untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang berbeda agar dapat dipastikan bahwa informasi yang bakal digunakan benar-benar terkumpul berdasarkan langkah-langkah *needs assessment* yang baik, sehingga dengan *needs assessment* yang benar akan memudahkan dalam merancang sebuah kurikulum khususnya kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha yang diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik kebutuhan peserta didik, orangtua, masyarakat maupun *stakeholders* lainnya.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan**

Pendidikan di Indonesia bila merujuk pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat dua jalur pendidikan, yaitu; pendidikan jalur sekolah (formal), dan jalur pendidikan luar sekolah yang mencakup pendidikan dalam keluarga (informal), dan pendidikan di masyarakat (nonformal), sehingga pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, orangtua dan masyarakat. Pemerintah dan orangtua secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan masyarakat terlibat secara tidak langsung, kecuali masyarakat yang dilibatkan secara khusus dalam komite sekolah/madrasah.

Sebagaimana diketahui madrasah telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Kehadirannya merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan

yang memadai. “Madrasah diharapkan dapat memenuhi dua dimensi kebutuhan yaitu: penguasaan IPTEK dan pendidikan agama (akhlak mulia)”.<sup>91</sup> Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan satu keniscayaan, dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran, dana, berpartisipasi langsung dalam kegiatan pendidikan. Lebih-lebih pada lembaga pendidikan yang kelola swasta, dan umumnya lembaga pendidikan keagamaan hampir dapat dikatakan 100 persen adalah swasta yang dikelola atas swadaya murni masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mendapat manfaat dari madrasah dalam membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

Partisipasi masyarakat yang intens terhadap program madrasah dapat meningkatkan kinerja dan melaksanakan proses pendidikan secara produktif, efektif, dan efisien sehingga diharapkan lulusan (*output*) yang produktif dan berkualitas. *Output* yang berkualitas ini tampak dari penguasaan peserta didik terhadap berbagai kompetensi dasar (KD) yang dapat dijadikan bekal untuk terjun ke masyarakat atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan hidup di masyarakat secara layak. Dengan demikian pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan berasal dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Bagi sekolah/madrasah swasta partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah suatu kenyataan objektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subjektif orangtua peserta didik. Oleh karena itu, partisipasi yang dimaksud di sini menuntut adanya pemahaman yang sama dan objektif dari madrasah dan orangtua dalam tujuan sekolah/madrasah.

---

<sup>91</sup> Fuad Fakhruddin dan A. Mukti Bisri, *Standar Pelayanan Minimal Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 5

Artinya, tidak cukup dipahami oleh penyelenggara madrasah saja bahwa partisipasi masyarakat sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu. Jika pemahaman dalam penyelenggaraan pendidikan intersubjektif (siswa, orangtua, dan guru) hal ini akan menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu itu sendiri.<sup>92</sup> Tujuan partisipasi juga memberi peluang secara luas peran masyarakat dalam bidang pendidikan ini sekaligus menunjukkan bahwa negara bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan,<sup>93</sup> sehingga upaya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dapat disalurkan terutama berkaitan dengan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap program lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan keagamaan tingkat wustha.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat diharapkan pihak pengelola pendidikan, lebih-lebih lembaga pendidikan yang dikelola yayasan atau berstatus swasta, terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, namun tidak mudah untuk mengajak dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hambatan yang dialami satuan pendidikan untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu pendidikan, membuktikan belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama. Realitas tersebut menguatkan asumsi sepenuhnya bahwa partisipasi tidak mudah diwujudkan, karena ada hambatan yang bersumber dari pemerintah, pihak yayasan, dan masyarakat.

---

<sup>92</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.192-199

<sup>93</sup> Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.118

Siti Irene Astuti Dwiningrum mengemukakan bahwa kendala dari pihak pemerintah muncul berupa: (1) Lemahnya *political will* dari unsur legislatif para *decision maker* di daerah untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik khususnya bidang pendidikan; (2) Rendahnya kualitas sumber daya insani yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik lainnya; (3) Rendahnya kompetensi anggota DPR dalam mengakomodir kepentingan masyarakat; dan (4) Sedikit/rendahnya dukungan finansial, kegiatan partisipasi masyarakat sering kali hanya dianggap sebagai proyek, sehingga pemerintah tidak melakukan asistensi anggaran biaya secara berkelanjutan.<sup>94</sup>

Sedangkan pihak masyarakat, kendala partisipasi muncul karena beberapa hal, antara lain:

- a. Adanya budaya paternalisme yang masih dianut sebagian masyarakat, sehingga menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka.
- b. Adanya sikap apatisme, selama ini masyarakat sangat jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah.
- c. Tidak adanya kepercayaan (*trust*) dari masyarakat terhadap pemerintah.<sup>95</sup>

Bila hambatan-hambatan tersebut tidak segera dicarikan solusinya, maka sedikit-banyaknya berpengaruh yang kurang baik terhadap penyelenggaraan sekolah/madrasah maupun bagi masyarakat sendiri. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu duduk bersama untuk memahami masing-masing peran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang pada gilirannya menghasilkan *output* sekolah/madrasah yang berkualitas, selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

---

<sup>94</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi ...*, h. 124

<sup>95</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi ...*, h.197-198.

Ada beberapa solusi yang dapat mengurangi dan bahkan dapat mengatasi berbagai hambatan di atas dengan melakukan beberapa upaya. Sebagaimana ditawarkan oleh Ali Imron beberapa upaya yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

- a. Menawarkan sanksi atas masyarakat yang tidak mau berpartisipasi. Sanksi demikian dapat berupa hukuman, denda, dan kerugian-kerugian yang harus diderita oleh si pelanggar.
- b. Menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi. Hadiah yang demikian berdasarkan kuantitas dan tingkatan atau derajat partisipasinya.
- c. Melakukan persuasi kepada masyarakat dalam kebijaksanaan yang dilaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
- e. Mengaitkan partisipasi masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik.
- f. Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan, agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplementasikan.
- g. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memang perlu diyakini, bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik, jika mereka berpartisipasi dalam kebijaksanaan.<sup>96</sup>

Masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan bahkan kelangsungan penyelenggaraan pendidikan khususnya di lembaga pendidikan swasta. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dan dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan institusi pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu:

---

<sup>96</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 82.



a. Partisipasi dalam bentuk pembiayaan

Pendidikan memerlukan dukungan dana sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung pembiayaan yang diperlukan lembaga pendidikan. Pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk kemajuan pendidikan. Selain itu, pihak perusahaan dan industri juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menyisihkan keuntungannya, seperti pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu dan berprestasi di daerahnya masing-masing. Perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA), tetapi diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) setempat.

b. Partisipasi dalam bentuk bahan material yang diperlukan

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan memberikan sumbangan bahan-bahan berupa material bangunan untuk membangun fasilitas sekolah atau menyempurnakan bangunan kelas dan kelengkapan fasilitas pendidikan lainnya untuk kegiatan pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, masyarakat telah mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan pendidikan secara keseluruhan.

c. Partisipasi dalam bentuk jasa dalam kegiatan pembelajaran

Masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang bersifat akademik yang lebih

berkualitas. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak-anak di rumah. Selain itu, dukungan orangtua di sekolah dilakukan dengan menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Sementara itu, banyak lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta dapat memberikan kesempatan untuk berpraktek atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik.

d. Partisipasi dalam bidang kultural

Perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar lembaga pendidikan keagamaan sudah dapat berjalan, sehingga lembaga pendidikan keagamaan mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat, sekaligus memelihara dan melestarikan budaya positif yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

e. Partisipasi dalam ikut mengawasi dan menilai (evaluasi) kemajuan lembaga pendidikan keagamaan

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah suatu keharusan. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan, baik terhadap program lembaga pendidikan keagamaan maupun dalam penyusunan kurikulum, agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Lembaga pendidikan keagamaan tidak dapat melepaskan diri dari peran serta dan kontribusi masyarakat, begitu juga sebaliknya masyarakat memerlukan

lembaga pendidikan sebagai lembaga yang dapat mencerdaskan masyarakat dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup dan kehidupan. Upaya membangkitkan masyarakat belajar profesional di suatu lembaga pendidikan memerlukan kemampuan, kesiapan, tekad (niat) yang kuat, dan sikap kebersamaan sebagai warga sekolah, serta kerjasama yang harmonis antara pimpinan lembaga pendidikan, pengurus yayasan, organisasi orangtua santri, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya untuk bersama berpartisipasi dalam pengembangan dan pembaharuan di lembaga pendidikan keagamaan dengan harapan lembaga pendidikan tersebut menjadi lebih baik.

#### **4. Kurikulum yang Berorientasi pada Masyarakat**

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran. Sebagai salah satu komponen dalam pendidikan, kurikulum menjiwai bahkan dapat dikatakan roh dalam sistem pendidikan, sehingga pendidikan tidak dapat terlaksana tanpa kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berlandaskan kepada asas-asas pengembangan kurikulum, salah satu landasannya yang sangat penting adalah landasan sosiologis.

Pandangan al-Abrasyi tentang manusia sebagai homososial tercermin secara jelas diungkapkan dalam kitab beliau yang berjudul "*R h at-Tarbiyah wa at-Ta' l m*" berikut ini.

الإنسان لا يستطيع ان يعيش منفرد بل لا بدله من الاتصال بغيره,  
وجب عليه ان يعمل لسعادة المجتمع الذى يتصل به من غير لمصلحته

97.

Pandangan al-Abrasyi tentang manusia sebagai akhlak liberal individualis dan homososial, sehingga tidak sampai kepada sosio-antroposentris yang memusatkan ukuran nilai kepada masyarakat dan budaya, dan konsepnya mengenai *fitrah*, al-Abrasyi memandang manusia dalam perspektif Islam, dengan mengakui adanya sesuatu yang tetap dan tidak berubah dalam diri dan sifat manusia.<sup>98</sup>

Landasan sosiologis sangat berperan dalam pengembangan kurikulum terutama dalam merancang isi (*content*) kurikulum agar benar-benar dapat memenuhi tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat, sebab pendidikan berasal dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan kurikulum yang berasal dari tuntutan masyarakat bawah (*grassroots*) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat?

Pendidikan harus berdasarkan aktivitas masyarakat dan kebudayaannya. Tujuan pendidikan yang utama ialah membantu peserta didik memperoleh kehidupan yang baik dalam lingkungan sosialnya, karena isi (*content*) kurikulum mengandung nilai-nilai kehidupan sosial sehari-hari, sehingga desain kurikulum

---

<sup>97</sup> Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi, *R h at-Tarbiyah wa at-Ta'l m*, (Mesir: Percetakan 's al-Y b al-Halaby, 1960), h.37.

<sup>98</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam (Paradigma Baru Pendidikan ...*, h. 145

mengacu kepada *social functions design* atau dengan kata lain rancangan kurikulum yang berdasarkan pada fungsi-fungsi masyarakat.

Pengembangan kurikulum yang menggunakan *social functions design* merupakan desain kurikulum yang menekankan pada fungsi-fungsi sosial atau hidup bermasyarakat yang mana peran individu sebagai warga masyarakat dalam sebuah komunitasnya. Selain itu, *social function design* lebih menekankan peranan anggota masyarakat (individu peserta didik) dalam menjalankan fungsi sosial dalam memecahkan masalah, sekaligus menjalankan peranannya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan tempat tinggalnya.

Peserta didik adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara kodrati manusia pasti memerlukan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan hidup bersama, berinteraksi dan bekerjasama satu dengan lainnya. Melalui kerjasama tersebut, manusia dapat hidup, berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan berbagai problem yang sedang dihadapi secara bersama. Jadi tugas lembaga pendidikan keagamaan membantu agar santri mampu secara intelektual dan emosional bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakatnya di masa yang akan datang. Pendapat Schubert yang dikutip oleh Sukmadinata mengemukakan: “Melalui pendidikan manusia memperoleh peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban masa sekarang, dan membuat peradaban masa yang akan datang.”<sup>99</sup> Oleh karena itu, pendidikan (isi kurikulum) harus selalu

---

<sup>99</sup> William H. Schubert, *Curriculum: Perspective, Paradigm, and Possibility*, dalam Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan ...*, h. 65.

dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama akhir-akhir ini sangat cepat sebagai akibat dari perkembangan arus informasi, telekomunikasi dan globalisasi, sehingga sering lembaga pendidikan keagamaan tidak cukup mampu mengikuti perubahan kemajuan masyarakat. Apalagi lembaga pendidikan keagamaan makin lama bertambah jauh ketinggalan bahkan dicap tradisional atau konservatif. Lembaga pendidikan keagamaan dianggap tidak mampu bergerak secepat perubahan masyarakat, dan terkadang lembaga pendidikan keagamaan masih berpegang pada kurikulum lama yang tidak pernah ada pembaharuan (*redesign*) kurikulum yang dulu dianggap fungsional dan mampu memecahkan problem sosial. Namun dalam era informasi dan globalisasi dewasa ini kurikulum tersebut tidak lagi relevan dapat memenuhi tuntutan zaman. Dengan demikian timbul anggapan bahwa lembaga pendidikan keagamaan sudah ketinggalan zaman dan kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sekarang.

Merancang kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dilatar-belakangi oleh adanya perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa berubah. Oleh karena itu, kurikulum (isi kurikulum) pada lembaga pendidikan keagamaan Islam harus mempersiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat.

Apabila orientasi masyarakatnya berubah, maka perubahan dalam isi kurikulum merupakan satu keniscayaan. Oleh karena itu, kurikulum harus

dirancang kembali (*redesign*) dan dikembangkan secara fleksibel yakni dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat. Untuk mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum rekonstruksi sosial. Secara definitif “rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum merupakan satu pendekatan yang bertolak dari problem atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat”.<sup>100</sup>

Salah satu tujuan pendidikan jangka panjang adalah untuk membuat satu generasi yang akan datang lebih baik dari generasi yang ada sekarang, atau dengan kata lain bagaimana upaya pendidikan membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang dengan konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Muhaimin mengemukakan, “... pendekatan rekonstruksi sosial dalam mendesain kurikulum bertitik tolak dari problem yang tengah dihadapi masyarakat, untuk selanjutnya dengan menerapkan ilmu dan teknologi, dan bekerja secara kooperatif dan kolaboratif dicarikan upaya solusinya dalam rangka pembentukan tatanan masyarakat yang jauh lebih baik.”<sup>101</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu fungsi dari pendidikan pada pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan dan menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ilmu agama Islam dan

---

<sup>100</sup> Hamdan, *Pengembangan Kurikulum PAI Teori dan ...*, h. 71

<sup>101</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah ...*, h. 173

mengamalkan ajaran agama Islam,<sup>102</sup> termasuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan menuju ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang jauh lebih baik dari generasi sekarang yang oleh para ahli pendidikan Islam disebutkan terwujudnya masyarakat *mad ny (civil society)*, yaitu suatu masyarakat yang memiliki sikap toleransi, saling menghargai, menghormati, membantu satu sama lainnya dan berakhlak mulia, yaitu individu sebagai '*abdullah* dan *khal fatullah*.

#### **D. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Model *Grassroots***

##### **1. Model *Grassroots* dan aspek-aspeknya**

Pada bagian terdahulu dikemukakan beberapa model pengembangan kurikulum termasuk salah satunya model pengembangan kurikulum *grassroots*. Bagian ini membahas lebih detail tentang model tersebut karena penelitian ini berusaha mengembangkan kurikulum pendidikan diniyah dengan pendekatan akar rumput masyarakat (*grassroots*) dimana lembaga pendidikan keagamaan tersebut berada, sehingga sangat perlu untuk menguraikan secara khusus model *grassroots* ini.

Model *grassroots* dalam pengembangan kurikulum berasal dari model terbaliknya Taba yang dikutip Oliva, seperti ungkapan berikut:

*Models of Curriculum Development or the Taba Model, Taba took what is known as a grass-roots approach to curriculum development. She believed that the curriculum should be designed by the teachers rather than handed down by higher creating authority. Further, she felt that teachers should*

---

<sup>102</sup> PMA RI No. 13 Tahun 2014 tentang *Pendidikan ...*, h. 2



*begin the process by teaching-learning units for their students in their schools rather initially in creating a general curriculum design.*<sup>103</sup>

Model pengembangan kurikulum secara teoretis merupakan suatu proses pengembangan kurikulum secara keseluruhan komponen atau hanya mencakup sebagian komponen kurikulum saja. Sementara itu, yang lain memberikan ulasan bahwa model ini adalah suatu proses kurikulum yang hanya menekankan pada mekanisme pengembangannya saja. Model pengembangan kurikulum perlu didasarkan pada tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi yang tergambarkan dalam proses pengembangan kurikulum tersebut.

Sedangkan konsep model pengembangan *grassroots* adalah suatu pendekatan dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan permasalahan atau problem yang ada di tengah-tengah masyarakat (akar rumput). Salah satu langkahnya adalah melalui *needs assessment*, kemudian dilanjutkan dengan menyusun kembali (*redesign*) kurikulum yang tujuannya sesuai yang dikehendaki dalam model pengembangan kurikulum. Dengan kata lain bahwa model ini beranjak dari konsep *bottom-up* yang merupakan kebalikan dari *top-down* yang selama ini diberlakukan pada sekolah/madrasah negeri.

Selama ini, model administratif dimana inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari para pemegang kebijakan yang lebih tinggi kemudian turun ke stafnya atau dari atas ke bawah, sementara pendekatan *grassroots*, inisiatifnya dimulai dari lembaga pendidikan (sekolah) atau guru-guru sebagai implementator, kemudian didiseminasi pada area/lingkup yang lebih luas, makanya pendekatan ini disebut juga pengembangan kurikulum bersifat *bottom-*

---

<sup>103</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development; Theory and Practice*, dalam Peter F. Oliva, *Developing the Curri ...*, h.133

*up*. Oleh karena sifatnya demikian, maka pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam penyempurnaan kurikulum (*curriculum improvement*), daripada pengembangan kurikulum baru (*curriculum development*).<sup>104</sup>

Model *grassroots* ini biasanya bermula dari ide dan inisiatif para guru, kemudian dilanjutkan pimpinan dan pengelola sekolah, analisis dimulai dari komponen-komponen kurikulum yang dianggap kurang baik, kemudian diarahkan untuk memperbaiki komponen kurikulum tertentu, bahkan yang lebih spesifik problem pembelajaran di kelas. Model ini didasarkan pada pertimbangan bahwa guru adalah sebagai perencana, pelaksana, dan penyempurna kegiatan pembelajaran di kelasnya.

Model *grassroots* bersifat desentralisasi. Hal ini memungkinkan terjadinya kompetisi di dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan, yang pada gilirannya akan menghasilkan manusia-manusia yang mandiri dan kreatif.

Berdasarkan uraian di atas, model *grassroots* dapat digunakan apabila sistem pendidikan yang dianut adalah desentralisasi. Desentralisasi selalu berorientasi pada demokratis dalam merencanakan kurikulum. Hal ini memunculkan 2 (dua) asumsi yang sangat penting yaitu: (1) bahwa kurikulum dapat berhasil apabila guru-guru dilibatkan secara langsung dengan proses pengembangan kurikulum; (2) tidak hanya para *expert* yang profesional yang dapat dilibatkan, namun peserta didik, orangtua, dan anggota masyarakat juga dapat diandalkan dan dimasukkan proses dan kegiatan pengembangan kurikulum sekolah.

Berdasarkan dua asumsi di atas, pengembangan kurikulum ini akan melibatkan masyarakat yakni menyerap aspirasi masyarakat yang dilakukan

---

<sup>104</sup> Nana Syaodih Sukmandinata, *Prinsip dan Landasan Pengembangan ...*, h.179

dengan *needs assessment*, juga guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum di sekolah dan para ahli termasuk pemangku kepentingan (*stakeholders*). Semuanya harus berjalan dengan baik dan seimbang sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengembangan kurikulum. Dengan demikian diharapkan desain kurikulum yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Husen dalam Subandijah menunjukkan beberapa keuntungan yang diperoleh dari pola pendekatan desentralisasi ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. *Participation: a greater degree of democracy is enjoyed by the participants in the decentralized administration proces.*
- b. *Legitimacy: decisions which are adopted on a more participatory basis enjoy greater consensus.*
- c. *Proximity: decisions in desentralized system pay closer attention to concrete needs.*
- d. *Creations and innovation: participation promotes the individual's creative processes for the benefit of the organization.*
- e. *Integration: the internal coherence of the organization is facilitated if coodination and direction correctly and if efficient channels of communication are established.*
- f. *Efficiency: personnel and paperwork costs are reduced in central offices.*<sup>105</sup>

Berdasarkan pendapat Husen di atas, dapat diketahui bahwa keuntungan pengembangan kurikulum pola desentralisasi (*grassroots*) dapat diperoleh dari banyak keuntungan, yaitu: partisipasi dari berbagai pihak, legitimasi keputusan yang dibuat, prakiraan adanya perhatian terhadap kebutuhan yang nyata, kreasi dan inovasi, integrasi dan efisiensi.

Pengembangan kurikulum yang bersifat *grassroots* mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi mungkin pula

---

<sup>105</sup> Torsten Husen dan T. N. Postlethwaite, T. Neville, ed., *The International Encyclopaedia of Education, Research and Studies*, dalam Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi ...*, h.202.

dapat digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain, atau keseluruhan bidang studi pada sekolah atau daerah lain. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi dengan pendekatan *grassroots*-nya, memungkinkan terjadinya kompetisi dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan, yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pengembangan *grassroots* ini, yaitu: (1) Guru dipersyaratkan memiliki kompetensi yang *expert* dan profesional; (2) Guru seyogyanya terlibat secara penuh dalam *redesign* kurikulum; (3) Guru dilibatkan langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi; dan (4) Adanya pertemuan kelompok sesering mungkin dalam membahas permasalahan kurikulum, ini berdampak pada pemahaman guru yang nantinya menghasilkan kesepakatan tentang tujuan, prinsip, dan lain-lain.<sup>106</sup> Ketentuan-ketentuan ini merupakan persyaratan ideal dalam penerapan pendekatan *grassroots* dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut bukan berarti jika tidak terpenuhi keempat ketentuan itu, tidak dapat menggunakan pendekatan *grassroots* tersebut dalam pengembangan kurikulum, yang terpenting adalah menggunakan *needs assessment* dan adanya pelibatan guru dalam pengembangan kurikulum yang merupakan dasar dari pendekatan *grassroots*.

#### a. Prinsip-Prinsip Model *Grassroots*

Guru adalah ujung tombak pengembangan kurikulum di tingkat operasional di kelas yang menentukan dalam tercapainya tujuan kurikulum di

---

<sup>106</sup> Nana Syaoudih Sukmandinata, *Prinsip dan Landasan Pengembangan ...*, h.180

tingkat paling bawah dan mendasar. Dalam pengembangan kurikulum, model *grassroots*, guru merupakan kunci dalam rekayasa kurikulum yang efektif.

Berkaitan dengan posisi guru dalam pengembangan kurikulum pendekatan *grassroots* diperlukan 4 empat prinsip, seperti di bawah ini:

- 1) Kompetensi guru harus baik dan profesional.
- 2) Guru dituntut senantiasa terlibat secara pribadi dalam masalah perbaikan dan revisi kurikulum.
- 3) Keterlibatan guru dalam merumuskan tujuan dalam memilih, mengidentifikasi, memecahkan masalah yang dihadapi dan mempertimbangkan, serta mengivalueasi hasil keterlibatannya.
- 4) Adanya saling memahami antara guru satu dengan yang lain dalam membuat kesepakatan berdasarkan prinsip dan tujuan dasar.<sup>107</sup>

Prinsip ini bersifat operasional, karena guru didorong untuk bekerja secara kooperatif dalam merencanakan kurikulum baru. Dorongan terjadi bila pihak administrator menyediakan jabatan, waktu luang, material dan rangsangan lain yang kondusif terhadap perencanaan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum sekolah/madrasah melibatkan guru merupakan satu keharusan, karena guru adalah orang yang paling bertanggung jawab keberhasilan dan ketercapaian tujuan kurikulum pada tingkat paling bawah dan dapat dirasakan oleh peserta didik.

#### b. Kelebihan dan Kelemahan Model *Grassroots*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa kelebihan pendekatan *grassroots* ini adalah keterlibatan semua unsur-unsur sekolah mulai

---

<sup>107</sup> (Stanley, Smith and Shores: 1957)

dari kepala sekolah, guru, peserta didik, bahkan orangtua wali murid. Keterlibatan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan tentu membawa lembaga tersebut merasa milik bersama dan menjadi tanggung jawab bersama pula dalam memecahkan permasalahan yang timbul di lembaga pendidikan.

Sedangkan kelemahan model ini adalah penerapan pendekatan partisipasi masyarakat yang demokratis dalam proses pengembangan kurikulum, bersifat teknis yang kompleks, tidak menjamin menghasilkan perbaikan kegiatan pengembangan kurikulum sekolah. Meskipun demikian, bukan berarti tidak diperlukan keterlibatan masyarakat dalam urusan permasalahan sekolah secara umum. Namun pendekatan ini lebih memberikan kontribusi permulaan dalam memperkuat landasan pembuatan keputusan kurikulum dan dapat bertanggung jawab terhadap tuntutan masyarakat.

## **2. Langkah-Langkah dalam Pengembangan Kurikulum Pendekatan *Grassroots***

Sebagaimana dikemukakan pada bahasan terdahulu banyak model yang ditawarkan dalam pengembangan kurikulum. Setiap model memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pengembangan kurikulum. Masing-masing model memiliki tahapan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setelah dicermati sebagian besar model pengembangan kurikulum dimulai dari *needs assessment*.

Berdasarkan pendapat Soetopo dan Soemanto<sup>108</sup>, Langkah-langkah pengembangan makro sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h. 60-61

- a. Adanya faktor-faktor yang mendorong perlunya inovasi kurikulum, antara lain:
- 1) Tujuan (*objectives*) tertentu, biasanya dipengaruhi oleh faktor: historis, falsafah, sosiologis, psikologis dan IPTEK.
  - 2) Adanya penemuan hasil riset dalam interaksi Pembelajaran. Seperti riset PTK (*classroom action research*).
  - 3) Adanya tekanan-tekanan baik yang datang dari internal (sekolah) maupun dari eksternal (pemerintah, ormas, dan parpol).
- b. Inisiasi pengembangan
- Inisiasi dapat terbentuk dari kalangan intern sekolah/madrasah maupun dari pihak ekstern yang menghendaki adanya pembaruan kurikulum di sekolah/madrasah tertentu, diharapkan membawa perubahan dan kemajuan lembaga pendidikan (sekolah/madrasah).
- c. Pengembangan kurikulum baru
- Kurikulum baru seyogyanya dikembangkan melalui langkah-langkah pengembangan kurikulum yang harus mengikuti fase-fase, yaitu:
- 1) Penentuan tujuan-tujuan (*objectives*) kurikulum yang harus mengadung 3 (tiga) ranah, yaitu: ranah kognitif (*ta'lim*), afektif (*ta'dib & tazkiyah*), dan psikomotor (*tarbiyah*).
  - 2) Produksi materials (bahan pelajaran dan prangkat pembelajaran lainnya), dan menentukan pendekatan, metode dan strategi (teknik) pembelajaran yang sesuai.

- 3) Pelaksanaan percobaan (uji coba) terbatas pada sekolah/madrasah tertentu.
  - 4) Monitoring, evaluasi, dan revisi terhadap materials.
  - 5) Penyebaran terhadap kurikulum baru yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi dan revisi.
- d. Diseminasi (penyebarluasan) pengetahuan dan pemahaman tentang kurikulum baru di luar lembaga (sekolah/madrasah) pengembangan kurikulum.
- Hasil-hasil percobaan kurikulum disebarluaskan di sekolah-sekolah/madrasah dan *stakeholders* lainnya guna menyamakan pemahaman konsep dan persepsi.
- e. Implementasi kurikulum yang telah dikembangkan di sekolah/madrasah.
- Setelah sekolah/madrasah dan *stakeholders* memberikan respon yang positif, kurikulum baru segera diterapkan di sekolah/madrasah. Tentu saja guru-guru harus dipersiapkan untuk dapat melaksanakan kurikulum baru tersebut.
- f. Evaluasi kurikulum
- Para pengembang kurikulum dapat mengadakan monitoring dan penilaian terhadap kurikulum yang sedang atau telah dilaksanakan. Dengan mendapatkan umpan balik berupa masukan (*input*) baik dari guru-guru, peserta didik, administrator sekolah/madrasah, maupun dari *stakeholders* lainnya, maka hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan revisi seperlunya, perubahan sektoral



(beberapa komponen) ataupun perubahan total yang menghendaki pengembangan yang baru lagi.

Mencermati langkah-langkah secara makro di atas, hal ini merupakan tahapan yang komplis dalam pengembangan kurikulum, dan hal tersebut termasuk pada perubahan total yang pada gilirannya akan menghasilkan kurikulum baru. Sementara pengembangan kurikulum yang dalam konteks penelitian penulis dengan pendekatan *grassroots* adalah perubahan kurikulum sektoral yang berusaha mendesain kembali (*redesign*) kurikulum yang ada memilah yang mana yang masih relevan dan yang mana yang perlu dilakukan perubahan atau perbaikan.

Langkah-langkah pengembangan kurikulum dengan pendekatan *grassroots* merupakan model pengembangan kurikulum Taba yang memodifikasi model dasar Tyler. Adapun langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum Taba (*inverted model*), yaitu:

*Step 1: Diagnosis of needs*

*Step 2: Formulation of objectives*

*Step 3: Selection of content*

*Step 4: Organization of content*

*Step 5: Selection of learning experiences*

*Step 6: Organization of learning experiences*

*Step 7: Determination of what to evaluate and of the ways and means of doing it,*<sup>109</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa langkah-langkah yang digunakan Taba dalam mengembangkan desain kurikulum adalah diagnosis kebutuhan, formulasi tujuan, seleksi isi, organisasi isi, seleksi pengalaman

---

<sup>109</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development Theory and ...*, h. 12

belajar, organisasi pengalaman belajar, dan penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara untuk melakukannya.

a. Langkah mendiagnosa kebutuhan.

Langkah ini merupakan tahap awal dalam pengembangan kurikulum, dengan melakukan diagnosa kebutuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah *needs assessment*. Pada tahap ini pihak pengembang akan menggali informasi tentang kebutuhan dan harapan peserta didik, guru-guru dan *stakeholders* lainnya terhadap kurikulum yang sedang berjalan.

b. Merumuskan tujuan kurikulum.

Pada tahap ini adalah merumuskan dan menetapkan tujuan kurikulum. Penetapan tujuan merupakan hasil dari *needs assessment* yang dilakukan pada tahap diagnosa kebutuhan. Perumusan tujuan kurikulum dilakukan secara berjenjang, mulai dari tujuan umum, yaitu tentang kompetensi yang diharapkan dalam setiap mata pelajaran, kemudian tujuan pada masing-masing tema pokok dan subtema yang terdapat pada setiap mata pelajaran, bahkan diharapkan sampai kepada tujuan pembelajaran disetiap pertemuan di kelas.

Merumuskan tujuan kurikulum yang berbasis pada *grassroots* akan melibatkan guru-guru dan *stakeholders* agar tujuan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan aspirasi siswa, guru dan *stakeholders* lainnya, terutama tentang aspek-aspek yang terkandung dalam kompetensi siswa yang ingin dicapai.

Selanjutnya Taba juga memberikan beberapa kriteria dalam memformulasikan tujuan yang tidak hanya terkait dengan isi (*content*) namun

juga kegiatan pembelajaran (*learning activities*) yang mengarah kepada tujuan dalam pendidikan. Kriteria tersebut meliputi:

- 1) *Concept or ideas to be learned*
- 2) *Attitudes, sensitivities, and feeling to be developed*
- 3) *Ways of thinking to be reinforced, strengthened, or initiated.*
- 4) *Habits and skills to be mastered.*<sup>110</sup>

Kriteria yang dikemukakan Taba di atas, harus menjadi perhatian bagi pihak yang terlibat dalam mengembangkan kurikulum sekolah khususnya di lembaga pendidikan keagamaan. Dengan demikian diharapkan tujuan yang dihasilkan benar-benar dapat dicapai secara optimal sesuai dengan keinginan semua pihak.

#### c. Menyeleksi dan menetapkan isi (*content*) kurikulum

Setelah tujuan kurikulum tersusun sedemikian rupa, begitu juga tujuan untuk masing-masing mata pelajaran, maka selanjutnya para pengembang kurikulum berupaya untuk menentukan isi (*content*) kurikulum atau yang sering dikenal dengan bahan ajar. Dalam menentukan bahan ajar perlu diperhatikan *scope* dan *sequence*, serta aspek *continuity* isi kurikulum.

*Scope* yaitu ruang lingkup keluasan materi pelajaran yang diberikan selama kurun waktu tertentu. Sementara *sequence* adalah urutan penyajian bahan pelajaran yang diurut secara sistematis dan prosedural sesuai dengan sifat dan karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan.

Menurut Taba ada hal yang harus diperhatikan dalam menyeleksi isi kurikulum, yaitu:

---

<sup>110</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development Theory...*, h. 350

- 1) Menyeleksi topik-topik: tugas pertama dalam pengembangan unit adalah menyeleksi topik-topik.
- 2) Menyeleksi ide-ide dasar; ide dasar merupakan yang fundamental terhadap sebuah mata pelajaran atau satu disiplin ilmu, hal ini yang melahirkan pengetahuan.
- 3) Menyeleksi isi (*content*) secara khusus; Isi (*content*) adalah mendasar dalam memecahkan problem secara detil yang mengganggu pikiran para siswa, yang tidak saja terkait dengan ruang dan waktu, untuk menerima hubungan dengan fakta.<sup>111</sup> Isi/materi kurikulum yang tersusun dan terseleksi sesuai kriteria di atas, diharapkan dapat mencapai tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya.

d. Mengorganisasi isi kurikulum.

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari penetapan isi kurikulum (*content*). Setelah menetapkan jumlah mata pelajaran yang mengacu kepada tujuan kurikulum, maka selanjutnya para pengembang dan guru bersama-sama mengorganisasi bahan pelajaran yang sudah ditetapkan batas luasnya bahasan (*scope*) dan urutan penyajian materi (*sequence*). Mengorganisasi bahan/isi kurikulum, yaitu berusaha menyajikan materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti peserta didik dan menggali berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan pada materi pelajaran.

---

<sup>111</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development Theory...*, h. 352-354

e. Menyeleksi metode dan strategi pembelajaran.

Pada tahap ini pihak pengembang kurikulum bersama guru menyeleksi metode dan strategi pembelajaran secara umum sesuai dengan sifat dan karakteristik bahan ajar pada mata pelajaran tertentu. Metode dan strategi pembelajaran yang ditetapkan melalui seleksi dan juga disesuaikan taraf dan perkembangan peserta didik.

f. Mengorganisasi pengalaman belajar peserta didik

Tahap ini masih berkaitan dan kelanjutan dari tahap penetapan metode dan strategi pembelajaran. Tahap ini berusaha menyelaraskan metode, strategi dan media pembelajaran dengan setiap pembahasan materi pokok dan submateri pokok atau tema dan subtema yang terdapat pada masing-masing mata pelajaran.

g. Menetapkan sistem dan prosedur evaluasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dari desain kurikulum, namun tahap ini sangat urgen dalam keseluruhan tahapan dalam pengembangan kurikulum, karena tingkat keberhasilan sebuah kurikulum dapat diketahui dari evaluasi. Evaluasi tidak berdiri sendiri, evaluasi selalu terkait dari ketercapaian tujuan kurikulum (kompetensi yang diharapkan), penguasaan peserta didik terhadap materi/bahan ajar, efektivitas penggunaan metode, strategi dan media yang dipilih dan digunakan, dan validitas dan reliabilitas alat (*instrument*) penilaian (evaluasi). Selain hal tersebut, pada tahap ini juga menetapkan standar ketuntasan minimal (SKM) untuk masing-masing mata pelajaran.

Apabila semua tahapan di atas dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, maka kegiatan

selanjutnya adalah mengadakan seminar dari desain kurikulum yang telah dihasilkan. Pelaksanaan seminar membahas desain kurikulum baru dengan melibatkan para pakar kurikulum, guru-guru dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Kegiatan seminar ditujukan untuk menyempurnakan desain kurikulum dalam bentuk ide (gagasan) atau rencana (*plan*). Dengan kata lain, hasil dari desain kurikulum tersebut dapat dikenal dengan istilah *desain hipotetik*, yaitu dalam bentuk dokumen kurikulum tertulis.

### **3. Kurikulum Pendidikan Islam Ditinjau dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi**

Dasar falsafah kurikulum pendidikan Islam memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum mengandung suatu kebenaran dibidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Dasar filosofis mengandung sistem nilai, baik yang berkaitan dengan nilai dan makna hidup dan kehidupan, dan masalah kehidupan, norma-norma yang muncul dari individu, masyarakat, maupun suatu bangsa yang dilatarbelakangi oleh pengaruh agama (*religion*), adat istiadat (*habitual*), dan konsep individu tentang pendidikan itu sendiri. Dasar filosofis membawa rumusan kurikulum pendidikan Islam pada tiga dimensi, yaitu dimensi ontologis, dimensi epistemologis dan dimensi aksiologis.

#### **a. Ontologi**

Kajian tentang filsafat pendidikan Islam yang difokuskan kepada ontologi pendidikan Islam ini berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan Islam dan pola organisasi pendidikan Islam. Sementara itu, "ontologi

sendiri memiliki makna ilmu hakikat.”<sup>112</sup> Secara ontologis, pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk berakal dan berpikir. Seandainya manusia bukan makhluk berpikir, pasti tidak memerlukan pendidikan. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai usaha pengembangan diri manusia, dijadikan alat untuk mendidik.<sup>113</sup>

Kajian ontologi ini tidak dapat dipisahkan dengan Sang Pencipta. Allah SWT yang telah menganugerahkan beberapa potensi kepada manusia untuk menggunakan pikiran.

Kata pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada empat istilah (*term*) yaitu:

- 1) *Al-Tarbiyah*, penggunaan istilah ini berasal dari kata *Rabb* walaupun kata ini memiliki banyak arti akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan kata tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Kata ini paling banyak digunakan dibandingkan dengan istilah lainnya.
- 2) *Al-Ta’lim*, kata ini telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal dibandingkan dengan istilah *al-tarbiyah* maupun *al-ta’dib*, Rasyid Ridha, mengartikan *al-Ta’lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.
- 3) *Al-Ta’dib*, menurut al-Attas, istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah *al-Ta’dib*, kata ini berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan.<sup>114</sup>
- 4) *Al-Tazkiyah*, Abdul Basir sependapat dengan al-Ghazali, istilah ini menunjuk bahwa pendidikan tidak hanya pendidikan fisik atau jasmani, akan tetapi

---

<sup>112</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.28

<sup>113</sup> Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.18.

<sup>114</sup> Al-Rasyidin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 26-30

menyangkut tentang pendidikan dan pembersihan hati atau rohani yang terkait mental, emosional, dan bahkan spritual (*tazkiyah an-Nafs*).<sup>115</sup>

Terlepas dari keempat istilah di atas, secara terminologi, pendidikan Islam telah memformulasikan pengertian pendidikan Islam diantaranya Marimba mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah “bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama (kepribadian muslim) menurut ukuran-ukuran Islam”.<sup>116</sup>

Pendapat di atas nampak saling mengisi dan menguatkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya yang pada intinya bahwa pendidikan Islam membentuk individu yang terintegrasi pada semua aspek kepribadian jasmani dan rohani yang melahirkan insan paripurna yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa pada umumnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang melahirkan peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam jasmani dan rohani, dunia akhirat. Melalui proses pendidikan anak akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan pribadi dirinya sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam ajaran Islam yang diyakininya dan dapat diaplikasikan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dimensi ontologis di atas berupaya mengarahkan kurikulum agar peserta didik lebih banyak berhubungan langsung dengan objek-objek fisik yang

---

<sup>115</sup> Abdul Basir, *Stadium General Pembukaan Kuliah Semester Genap*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, Semester Genap 2015-2016

<sup>116</sup> Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1977), h. 24



ada di sekitar lingkungannya. Dimensi ini mengarahkan peserta didik belajar verbal (*verbal learning*), yaitu: kemampuan memperoleh data dan informasi yang harus mereka dipelajari. Dimensi ontologis ini merupakan adaptasi dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam as, seperti mengajarkan nama-nama benda, seperti termaktub dalam firman Allah al-Qur'an surat al-Baqarah/2:31, yaitu:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Implikasi dimensi ontologis dalam konteks kurikulum pendidikan ialah bahwa pengalaman belajar yang ditanamkan kepada peserta didik tidak hanya sebatas pada alam fisik, tetapi juga menyangkut alam spiritual atau *r hiyah*, yang menghantarkan manusia pada keabadian di akhirat. Disamping itu, “perlu juga ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem kesemestaan (*universe system*) atau *sunnatullah* yang melahirkan perwujudan harmoni di dalam alam semesta termasuk hukum dan tata tertib (*qadha dan qadar*) yang menentukan kehidupan manusia di masa depan.”<sup>117</sup>

Menurut 'Athiyah al-Abrasy, sesungguhnya tujuan pendidikan adalah pendidikan budi pekerti (*at Tarbiyah al-Khulq*). Sementara tujuan pendidikan budi pekerti adalah menjadikan peserta didik berakhlak mulia, kuat kemauan, terdidik dalam perkataan dan perbuatannya.<sup>118</sup> Hal ini menggambarkan bahwa manusia yang ideal adalah yang sesuai dengan fitrahnya, yaitu yang harus

---

<sup>117</sup> Hamdani Ihsan, *Filsafat Pendidikan ...*, h. 126.

<sup>118</sup> Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi, *R h at-Tarbiyah wa ...*, h.39.

dicapai melalui proses pendidikan agar manusia memiliki akhlak yang sempurna. Hal ini sejalan dengan misi kerasulan Nabi Besar Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ( ). Dengan demikian pendidikan Islam ditinjau dari dimensi ontologis dapat dikatakan bahwa hakikat pendidikan adalah objek berupa pengalaman lahiriyah dan batiniyah, kehidupan di dunia dan berorientasi pada akhlak mulia menuju kebahagiaan yang abadi yang kekal di negeri akhirat.

b. Epistemologi

Epistemologi pendidikan Islam adalah membahas tentang seluk beluk sumber dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam bersumber dari Sang Khalik Allah SWT. Hukum-hukum yang diciptakan Allah SWT dapat dipahami dengan berbagai pendekatan dan metode ilmiah berdasarkat ayat-ayat *qauliyah* atau ayat *kauniyah*. Selain itu, pendidikan Islam merujuk pada nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an yang bersifat universal dan abadi, serta didukung oleh hadist Nabi Muhammad SAW.

Ilmu pendidikan Islam mempunyai *scope* yang sangat luas, karena didalamnya terdapat banyak pihak-pihak yang terlibat baik langsung atau tidak, sedangkan yang menjadi objek ilmu pendidikan Islam ialah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman. Di antara objek atau komponen pendidikan Islam ialah:

1) Proses pendidikan itu sendiri

Yang dimaksud dengan proses pendidikan dalam konteks ini adalah seluruh aktivitas, kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh

pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didik. Istilah yang lain yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, dan memberikan pertolongan dari seseorang ustadz kepada santri untuk menuju ke tujuan pendidikan Islam.

2) Peserta didik

Peserta didik adalah pihak yang menjadi objek sekaligus subjek terpenting dalam pendidikan Islam. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa peserta didik ke arah tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Dalam pendidikan Islam peserta didik ini sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain: murid, santri, *th lib*, *muta'al m*, dan *tilm dz* yang semua istilah tersebut memiliki makna sama, yaitu peserta didik.

3) Dasar pendidikan Islam

Dasar pendidikan Islam adalah landasan yang menjadi azas atau sumber dasar dari berbagai kegiatan pendidikan Islam. Pelaksanaan pendidikan Islam harus berlandaskan/bersumber dari dasar Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah berupaya membentuk peserta didik menjadi manusia dewasa, yaitu seorang muslim yang beriman dan takwa kepada Allah SWT dan memiliki kepribadian muslim yang berakhlak mulia. Dengan kata lain pendidikan Islam membentuk peserta didik berakhlak mulia sebagai '*abdullah* dan sekaligus menjadi *khal fatullah*.

#### 4) Tenaga Pendidik

Pendidik adalah manusia dewasa yang menempati posisi sentral dan urgen dalam proses pendidikan Islam. Keberadaan tenaga pendidik sangat besar pengaruhnya terhadap baik buruknya hasil pendidikan Islam, istilah pendidik dalam konsep pendidikan Islam terdapat berbagai istilah, seperti: *mu'allim* tugasnya adalah menyampaikan atau mengajarkan pengetahuan (*transfer of knowledge*), *murabby* tugasnya sebagai pendidik atau mendidik para pelajar (*to educate*), *mudarris* bertugas berusaha mencerdaskan siswa (*to try to be smart*), *mursyid* bertugas sebagai pembimbing dan pelindung siswa dari kebiasaan buruk (*to protect from bad habit*), dan *muaddib* bertugas sebagai peradaban pada masa yang akan datang (*to build civilization for future*).<sup>119</sup>

#### 5) Materi pendidikan Islam

Materi pendidikan Islam ialah bahan-bahan pelajaran atau berupa pengalaman-pengalaman belajar (*learning experiences*) ilmu-ilmu Islam yang disusun sedemikian rupa berdasarkan *scope* dan *sequence*, dan disajikan kepada peserta didik. Dalam pendidikan Islam, materi pembelajaran ini disebut dengan istilah *m ddah at-tarbiyah* atau *m ddah at-ta' l m*.

#### 6) Metode pembelajaran pendidikan Islam

Metode pembelajaran dalam pendidikan adalah berupa cara, teknik, dan strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan dan menyajikan materi pelajaran pendidikan Islam kepada peserta didik. Metode dimaksudkan

---

<sup>119</sup> Muhaimin, *Pengembangan kurikulum PAI di sekolah, Madrasah, ...*, h.44-49

bagaimana seorang guru dalam mengolah, menyusun, menyajikan, dan menyampaikan materi pelajaran pendidikan Islam, dengan menggunakan metode supaya peserta dapat dengan mudah memahami isi materi pendidikan Islam. Biasanya untuk lebih mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran diperlukan alat bantu seperti media pembelajaran. Metode pendidikan ini disebut dengan istilah *tar qah at-tarbiyah* atau *tar qah at-tahdzib*.

7) Evaluasi pendidikan Islam

Evaluasi pendidikan Islam yaitu yang menyangkut prosedur dan teknik untuk melakukan *assesment* dan evaluasi (penilaian) terhadap hasil belajar peserta didik maupun program pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam umumnya tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan melalui proses atau tahapan-tahapan (*fase*) yang memerlukan waktu. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, seringkali dilakukan evaluasi atau penilaian pada tahap atau fase dari pendidikan Islam tersebut. Apabila tujuan pada tahap atau fase tertentu telah tercapai kemudian dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan pendidikan tahap berikutnya, dan berakhir pada pembentukan kepribadian seorang muslim ber-*akhl qul kar mah*.

8) Alat-alat pendidikan Islam

Alat pendidikan merupakan sarana yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses pendidikan Islam, alat digunakan untuk memperlancar dan memudahkan mencapai tujuan pendidikan Islam.

9) Lingkungan pendidikan

Lingkungan sekitar atau *milieu (al-b ah)* pendidikan Islam yang dimaksud, ialah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam.

Objek ilmu pendidikan Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ilmu pendidikan Islam adalah peserta didik dalam proses pertumbuhan, yang kemungkinan untuk dibina, diarahkan, dan dibimbing ke arah tujuan yang direncanakan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Sedangkan objek formal ilmu pendidikan Islam adalah proses pendidikan Islam itu sendiri yang diberikan kepada peserta didik agar mengarah kepada tujuan pendidikan Islam.

Dampak dan implikasi dimensi epistemologi dalam rumusan kurikulum adalah:

- 1) Lebih mementingkan isi kurikulum (*the what*) daripada proses bagaimana (*the how*) memperoleh ilmu pengetahuan itu;
- 2) Kurikulum lebih menekankan (*stressing*) pada proses bagaimana (*the how*) yakni bagaimana murid bisa mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar (*learning experiences*), aktivitas kurikulum, sehingga pemecahan masalah dalam pendidikan Islam berpijak pada aliran konstruktivisme; dan
- 3) Materi yang menjadi isi (*content*) kurikulum cenderung lebih fleksibel, karena pengetahuan yang dihasilkan bersifat tidak mutlak, tentatif, dan

dapat berubah-ubah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ar-Rahman: 26 dan 27 yang berbunyi:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

Dalam QS. al-Isra: 85 Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

Selain itu, kurikulum pendidikan Islam juga mengacu pada pandangan futuristik atau ke masa depan. Oleh karena itu, kurikulum harus visioner dan mampu memprediksi jauh ke masa depan, sehingga produk pendidikan tidak canggung menghadapi alam yang mungkin mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan zaman.

### c. Aksiologi

Aksiologi adalah nilai kegunaan ilmu, atau dapat pula bermakna nilai kemanfaatan ilmu pengetahuan. Jadi aksiologi pendidikan Islam berupaya menyelidiki tentang prinsip-prinsip/nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam.

Brameld (1904-1987) membagi nilai dalam aksiologi menjadi tiga<sup>120</sup>, yaitu:

---

<sup>120</sup> Theodore Burghard Hurt Brameld, *Patterns of Educational Philosophy: Divergence and Convergence in Culturological Perspective*. (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1971), h. 231

- 1) Tindakan moral yang melahirkan disiplin khusus, seperti: tepat waktu, kejujuran, amanah, istiqamah, dan profesional.
- 2) Estetika atau nilai-nilai keindahan yang melahirkan kerapian, keteraturan, kebersihan, dan keindahan.
- 3) Kehidupan sosio-politik yang melahirkan nilai hubungan *hablum minan n s, silaturrahmi*, bermu'amalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implikasi aksiologi dalam pendidikan Islam adalah menguji dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam ke dalam kehidupan manusia dan membentuk kepribadian murid ke arah prinsip nilai-nilai yang terkandung dalam sumber dasar pendidikan Islam. Sumber nilai pendidikan Islam terkandung dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Menggali sekaligus menanamkan nilai-nilai tersebut merupakan tugas utama dalam pendidikan Islam.

Aksiologi dalam pendidikan Islam berhubungan dengan nilai-nilai, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai dalam pendidikan Islam. Tujuan (*goal*) terakhir pendidikan Islam (*Islamic educational goal*) yaitu: berharap memperoleh keridhaan Allah SWT dunia dan akhirat. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan dapat melahirkan individu peserta didik berkualitas, bermoral dan berakhlak mulia, sehingga hasil pendidikan tersebut dapat bermanfaat bagi diri peserta didik, orangtua, masyarakat, bangsa dan seluruh umat manusia, terakhir adalah dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat (*f ad-duny hasanah wa f al- khirati hasanah waqin adz b an-n r*).



Dimensi aksiologi mengarahkan pembentukan kurikulum yang dirancang sedemikian rupa agar memberikan kepuasan pada diri peserta didik, sehingga hal tersebut dapat melahirkan nilai-nilai ideal, sebagaimana tujuan pendidikan Islam yang telah diuraikan di atas. Tegasnya ketiga dimensi tersebut merupakan kerangka dalam perumusan kurikulum pendidikan Islam (pendidikan diniyah), maka memiliki arti intervensi kehidupan peserta didik sedemikian rupa, agar menjadi *ins n k mil*, *ins n k ffah*, dan insan yang sadar akan hak dan kewajibannya.<sup>121</sup>

Ketiga dimensi tersebut harus berimplikasi pada pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan Islam, mulai dari hakekat pendidikan, obyek pendidikan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam itu sendiri harus bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

## **E. Desain Kurikulum Pendidikan Diniyah Pendekatan *Grassroots***

### **1. Pengertian Desain Kurikulum**

Kata “desain” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti kerangka bentuk; rancangan, dapat juga berarti motif; pola; atau corak.<sup>122</sup> Sementara itu, *design* atau desain kurikulum adalah pola (*pattern*) ada juga yang mengartikan suatu rancangan atau kerangka. Dengan demikian desain merupakan pola dasar atau kerangka dalam mengembangkan sebuah kurikulum.<sup>123</sup> Sementara itu, menurut Saylor dan Alexander dalam Soetopo dan Soemanto, *curriculum design*

---

<sup>121</sup> Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.128

<sup>122</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ...*, h. 257

<sup>123</sup> Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan ...*, h. 83

berarti pola (*pattern*), atau kerangka (*framework*) atau organisasi struktural (*structural organization*) yang dipakai dalam menyeleksi, merencanakan dan memajukan pengalaman-pengalaman pendidikan (pembelajaran) di sekolah.<sup>124</sup>

Dari pengertian di atas, desain kurikulum adalah kerangka atau pola dasar dalam menyeleksi, menyusun dan mengembangkan kurikulum baru. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam pengembangan kurikulum seorang *curriculum designer* harus menentukan dan menyeleksi terlebih dahulu pola/kerangka kurikulum yang hendak dikembangkan termasuk di dalamnya menentukan *scope* dan *sequence* kurikulum.

Sukmadinata mengemukakan tiga desain kurikulum, yaitu:

a. *Subject Centered Design*

*Subject centered design* adalah desain kurikulum yang berpusat pada materi pelajaran disebut juga subjek akademis. Pola kurikulum ini paling populer, paling tua dan paling banyak digunakan dalam pengembangan kurikulum. Desain atau kerangka kurikulum ini berpusat pada isi (*content*) materi yang diberikan kepada peserta didik. Desain kurikulum ini melahirkan kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah (*separated subjects curriculum*) yang berpusat pada konten/isi materi kurikulum. Desain kurikulum ini lebih menekankan pada pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai-nilai (*values*) masa lalu dan berupaya untuk menyajikannya kepada generasi

---

<sup>124</sup> J. Gallen Saylor dan William M. Alexander, *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*, dalam Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h.74

berikutnya. Oleh karena itu, kurikulum ini mengutamakan isi bahan pelajaran (*subject matter*), organisasi kurikulumnya disebut *subject academic*.

b. *Learner Centered Design* (LCD)

Desain kurikulum ini sangat berbeda dengan *subject centered design*. *Subject centered design* berupaya pada keinginan untuk melestarikan budaya, pengetahuan, dan keterampilan masa lalu (kurikulum konservatif) kepada generasi berikutnya. Sedangkan *learner centered design* (LCD) adalah desain kurikulum yang berfokus pada peserta didik. Hal ini dianggap sesuai dengan konsep teori pendidikan modern yang berprinsip bahwa proses pembelajaran berupaya untuk memberdayakan semua potensi dan kompetensi yang dimiliki peserta didik. Pada desain ini, pendidik lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, yakni berperan menyiapkan berbagai kebutuhan dan kemudahan peserta didik. Selain itu, guru berperan menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang menarik dan kondusif, serta mendorong dan membimbing peserta didik sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Oleh karena itu, pengorganisasian kurikulum didasarkan atas minat, kebutuhan dan tujuan pembelajaran.

Menurut Sukmadinata, ada dua ciri utama yang membedakan desain kurikulum ini dengan *subject centered design*, yaitu:

- 1) *Learner centered design* mengembangkan kurikulum lebih terfokus pada peserta didik bukan pada *content* atau isi materi kurikulum (*subject matter*).

- 2) Jenis kurikulum ini bersifat *not preplanned*, artinya kurikulum tidak dapat disusun dan direncanakan terlebih dahulu, tetapi memerlukan kerjasama pendidik dan peserta didik dalam mengembangkannya.<sup>125</sup>

*Learner centered design* disebut juga dengan *pupil centered design* yang menekankan pada aktivitas belajar peserta didik, sementara pengalaman belajarnya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Desain ini berdampak pada pembelajaran di kelas, seperti tingkat partisipasi belajar peserta didik yang lebih aktif.

c. *Problem Centered Design*

*Problem centered design* adalah desain kurikulum yang berfokus kepada masalah atau problem manusia. Desain ini berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia (*man centered*). Berbeda dengan *learner centered design* yang mengutamakan peserta didik secara individual, *problem centered design* menekankan manusia dalam kesatuan kelompok atau masyarakat. Para pendidik berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, ia selalu hidup bersama. Dalam kehidupan bersama, mereka kemungkinan besar menghadapi masalah-masalah bersama yang harus dipecahkan secara bersama pula. Mereka berinteraksi, berkooperasi dalam memecahkan prolem sosial yang mereka hadapi. *Problem centered design* menekankan pada baik pada isi (*content*) materi maupun perkembangan peserta didik.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori ...*, h. 128

<sup>126</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori ...*, h. 124-127

Selain tiga desain yang dikemukakan Sukmadinata di atas, masih ada pendapat lain yang menambahkan satu desain kurikulum, yaitu *social functions design* atau desain fungsi-fungsi sosial.

d. *Social Functions Design*

*Social function design* adalah desain kurikulum menekankan pada fungsi-fungsi atau peranan individu dalam sebuah masyarakat (*society*). Desain ini tampaknya adalah penyempurnaan terhadap *problem centered design* yang hanya menekankan pada problem (masalah), tetapi *social functions design* lebih menekankan peranan anggota masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam rangka memecahkan masalah dan menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya dalam sebuah masyarakat (*community*). Umumnya desain kurikulum ini diterapkan dengan metode sosio drama, simulasi, dan drill.

## **2. Perumusan Visi, Misi dan SKL pada Lembaga Pendidikan Keagamaan**

a. Penyusunan Visi

Secara etimologi, *vision* dan *mission* berasal dari bahasa Inggris. *Vision* berarti “*the ability to think about or plan the future with great imagination or wisdom.*”<sup>127</sup> Sedangkan *mission* berarti “*a particular task done by a person or a group, or a particular aim or duty that one wants to fulfill more than anything else.*”<sup>128</sup> Jadi maksud visi dan misi dalam konteks pendidikan adalah apa dan bagaimana cita-cita dan pandangan tentang lembaga pendidikan di masa yang akan datang.

---

<sup>127</sup> A. S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of ...*, h. 1330

<sup>128</sup> A. S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of ...*, h. 746

Setiap lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan keagamaan hendaknya sudah memiliki visi dan misi. Visi dan misi merupakan suatu keharusan agar lembaga pendidikan tersebut memiliki arah dan tujuan yang jelas apa dan bagaimana lembaga pendidikan keagamaan tersebut nantinya.

Sebuah visi yang tepat bagi lembaga pendidikan akan menjadi percepatan (*accelerator*) kegiatan lembaga yang bersangkutan, karena dari sebuah visi biasanya diikuti dengan misi dan program kerja (agenda) yang mengacu kepada visi tersebut. Dengan demikian seluruh program kerja dan aktivitas di lembaga pendidikan akan terencana dan terfokus pada tujuan pendidikan sesuai dengan misi dan visi yang telah ditetapkan.

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran, bayangan atau mimpi tentang keadaan dan situasi dan kondisi yang hendak diraih, diidam-idamkan atau yang dicita-citakan oleh lembaga pada di masa depan. Secara umum sebuah visi dibuat secara singkat, padat, dan abstrak, serta ke masa depan. Sedangkan pencapaiannya memerlukan waktu yang cukup lama berkisar antara 10 sampai 15 tahun. Namun kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut, pernyataan visi tersebut sebaiknya berlaku pada setiap kemungkinan perubahan yang bakal terjadi, sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel. Mastuki menyatakan,

Lembaga pendidikan Islam yang memiliki visi dan misi yang baik akan dapat menentukanantisipasi dari berbagai perubahan dan tantangan pendidikan. Lembaga pendidikan akan mampu membuat perencanaan yang tepat berkaitan dengan kurikulum, sistem, tenaga kependidikan, sarana, manajemen, pengembangan program dan lain-lain, yang menyangkut komponen-komponen sistem pendidikan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Mastuki, dkk., *Sinergi Madrasah dan Pondok* ,,,, h, 3

## 1) Syarat perumusan visi

Sebuah visi yang baik harus memenuhi kriteria dalam merumuskannya, kriteria tersebut sebagai berikut:

- a) Merefleksikan cita-cita yang hendak dicapai.
- b) Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik.
- c) Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan.
- d) Memiliki wawasan dan orientasi jauh ke depan.
- e) Gambaran yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik.
- f) Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.<sup>130</sup>

Sebuah visi yang baik harus memenuhi persyaratan di atas. Selain itu, Bryson menambahkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi, antara lain:

- a) Visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi.
- b) Visi harus disebarakan di kalangan anggota organisasi dan *stakeholders*.
- c) Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting.<sup>131</sup>

Perumuskan visi lembaga pendidikan harus mengikuti beberapa prosedur dan kriteria visi. Visi dalam sebuah institusi sangat penting keberadaannya, ia menjadi titik fokus (mimpi) yang senantiasa hendak dicapai, karena itu semua program kegiatan selalu mengarah kepada visi tidak keluar dari rel yang sudah direncanakan, sehingga visi yang dirumuskan dapat menyerap aspirasi anggota organisasi dan *stakeholders* lainnya.

---

<sup>130</sup> Mastuki, dkk., *Sinergi Madrasah dan Pondok ...*, h. 4

<sup>131</sup> John M. Bryson, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 213

2) Prosedur perumusan visi adalah sebagai berikut:

- a) Mempelajari visi satuan organisasi di atasnya untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun misi dan program kerja;
- b) Mengidentifikasi rumusan tugas satuan organisasi yang tercantum dalam struktur dan tata kerja satuan organisasi yang bersangkutan;
- c) Rumusan tugas satuan organisasi tersebut dirangkum dan dirumuskan kembali menjadi konsep rumusan visi satuan organisasi;
- d) Konsep rumusan visi satuan organisasi didiskusikan dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi dan saran-saran;
- e) Rumusan visi satuan organisasi dikomunikasikan dengan seluruh *stakeholders* guna memperoleh penyempurnaan;
- f) Rumusan visi satuan organisasi yang telah menjadi kesepakatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan satuan organisasi, sehingga visi tersebut menjadi milik bersama, mendapat dukungan dan komitmen seluruh anggota organisasi.<sup>132</sup>

Aspek-aspek prosedur perumusan visi harus menjadi perhatian semua warga sekolah, baik yang terlibat langsung seperti: pimpinan sekolah, guru, dan karyawan, maupun yang tidak langsung terlibat, seperti: orangtua siswa, peserta didik, masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Selain itu, untuk menghasilkan sebuah visi yang baik diperlukan adanya ketentuan atau kriteria dalam menyusun visi lembaga organisasi.

3) Kriteria Visi

Dalam merumuskan visi yang baik seharusnya memenuhi beberapa kriteria berikut ini:

- a) Rumusan visi harus singkat, padat, idealis, filosofis, dan mudah diingat;
- b) Bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya;
- c) Sesuatu yang ideal yang ingin dicapai dimasa yang akan datang yang membawa eksistensi/keberadaan suatu organisasi;
- d) Menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*);
- e) Memberikan arah dan fokus strategi dan program yang jelas;

---

<sup>132</sup> Mastuki, dkk., *Sinergi Madrasah dan...*, h. 4



- f) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam suatu organisasi;
- g) Memiliki orientasi terhadap masa depan, sehingga segenap jajaran organisasi ikut berperan dalam pencapaiannya;
- h) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota organisasi;
- i) Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan organisasi serta menjembatani keadaan masa sekarang dan masa yang akan datang;
- j) Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan perubahan tugas dan fungsi.<sup>133</sup>

Merumuskan visi lembaga pendidikan sebaiknya melibatkan seluruh anggota organisasi (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan), termasuk juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, penyusunan misi harus dengan musyawarah untuk mufakat (asas demokratis). Dengan menyerap aspirasi dari bawah (*bottom-up*), diharapkan setiap anggota organisasi dapat memberikan kontribusi berupa ide, gagasan, dan pemikiran, sehingga akan menumbuhkan sikap rasa memiliki (*sense of belongingness*) terhadap keberadaan visi lembaga pendidikan keagamaan.

#### b. Pengertian Misi

Apabila sebuah visi pada sebuah lembaga pendidikan sudah disetujui dan sepekat, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan misi. Misi berupa pernyataan sedikit lebih terperinci daripada visi, yang bertujuan untuk mewujudkan tercapainya visi.

Misi diartikan sebagai suatu pernyataan tentang apa yang patut diprogramkan dan direncanakan lembaga organisasi dalam rangka mewujudkan tercapainya visi. Sementara itu, pendapat lain mengemukakan bahwa “*The mission is a statement about the things that must be achieved for the*

---

<sup>133</sup> Mastuki, dkk., *Sinergi Madrasah dan...*, h. 5

*organization of parties interested in the future.*<sup>134</sup> Secara teknis operasional anggota organisasi harus berpedoman pada pernyataan misi yang disepakati yang merupakan hasil penjabaran, terjemahan, dan interpretasi dari visi. Misi merupakan sesuatu yang riil atau nyata untuk dijalankan. Di samping itu, misi dapat memberikan arahan dan pedoman garis besar mengenai teknik dalam mencapai sebuah visi organisasi.

Pernyataan misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadangkala memberikan petunjuk dan arah tentang bagaimana cara lembaga organisasi bekerja. Mengingat pentingnya pernyataan misi, maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota organisasi dan sumber-sumber lain yang dianggap penting. Namun secara langsung pernyataan misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam menyusun program organisasi.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara visi dan misi adalah bahwa visi merupakan tujuan suatu organisasi di masa depan yang menjangkau waktu yang lama (10–15 tahun) ke masa depan dan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut dan bersifat kondisional. Maksudnya jika visi belum juga tercapai maka misinya pun dapat diubah. Visi bersifat statis (tetap). Jika visinya berubah, maka misi dan tujuan organisasi pun menjadi tidak jelas, selanjutnya berdampak pada program kerja yang berada di bawahnya.

---

<sup>134</sup> Akdon, *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta. 2006), h. 97

c. Perumuskan Tujuan Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan)

Tujuan pendidikan adalah lebih spesifik dibandingkan dengan visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran lebih khusus dari pernyataan misi. Tujuan dalam konteks ini dikenal dengan *objectives*, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan (*objectives*) pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. “*Objectives should not be expressed in quantitative terms, but should be able to indicate the conditions to be achieved in the future.*”<sup>135</sup> Tujuan (*objectives*) ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program kerja dan kegiatan tertentu dalam rangka mewujudkan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator-indikator keberhasilan yang terukur.

Pencapaian tujuan (*objectives*) dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah organisasi termasuk organisasi lembaga pendidikan. Beberapa kriteria tujuan menurut Subandijah, yaitu:

- 1) Tujuan sebaiknya harmonis dan serasi dan dapat menjelaskan maksud misi, visi.
- 2) Pencapaian tujuan hendaknya dapat berkontribusi memenuhi pernyataan misi, dan program kerja unit organisasi.
- 3) Tujuan hendaknya fokus pada hal-hal inti tidak berubah.
- 4) Tujuan umumnya secara relatif berjangka waktu dalam pencapaiannya.
- 5) Tujuan harus menggambarkan hasil program kerja yang spesifik
- 6) Tujuan hendaknya menggambarkan situasi yang jelas dari organisasi.
- 7) Tujuan hendaknya bersifat *challenge*, namun lebih realistis untuk dapat diwujudkan.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Akdon, *Strategic Management for Educational...*, h. 103

<sup>136</sup> Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi...*, h. 5

Berdasarkan kriteria di atas, tujuan pendidikan harus ideal yang menggambarkan arah yang jelas bagi sekolah, namun yang paling penting rumusan tujuan harus realistis, dapat dicapai dalam waktu tertentu dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi, baik berupa adanya regulasi maupun kebijakan yang berdampak pada organisasi sekolah/madrasah yang terjadi di masa yang akan datang selama program sekolah/madrasah sedang berlangsung. Oleh karena itu, perumusan tujuan sekolah/madrasah harus memberikan indikator yang spesifik, terukur dan akuntabel, sehingga dapat dievaluasi dan hasil evaluasi dapat dindaklanjuti untuk menyusun program selanjutnya.

Lembaga pendidikan keagamaan sebagai lembaga pendidikan tidak berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya yang memiliki tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mempunyai beberapa jenis dan tingkatan, mulai dari yang paling tinggi sampai kepada tujuan yang paling rendah. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

- 1) Tujuan kurikulum/pendidikan tingkat nasional;
- 2) Tujuan kurikulum/pendidikan tingkat lokal dan regional;
- 3) Tujuan kurikulum tingkat institusional/satuan pendidikan (sekolah);
- 4) Tujuan kurikulum tingkat mata pelajaran/tujuan tiap mata pelajaran; dan
- 5) Tujuan tingkat materi pelajaran/instruksional (tujuan pembelajaran).<sup>137</sup>

Tujuan pendidikan tingkat nasional bersumber dari undang-undang pendidikan nasional, sedangkan tujuan lembaga (institusional) berada di bawah naungan visi dan misi sekolah/madrasah. Soetopo dan Soemanto menambahkan

---

<sup>137</sup> Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan ...*, h. 75-81

bahwa untuk merumuskan tujuan institusional ada beberapa sumber yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- 1) Rumusan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam undang-undang pendidikan nasional
- 2) Tuntutan dan harapan orangtua dan masyarakat
- 3) Harapan lembaga sekolah yang ada di atasnya.<sup>138</sup>

Selain pertimbangan tiga sumber tujuan di atas, tujuan institusional (SKL) juga harus dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan tiga ranah pendidikan (*cognitive, affective, and psychomotoric domains*) yang terkandung dalam tujuan tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam di madrasah tujuan pendidikan (standar kompetensi lulusan) harus memuat aspek *tarbiyah, ta'lim, ta'dib*, dan *tazkiyah*.

Tujuan tingkat mata pelajaran (tujuan kurikuler) merupakan tujuan setiap mata pelajaran. Tujuan ini memiliki karakteristik sesuai dengan isi dan sifat materi yang terkandung dalamnya. Selain itu, tujuan ini harus mengacu kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan institusional dan tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran merupakan turunan atau penjabaran dari tujuan kurikuler. Tujuan ini bersifat spesifik pada setiap pokok/subpokok bahasan atau setiap tema/subtema pembahasan. Tujuan pada setiap pokok/subpokok bahasan ini masih dapat dikatakan bersifat umum, kemudian dibuat lagi lebih terperinci sesuai dengan ranah pembelajaran yang terkandung dalam tujuan ini. Merumuskan tujuan yang lebih khusus dalam

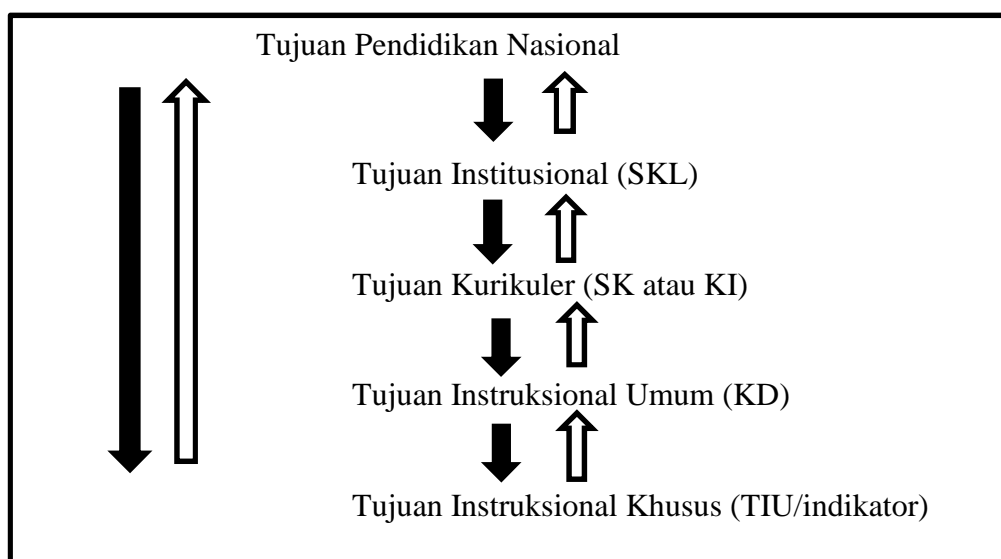
---

<sup>138</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan ...*, h.12

bentuk indikator yang menggunakan kata kerja operasional atau kata-kata yang dapat diukur dan dapat dievaluasi.

Tujuan pendidikan dan pembelajaran harus dicapai secara hirarkis atau berjenjang. Tujuan yang dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran adalah tujuan instruksional khusus (indikator). Bila tujuan ini tercapai diharapkan terpacai juga tujuan instruksional umum (kompetensi dasar) terus tujuan kurikuler dan sampai kepada tujuan institusional (standar kompetensi lulusan) serta pada giliriannya akan tercapai tujuan pendidikan nasional.

Herarkhisme pencapaian tujuan pembelajaran ini digambarkan oleh S. Nasution dalam skema berikut ini:<sup>139</sup>



Gambar 2.2: Herarkhisme pencapaian tujuan Pendidikan

Jika tujuan institusional sudah diakomodasi pada sebaran tujuan di masing-masing mata pelajaran (tujuan kurikuler) dan sudah dijabarkan secara terperinci pada tujuan pembelajaran dalam bentuk indikator keberhasilan (IK),

<sup>139</sup> S Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bima Aksara, 2005), h. 45

maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasi materi pelajaran sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing.

### **3. Pengorganisasian Isi Kurikulum Lembaga Pendidikan Keagamaan**

Isi (*content*) kurikulum merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah kurikulum. Oleh karena itu, komponen ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari para perancang kurikulum (*curriculum designer*). Mengorganisasi bahan atau materi kurikulum harus memenuhi beberapa ketentuan dan kriteria, karena isi kurikulum memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing.

Isi atau materi kurikulum didefinisikan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar (*learning experiences*) yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.<sup>140</sup> Pengetahuan tersebut umumnya diorganisir dalam sebuah bidang studi. Sedangkan pengalaman belajar (*learning experiences*) disajikan dalam bentuk program sekolah/madrasah baik yang regular (terjadwal) ataupun insidental. Pengetahuan maupun pengalaman belajar tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenis pendidikan, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pengetahuan harus berorientasi pada potensi dan wawasan pemikiran global.

Komponen isi (*content*) kurikulum harus diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi tersebut biasanya berupa bidang studi atau mata pelajaran, seperti mata pelajaran Tauhid, Fiqih, Tafsir, Ilmu Hadits, dan lain-lain. Sejumlah mata pelajaran tersebut umumnya telah

---

<sup>140</sup> Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan ...*, h. 30

dicantumkan dalam struktur program kurikulum sekolah/madrasah masing-masing.

Isi kurikulum harus memuat tiga dasar pengetahuan manusia, yaitu:

- a. Pengetahuan logika, yang berhubungan dengan benar dan salah, atau berkaitan dengan sesuatu yang *al-haq wa al-b thil*.
- b. Pengetahuan etika, yang berhubungan dengan baik dan buruk, atau dapat dikatakan berkaitan dengan konsep *hasanah wa as-sayyiah*.
- c. Pengetahuan estetika, yang berhubungan dengan indah dan jelek, dan ini berkenaan dengan *jam l wa al-qab h*.<sup>141</sup>

Dasar pengetahuan manusia tersebut diorganisir dalam bentuk bidang studi atau mata pelajaran dengan memperhatikan *scope* dan *sequence*-nya. *Scope* berarti ruang lingkup atau keluasan dan batasan isi bidang studi tersebut sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikan, sementara *sequence* adalah urutan penyajian bahan pelajaran. Sukmadinata dalam bukunya *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*, mengemukakan beberapa sekuens, antara lain:

- a. Sekuens Kronologis. Untuk menyusun bahan pelajaran yang mengandung urutan waktu, peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam pendidikan agama Islam, sekuens ini digunakan untuk menyusun bahan pelajaran Tarikh Islam.
- b. Sekuens kausal atau sebab akibat, bahan pelajaran yang memiliki atau berhubungan dengan situasi yang menjadi sebab atau yang mendahului dari sesuatu peristiwa yang lain (akibat). Dengan mempelajari suatu sebab maka akan lebih memahami akibat yang ditimbulkannya atau sebaliknya. Di dunia

---

<sup>141</sup> Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan...*, h. 31



ini berlaku hukum sebab akibat. Sekuens ini tepat untuk pelajaran Aqidah dan Fiqih.

- c. Sekuens logis, yaitu bahan pelajaran berdasarkan urutan logis, yakni bahan pelajaran dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus (bagian-bagian) kepada sesuatu yang bersifat umum (keseluruhan). Sekuens ini dapat digunakan pada materi Bahasa Arab dan mata pelajaran Fiqih.
- d. Sekuens psikologis, yaitu kebalikan dari sekensi logis, yaitu penyajian bahan pelajaran dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Sekuens ini juga dapat digunakan pada materi bahasa Arab, pelajaran Fiqih dan pelajaran sejenis.
- e. Sekuens spiral, bahan pelajaran dipusatkan pada satu topik atau tema. Dari tema atau pokok tersebut bahan diperluas dan diperdalam, materi pelajaran dari yang tema yang sederhana kepada bahan pelajaran yang lebih kompleks dan *sophisticated*.<sup>142</sup>

Isi (*content*) kurikulum pendidikan diniyah patut mengikuti *sequence* mata pelajaran di atas, tentu saja disesuaikan dengan sifat dan karakteristik mata pelajaran tersebut. Di samping hal tersebut, pengembangan isi kurikulum harus memenuhi beberapa kriteria seperti berikut ini:

- a. Isi kurikulum harus valid (*shahih*) dan signifikan (terpercaya).
- b. Isi kurikulum harus berpegang pada kenyataan-kenyataan sosial dan IPTEK
- c. Harus seimbang antara kedalaman, keluasan dan jenjang pendidikan
- d. Harus menjangkau tujuan yang komprehensif.
- e. Harus sesuai dengan pengalaman anak.
- f. Harus memenuhi kebutuhan dan minat anak.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori ...*, h. 115

<sup>143</sup> Sudirman, N. dkk., *Ilmu Pendidikan*, h. 67

Selain memenuhi beberapa kriteria di atas, dalam pengorganisasian isi kurikulum atau materi mata pelajaran harus disesuaikan dengan jenis materi, apakah berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis materi pembelajaran aspek kognitif yang menjadi isi kurikulum

No	Jenis Materi	Pengertian dan Contoh
1	Fakta	Menyebutkan kapan, berapa, nama, dan di mana: Ka'bah terletak di Mekkah, hari Idul Adhha dilaksanakan pada 10 Zulhijjah.
2	Konsep	Definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus. Hukum ialah peraturan yang harus dipatuhi; haram merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama.
3	Prinsip	Penerapan dalil, hukum, atau rumus. (jika ..... maka.....) Jika kita berbuat kebaikan maka kita akan mendapat pahala dari Allah dan melalui ridha-Nya kita akan dimasukkan ke sorga.
4	Prosedur	Bagian arus atau bagian alur ( <i>flowchart</i> ), algoritma, langkah2 mengerjakan sesuatu secara urut. Langkah-langkah melakukan wudlu ialah: 1. Niat 2. Membasuh muka 3. Membasuh kedua tangan sampai siku 4. Mengusap kepala 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki 6. Tertib.

Banyak hal atau aspek yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menyusun isi atau materi kurikulum. Hal ini tidak lain agar isi kurikulum memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan (*the needs*) semua pihak.

Mengorganisasi isi kurikulum memerlukan perhatian yang serius diantara para perancang kurikulum (*curriculum designer*) agar terjadi

keharmonisan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu, isi (*content*) kurikulum harus memenuhi beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum, diantaranya: prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, fleksibel, efisiensi dan efektivitas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip kesinambungan (*continuity*), baik kesinambungan terhadap berbagai jenjang kelas/sekolah maupun kesinambungan antara berbagai mata pelajaran.

Pada kurikulum pendidikan diniyah harus ada keterkaitan dan kesinambungan antara mata pelajaran Fiqih, Tauhid, dan mata pelajaran al-Quran, contoh pada pelajaran Fiqih ada bahasan shalat wajib. Sebelum sampai pada bahasan ini, siswa sudah memahami Tuhan yang wajib disembah dalam shalat (pelajaran Tauhid, iman kepada Allah SWT), siswa juga harus sudah hafal surah al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya (pelajaran al-Qur'an). Dengan demikian, pengorganisasi materi diniyah sepatutnya menjaga keharmonisan masing-masing materi agar saling menunjang dan melengkapi. Dengan demikian, perlu ada koordinasi diantara para pengembangan materi/isi kurikulum.

#### **4. Proses Belajar Mengajar (PBM)**

Jika tujuan dan materi pembelajaran telah disusun dan dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi pembelajaran yang sering dikenal dengan proses belajar mengajar (PBM).

Proses belajar mengajar (PBM) merupakan implementasi dari tujuan dan isi kurikulum yang masih berupa niat atau ide (rencana). Mewujudkan ide dan gagasan tersebut perlu adanya strategi untuk mentransformasi isi kurikulum dan mengupayakan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dimiyati dan Mudjiono, yang dimaksud proses pembelajaran adalah “suatu kegiatan intraksi antara guru dan murid dimana akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar.”<sup>144</sup> Selanjutnya, Hamalik mengemukakan, “Suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar, pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula.”<sup>145</sup>

Pembelajaran adalah proses membelajarkan peserta didik yang terencana dan sistematis mulai dari kegiatan pendahuluan, penyampaian materi sampai kepada evaluasi dan kesimpulan bahan ajar. Kegiatan ini yang menekankan proses belajar peserta didik, yang didalamnya juga terdapat usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi terus menerus proses belajar dalam diri peserta didik. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat ditarik simpulan bahwa proses pembelajaran adalah sebagai suatu proses intraksi antara guru dan siswa dimana akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang berlangsung dalam suatu lokasi dan jangka waktu tertentu.

---

<sup>144</sup> Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), h. 3

<sup>145</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan ...*, h. 162.

Ada tiga tahapan dalam melaksanakan proses pembelajaran (PBM), yaitu:

- a.** Tahap perencanaan PBM, meliputi beberapa sub kegiatan, antara lain:
  - 1) Mempelajari penyebaran bahasan dalam struktur kurikulum
  - 2) Mempelajari sekaligus menganalisis silabus
  - 3) Membuat rancangan pembelajaran semacam RPP
  - 4) Mengorganisasi materi pelajaran berdasarkan silabus
  - 5) Menetapkan metode dan media pembelajaran sesuai dengan materi, tujuan, peserta didik dan lingkungan belajar.
  - 6) Menetapkan standar evaluasi dan menyusun alat evaluasi
  - 7) Menetapkan tindak lanjut (*follow up*) dan program *remedial teaching*.
- b.** Pelaksanaan PBM ini yang sering dikenal dengan kegiatan belajar mengajar (KBM), yang mempunyai 3 (tiga) tahap:
  - 1) Tahap awal atau membuka pelajaran
  - 2) Tahap inti, menyampaikan pesan pembelajaran
  - 3) Tahap akhir atau penutup
- c.** Penilaian (evaluasi) PBM

Pada kegiatan penilaian PBM ini dilakukan evaluasi pada dua segi, yaitu:

- 1) Evaluasi PBM dari segi produk (hasil).

Mengukur dan menilai keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam satuan rancangan pembelajaran (RPP).

2) Evaluasi PBM dari segi program (proses)<sup>146</sup>

Evaluasi ini adalah mengukur dan menilai efisiensi dan efektivitas metode, media dan prosedur pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Evaluasi aspek ini yang sering terabaikan dalam kegiatan pembelajaran.

Ketiga tahapan di atas, harus dilaksanakan guru, karena ketiga tahapan tersebut merupakan tugas utama (kewajiban) bagi seorang tenaga pendidik sesuai dengan perannya sebagai tenaga profesional yang ditetapkan sebagai peran guru dalam buku pedoman pelaksanaan KTSP tahun 2006.

Tugas guru dalam pembelajaran, sebagai berikut:

**a.** Guru sebagai perencana pembelajaran, tugasnya meliputi:

- 1) Membuat program tahunan (prota);
- 2) Membuat program semester (promes)
- 3) Membuat silabus;
- 4) Menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM)
- 5) Membuat RPP.

**b.** Guru sebagai pelaksana pembelajaran, tugas meliputi:

- 1) Melaksanakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan pembelajaran kontekstual (CTL), *Life Skills*, tematik, PAIKEM, dan kolaboratif;
- 2) Melaksanakan metode pembelajaran yang bervariasi; dan
- 3) Menggunakan media pembelajaran yang menarik minat.

**c.** Guru sebagai Evaluator, tugasnya meliputi: mengukur, menilai, merekam dan melaporkan hasil pembelajaran.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan ...*, h. 29 - 30

<sup>147</sup> Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan ...*, h.129.

Dimiyati dan Mudjiono mengatakan tugas seorang guru adalah mengajar. Kegiatan mengajar ini hendaknya dapat dilakukan dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, harus menggunakan teori-teori dan prinsip-prinsip belajar, yaitu:

- a. Perhatian dan motivasi,
- b. Keaktifan peserta didik,
- c. Keterlibatan langsung atau berorientasi pada pengalaman langsung,
- d. Pengulangan, untuk melatih daya-daya jiwa dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang positif,
- e. Tantangan belajar peserta didik.<sup>148</sup>

Pada komponen proses belajar mengajar (PBM) ini banyak aspek yang terkait di dalamnya, seperti pendekatan dan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan pengelolaan (*management*) kelas, semuanya itu harus diupayakan tenaga pendidik agar kondisi pembelajaran berjalan kondusif. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan pembelajaran dapat bermakna dalam diri setiap peserta didik.

## **5. Evaluasi Pendidikan Islam, Remedial dan Standar Ketuntasan Minimal**

Evaluasi merupakan salah satu komponen baik dalam kurikulum pendidikan maupun dalam pembelajaran di kelas. Cross yang dikutip Sukardi, mengemukakan “*evaluation is a process which determines the extent to which objectives have been achieved*”.<sup>149</sup> Salah satu tujuan evaluasi adalah sebagai umpan balik (*feed back*) dalam rangka perbaikan program pendidikan dan program pembelajaran. Sebagai salah satu komponen, evaluasi tidak dapat

---

<sup>148</sup> Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pemb. ...*, h. 53

<sup>149</sup> M. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.1

dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Evaluasi hendaknya sudah menjadi perhatian terutama bagi pendidik dan bagi penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, hasil evaluasi tersebut dapat diketahui ketercapaian target kurikulum dan tingkat efisiensi penyelenggaraan pendidikan diniyah secara umum, kemudian hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk kegiatan tindak lanjut.

a. Pengertian Evaluasi Pendidikan

Secara bahasa evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” yang sering diartikan dengan penilaian. Menurut *Longman Dictionary of Contemporary English*, kata *evaluation* berasal dari akar kata “*to evaluate means to calculate or judge the value or degree of something.*”<sup>150</sup> (bermakna menghitung atau menetapkan nilai atau tingkatan terhadap sesuatu). Sedangkan dalam bahasa Arab, kata yang paling dekat dengan kata evaluasi ialah kata *muh sabah*, berasal dari kata “ ” yang berarti menghitung atau memperkirakan. Al-Ghazali menggunakan kata tersebut dalam menjelaskan tentang evaluasi diri ( ) setelah melakukan aktivitas.<sup>151</sup> Sementara itu, dalam konsep pendidikan Islam, kata evaluasi tidak ditemukan padanan katanya yang pasti tetapi terdapat terma atau istilah-istilah tertentu yang mengarah kepada makna evaluasi, yaitu:

---

<sup>150</sup> Randolph Quirk cs, *Longman Dictionary of Contemporary English* (New Edition), (London: Richard Clay Ltd. Bungay Suffolk, 1987), h, 237

<sup>151</sup> Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 105



1) *Al-his b*, mempunyai makna menghitung, menafsirkan atau mengira, dalam firman:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٤٤﴾

Umar bin Khattab pernah berkata yang serupa dengan kata *his b*, seperti berikut ini:

وَيُرَوَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا وَتَزِينُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخْفَى الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَيُرَوَّى عَنْ مِيمُونَ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ. (رواه الترمذی)<sup>152</sup>

Menurut kamus *Mu'jam al Maqayis fi al Lughah*, kata *al-his b* berasal dari kata *hasiba* yang pada dasarnya mempunyai empat makna sebagai berikut:

- والحاء والسين و الباء اصول اربعة
- فالاول: العد. والاصل الثاني : الكفاية
- والاصل الثالث: الحسبان, وهي جميع حسبانه. وهي الوسادة الصغيرة
- والاصل الرابع: الاحساب الذي ابيضت جلده من داء ففسدت شعرته.<sup>153</sup>

2) *Al-bal*, memiliki makna cobaan, ujian, terdapat dalam firman Allah Surat al-Mulk: 2, yaitu:

<sup>152</sup> Maktabah Syamilah, *Kitab Sunan at-Turmudzi*, Juz 8, h. 499.

<sup>153</sup> Abu al Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam al Maqayis fi al Lughah*, (Beirut: Daarul Fikr, 1994), h. 236

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ



- 3) *Al-Imtih n*, berarti ujian yang juga berasal dari kata *imtih n*. Terma ini digunakan oleh Muhammad Athiyah al Abrasyi dalam kata penilaian atau evaluasi yang disebutnya dengan istilah *al-Imtih n t al-Madras yah*.<sup>154</sup> Bahkan dalam al-Qur'an terdapat surat yang menyatakan wanita-wanita yang diuji dengan menggunakan kata *imtih n*, yaitu surat al-Mumtahanah. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan kata *imtih n* ini terdapat pada surah al-Mumtahanah: 10, berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ  
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا  
هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ...

- 4) *Al-ikhtib r*, memiliki makna ujian atau cobaan/*al-bal* . Orang Arab sering menggunakan *bal* dengan sebutan *ikhtib r*. Bahkan lembaga pendidikan bahasa Arab menggunakan istilah evaluasi dengan istilah *ikhtib r*.
- 5) *Al-hukm*, memiliki makna putusan atau vonis. Firman Allah SWT menyatakan sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

- 6) *Al-qadh* , memiliki arti putusan, misalnya dalam firman Allah SWT QS. Thaha: 72.

<sup>154</sup> Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi, *R h at-Tarbiyah wa ...*, h. 362

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا  
 أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٦﴾

7) *Al-nazhr*, memiliki arti melihat atau menilai, seperti dalam firman Allah SWT QS. an-Naml: 27 berikut ini:

﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. menyatakan berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ ، حَدَّثَنَا  
 يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . (رواه ابن  
 ماجه) <sup>155</sup>

Beberapa terma tersebut boleh jadi menunjukkan arti evaluasi secara langsung, atau hanya sekedar alat atau proses dalam evaluasi. Hal ini didasarkan asumsi bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah tidak secara tegas menetapkan arti untuk kata evaluasi, sedangkan operasionalnya diserahkan kepada ijtihad umatnya.<sup>156</sup>

Istilah-istilah tersebut dapat dijadikan petunjuk arti evaluasi secara langsung atau hanya sekedar alat/proses dalam evaluasi. Terma penilaian pada taraf berikutnya lebih diorientasikan pada makna penafsiran atau memberi putusan terhadap kependidikan. Setiap tindakan pendidikan didasarkan atas

<sup>155</sup> Maktabah Syamilah, *Sunan Ibnu M jah, Muhaqqiq wa masyk l*, dalam bab, *az Zuhd*, Juz 5, 245

<sup>156</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 198-200.

rencana, tujuan, bahan, alat dan lingkungan kependidikan tertentu. Penilaian dalam pendidikan dimaksudkan untuk menetapkan keputusan-keputusan pendidikan, baik yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, proses dan tindak lanjut pendidikan, baik yang menyangkut perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Dalam konteks ini, penilaian dalam pendidikan Islam bertujuan agar keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islami sehingga tujuan pendidikan Islam yang dicanangkan dapat tercapai secara maksimal.

Berbeda dari pendapat sebelumnya, Zainal Arifin mengemukakan bahwa istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah *assessment*, bukan dari istilah *evaluation*.<sup>157</sup> Dalam proses pembelajaran, penilaian sering dilakukan guru untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai peserta didik. Hal senada dengan Zainal Arifin, Anthony J. Nitko menjelaskan yang maksudnya *assessment* didefinisikan dalam sebuah terma yang luas sebagai sebuah proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang siswa, kurikulum, program dan kebijakan pendidikan.

Pendapat Anthony J. Nitko di atas, menggambarkan bahwa penilaian dalam definisi yang luas adalah satu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan siswa, kurikulum program kegiatan dan kebijakan pendidikan. Di sini Anthony nampaknya sependapat dengan Zainal Arifin bahwa penilaian berasal dari kata *assessment*

---

<sup>157</sup> Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jakarta: Dirjend Pendidikan Islam Depag RI, 2009), h.5

bukan *evaluation*. Pendapat tersebut diperkuat lagi dengan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa yang namanya evaluasi merupakan gabungan dari langkah mengukur dan menilai atau dengan kata lain bahwa evaluasi adalah hasil dari kegiatan pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*assessment*).<sup>158</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menguasai bahan-bahan yang telah disampaikan melalui proses pembelajaran dengan menetapkan skor atau nilai. Agar evaluasi dapat dipertanggungjawabkan alat ukur (*instrument test*) harus benar-benar valid dan reliabel.

Evaluasi pendidikan, bila dilihat dari tujuannya dapat dibedakan kepada empat jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif, sumatif, penempatan (*placement test*) dan evaluasi diagnostik. Namun bila dilihat dari pelaksanaannya dapat dibedakan pada tiga macam, yaitu: tes tulisan, lisan dan tes kinerja (*performance test*).

Evaluasi pendidikan Islam harus integral antara ranah kognitif, afektif dan psikomotor dengan melaksanakan 3 (tiga) macam tes, yaitu: tes lisan (hapalan), tes tertulis dan tes kinerja atau untuk kerja baik berupa akhlak maupun pengamalan ibadah.

#### b. Objek/Sasaran Evaluasi Pendidikan Islam

Sebelum kita membahas tentang objek atau sasaran evaluasi pendidikan Islam, akan lebih terarah bila membahas sasaran/objek evaluasi secara umum.

---

<sup>158</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 14

“Objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut.”<sup>159</sup>

Objek evaluasi harus berhubungan dengan kegiatan nyata dan telah terjadi, karena tidak mungkin orang melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang masih dalam pikiran atau dalam angan-angan, kecuali orang tersebut melakukan penelitian (*research*). Objek evaluasi harus bertitik tolak dari tujuan evaluasi itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dievaluasi relevan dengan apa yang diharapkan.

Menurut Arikunto, sasaran penilaian (evaluasi) untuk unsur-unsurnya meliputi: input, transformasi, dan output.

#### 1) Input

Mengevaluasi calon peserta didik yang akan masuk ke suatu lembaga pendidikan keagamaan. Calon peserta didik harus diseleksi sebelum ia menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Tes input meliputi:

- a) Kemampuan, tes kemampuan (*aptitude test*) yang bersifat akademik.
- b) Kepribadian, adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku, dengan menggunakan tes kepribadian (*personality test*).
- c) Sikap-sikap. Sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan atau dalam berinteraksi sosial, makanya banyak orang yang menginginkan informasi khusus tentangnya. Tes sikap adalah *attitude test*.

---

<sup>159</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi ...*, h. 20

d) Intelegensi, tes ini untuk mengetahui IQ (*Intelligence Quotient*), sehingga diketahui IQ yang rendah, sedang (rata-rata), di atas rata-rata, dan *brilliant*.

## 2) Transformasi

Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain:

- a) Kurikulum/materi pelajaran
- b) Metode dan cara penilaian
- c) Sarana pendidikan/media
- d) Sistem administrasi
- e) Guru dan personal lainnya

## 3) Output

Penilaian terhadap lulusan suatu lembaga tertentu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian/prestasi belajar mereka selama mengikuti suatu program pendidikan. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau *achievement test*.<sup>160</sup>

Objek evaluasi di atas merupakan objek evaluasi pendidikan yang merupakan sarannya lebih luas daripada objek evaluasi pembelajaran yang lebih fokus pada aspek yang lebih kecil.

Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar (PBM). Evaluasi tersebut adalah bagian dari evaluasi pendidikan yang harus dilaksanakan oleh guru, yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.

---

<sup>160</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi ...*, h. 20 - 22

Zainal Arifin mengemukakan objek evaluasi pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Program Pembelajaran yang meliputi:
  - a) Tujuan pembelajaran umum (KD)
  - b) Materi, berupa topik/pokok bahasan dan subpokok bahasan.
  - c) Metode Pembelajaran.
  - d) Media pembelajaran.
  - e) Sumber belajar
  - f) Lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga.
  - g) Proses penilaian dan hasil belajar
- 2) Proses pelaksanaan pembelajaran, meliputi:
  - a) Kegiatan pembelajaran
  - b) Guru, terutama dalam hal menyampaikan materi, problema guru, dan lain-lain.
  - c) Peserta didik, terutama dalam hal peransertanya dalam kegiatan belajar.
- 3) Hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek atau jangka menengah dan jangka panjang.<sup>161</sup>

Berbeda dengan evaluasi pendidikan secara umum di atas, objek evaluasi pendidikan Islam dalam arti yang umumnya adalah peserta didik, atau dalam arti khusus adalah aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta didik. Peserta didik tidak saja sebagai objek evaluasi, tetapi juga sebagai subjek evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi pendidikan Islam dapat dilakukan dengan dua

---

<sup>161</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan ...*, h. 271-273



cara, yaitu evaluasi diri sendiri (*self evaluation*) dan evaluasi terhadap orang lain (peserta didik).

Sasaran/objek evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat empat kemampuan (kompetensi) peserta didik, yaitu:

- 1) Sikap dan pengalaman yang berhubungan pribadinya dengan tuhan,nya,
- 2) Sikap dan pengalaman terhadap arti berhubungan dirinya dengan masyarakat.
- 3) Sikap dan pengalaman terhadap arti berhubungan dirinya dengan alam sekitarnya.
- 4) Sikap dan pendangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, dan selaku *khalifah*-Nya di muka bumi.<sup>162</sup>

Sementara itu, aspek khusus yang menjadi sasaran (objek) evaluasi pendidikan Islam, yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dapat dilihat beberapa sudut pandang, yaitu:

- 1) Dilihat dari sudut tujuan umum pendidikan Islam

Tujuan umum pendidikan Islam adalah adanya *taqarrub* dan penyerahan mutlak peserta didik kepada Allah SWT,<sup>163</sup> seperti yang terdapat pada QS. ash-Sh f: 3 berikut ini:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

- 2) Dilihat dari sudut fungsi pendidikan Islam

Fungsi pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi peserta didik dan transinternalisasi nilai-nilai Islam serta mempersiapkan segala kebutuhan masa depan peserta didik.

Evaluasi ini meliputi aspek-aspek:

---

<sup>162</sup> Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 212

<sup>163</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, h. 201

- a) Perkembangan pendayagunaan potensi-potensi peserta didik, misalnya potensi *ijtih d, jih d, tajd d*, emosi (*qolb/rasa*), kognisi (*aql/cipta*), dan konasi (*nafs/karsa*);
  - b) Perkembangan perolehan, pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Islam; dan
  - c) Perkembangan perolehan kelayakan hidup, baik hidup yang bersifat duniawi dan ukhrawi.
- 3) Dilihat dari sudut dimensi-dimensi kebutuhan hidup dalam pendidikan Islam
- Dimensi-dimensi kebutuhan hidup manusia, yaitu ada kalanya berdasarkan kebutuhan asasi hidup manusia, seperti kebutuhan *dhar riyah* (primer), kebutuhan *h jjah* (sekunder), dan kebutuhan *tahs niyah* (pelengkap untuk memperindah). Ada juga berdasarkan segi-segi yang terdapat pada psikopisik manusia seperti segi jasmaniah, *aqliyah*, *akhlaqiyah*, *ijtimaiyah* (sosial) dan *jam liyah* (artistik/seni).<sup>164</sup>
- 4) Dilihat dari domain atau ranah yang terdapat pada diri peserta didik
- Benyamin S. Bloom dalam bukunya *Taxonomy of Educational Objectives the Classification of Educational Goals*, menguraikan bahwa ranah pendidikan itu dikelompokkan dalam tiga domain, yaitu; *cognitive, affective, and psychomotor domains*. Sementara itu, dalam pendidikan Islam dicoba diselaraskan pendapat Bloom tersebut, dimana sebagian pakar pendidikan Islam mengatakan *cognitive* disejajarkan dengan pengertian *ta' l m*, *affective* sama dengan *ta' d b* dan *tazkiyah*, dan *psychomotor* sama dengan *tarbiyah*.

---

<sup>164</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, h. 202

a) Domain Kognitif

Ranah ini mempunyai enam tingkatan dari yang paling rendah; pengetahuan dasar (fakta, peristiwa, informasi, istilah) sampai yang paling tinggi: evaluasi (pandangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pemikiran) sehingga merupakan suatu hierarki.<sup>165</sup> Seperti dikemukakan sebelumnya, ranah kognitif/pengetahuan dasar dalam pandangan pendidikan Islam disamakan dengan konsep *ta'lim*, maksudnya pengetahuan dasar yang berisi informasi dan fakta, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 31 yang berbunyi:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Kata '*allama* berarti mengajarkan pengetahuan yang bersifat kognitif, dan pada ayat selanjutnya, Adam as diperintah untuk menyampaikan pengetahuan yang sudah diajarkan Allah SWT kepada para malaikat-Nya.

b) Domain Afektif

Hasil belajar afektif tidak dapat dilihat bahkan diukur seperti halnya pengetahuan pada ranah kognitif. Guru tidak dapat langsung mengetahui apa yang berkejolak dalam hati anak didik, apa yang dirasakannya, apa yang sedang dipikirkannya atau yang diyakininya. Padahal dalam pendidikan Islam terutama pendidikan tauhid (aqidah) banyak sekali hal-

---

<sup>165</sup> S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bima Aksara, 1989), h.65

hal yang menyangkut hati yang merupakan ranah afektif ini. Domain afektif sering juga diartikan dengan nilai dasar. Oleh karena itu dalam pendidikan Islam lebih cenderung kepada *ta'dib* dan *tazkiyah*, maksudnya bahwa akhlak/adab dan *muh sabah an nafs (self evaluation)* merupakan cerminan dari aqidah yang murni yang tertanam di dalam hati seorang peserta didik.

Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan ranah afektif ini adalah:

وقال ابو بكر الصديق رضى الله عنه للرسول الكريم: لقد طفت العرب, وسمعت فصحاءهم, فما رأيت ولا سمعت مثلك أحدا ... فمن أدبك؟  
عليه وسلم ((<sup>166</sup>))

Domain afektif menyangkut penerimaan atau penghayatan dalam diri siswa yang mengkristal dalam dirinya sehingga akan melahirkan perilaku sesuai dengan penerima dan penghayatan terhadap satu konsep, prinsip dan bahkan keyakinan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan domain ini jauh lebih pelik/sulit/rumit dibandingkan mencapai dan mengevaluasi tujuan domain kognitif.

c) Domain Psikomotor

Menurut S. Nasution, ranah ini kurang mendapat perhatian para pendidik dibandingkan dengan kedua ranah lainnya. Akhir-akhir ini gerakan

---

<sup>166</sup> Muhammad Athiyah al-Abrasyi, at *Tarbiyah al Isl miyah wa Fal sifatuha*, (Mesir: Percetakan 'Is al Y bii al Halaby, tth), h. 110

kesehatan dan kesegaran (fisik dan mental) kembali memusatkan perhatian kepada ranah psikomotor ini.<sup>167</sup>

Dalam pendidikan Islam, malah sebaliknya ranah ini mendapat perhatian yang sangat serius bagi guru agama Islam, dimana pelaksanaan ibadah lebih banyak dipraktikkan atau pemberian keterampilan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, seperti pembelajaran wudhu, tayamun, shalat, dan haji.

Ranah psikomotor merupakan ranah gerak yang membentuk satu keterampilan fisik dalam Islam, mengajarkan tentang tatacara shalat, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadits beliau:

حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال: فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة مرتبة وقال في حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلى. (رواه البيهقي)<sup>168</sup>

Garis besar ranah psikomotor adalah sebagai berikut:

- (1) Gerak refleks
- (2) Gerak dasar yang fundamental, meliputi: gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulasi.
- (3) Keterampilan perseptual, meliputi: diskriminasi kinestetik, visual, auditoris, dan dikriminasi taktif, serta perceptual yang terkoordinir.
- (4) Keterampilan fisik, meliputi: ketahanan, kekuatan, keluwesan dan kelincahan.
- (5) Gerak terampil, meliputi: keterampilan adaptif yang sederhana, adaptif gabungan dan keterampilan adaptif yang kompleks.
- (6) Komunikasi non-diskursif, meliputi: gerak ekspresif, dan gerak interpretatif.<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, ..., h. 72

<sup>168</sup> Maktabah Syamilah: *Kitab Hadits as sunan al Kabier al Baihaqy*, juz 2, h. 345

<sup>169</sup> S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, ..., h. 72

Semua gerakan fisik yang memerlukan latihan dan bimbingan akan membentuk satu *skill* atau keterampilan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan. Dalam pendidikan Islam aspek, psikomotor atau *skill* ini menjadi perhatian ustadz dan ustadzah dalam pendidikan keagamaan (diniyah).

### c. Kebermaknaan Hasil Evaluasi dalam Pendidikan Islam

Evaluasi sebagai *feed back* terhadap kegiatan pendidikan dan pembelajaran harus dapat berfungsi dan bermakna bagi berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, hasil evaluasi dapat memberikan kebermaknaan dan dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan, baik terhadap program maupun produk pendidikan.

Kebermaknaan hasil evaluasi dapat dilihat dari fungsi evaluasi itu sendiri, yaitu berfungsi sebagai umpan balik (*feed back*) terhadap kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Umpan balik (*feed back*) ini berguna sebagai:

- 1) *Ishlah*, yaitu perbaikan terhadap semua komponen pembelajaran, termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan-kebiasaan peserta didik.
- 2) *Tazkiyah*, yakni penyucian, maksudnya melihat kembali program-program pendidikan yang dilakukan, apakah program tersebut penting atau tidak dalam kehidupan peserta didik, ataukah menyimpang dari program atau tujuan semula.
- 3) *Tajdid*, yaitu memodernisasikan semua kegiatan pendidikan. Kegiatan yang tidak relevan dengan kepentingan semua pihak maka akan diubah dan dicarikan gantinya ke arah yang lebih maju.
- 4) *Al dakhil*, yaitu masukan sebagai laporan bagi orang tua murid berupa rapor, ijazah, piagam dan sebagainya.<sup>170</sup>

Supaya evaluasi hasil belajar dapat memberikan makna terhadap perbaikan baik dalam makna *tazkiyah*, *tajd d* maupun *ishlah*, maka evaluasi

---

<sup>170</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan ...*, h. 204-205

harus dilaksanakan dengan berbagai prinsip dan kriteria yang valid dan reliabel, sehingga alat ukur yang digunakan tepat terhadap apa yang mau diukur. Selain itu, perlu adanya kriteria yang efektif digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pendidikan Islam yang berfokus pada hasil belajar (*outcomes*). Oleh karena itu, para pendidik dan pengajar perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Reaksi dari peserta didik terhadap proses dan isi kegiatan pembelajaran;
- 2) Pengetahuan atau proses yang belajar yang diperoleh melalui pengalaman pendidikan (*learning experience*);
- 3) Perubahan perilaku individu peserta didik disebabkan adanya kegiatan pendidikan; dan
- 4) Hasil atau perbaikan yang dapat diukur baik secara individu maupun organisasi (kelembagaan).<sup>171</sup>

Evaluasi pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik (ustadz dan ustadzah) harus berorientasi dan fokus pada *outcome* pendidikan, sehingga apa yang dipelajari peserta didik dapat dirasakan hasilnya, baik bagi individu peserta didik maupun masyarakat.

Selanjutnya makna evaluasi hasil belajar bila dilihat dari penggunaannya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Makna bagi siswa

Salah satu fungsi penilaian adalah untuk mengetahui sejauhmana siswa berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru, apakah memuaskan atau tidak. Beranjak dari evaluasi tersebut, siswa akan dapat mengetahui

---

<sup>171</sup> Veithzal Rivai, Zainal dan Fauzi Bahar, *Islamic Education Management dari Teori ke Praktik (Mengelola Pendidikan secara Profesional dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 34

efektivitas cara dan teknik belajarnya selama ini, sehingga diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan prestasi belajarnya.

2) Makna bagi guru

- a) Dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui siswa-siswa yang belum berhasil menguasai bahan.
- b) Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan.
- c) Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum.

3) Makna bagi sekolah

- a) Dengan kegiatan penilaian yang dilakukan guru dapat diketahui pula apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum.
- b) Informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang.
- c) Informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun, dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah, yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum.<sup>172</sup>

4) Bagi orangtua, adalah:

- a) Dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar anaknya
- b) Dapat meningkatkan pengawasan dan bimbingan belajar anak

---

<sup>172</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi ...*, h. 6



- c) Untuk dapat mengarahkan pada pilihan jurusan atau keahlian pada pendidikan berikutnya yang lebih tinggi
- 5) Bagi masyarakat, meliputi:
- a) Untuk mengetahui kemajuan sekolah
  - b) Untuk memberikan kritik yang membangun dan saran-saran bagi kemajuan sekolah
  - c) Untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam membantu lembaga pendidikan.<sup>173</sup>

Dengan demikian, evaluasi hasil belajar dalam pendidikan Islam diharapkan dapat bermakna sebagai *feed back* bagi semua pihak, yaitu bagi siswa, guru, sekolah, orangtua, dan bahkan bagi masyarakat sebagai pengguna (*the user*) lulusan (*output*) dari lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan sepatutnya bagi penyelenggara evaluasi agar dapat memberikan data hasil evaluasi yang tepat, akurat dan akuntabel kepada berbagai pihak, sehingga data hasil evaluasi dapat dipergunakan untuk menilai sebuah kurikulum pada lembaga pendidikan, baik sekolah maupun lembaga pendidikan keagamaan.

d. Program *Remedial* dan Standar Ketuntasan Minimal (SKM)

Program *remedial teaching* atau istilah lain adalah program perbaikan pembelajaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Program *remedial teaching* merupakan kegiatan lanjutan dari hasil evaluasi pembelajaran yang mana

---

<sup>173</sup> Chobib Toha dalam Murdan, *Evaluasi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pengantar)*, (Banjarmasin: Cyprus, 2007), h. 18

sebagian peserta didik yang skor atau nilainya berada di bawah standar ketuntasan minimal (SKM) belajar yang telah ditetapkan sekolah atau madrasah.

Dari segi arti katanya, *remedial* atau *remedy* berarti “*a treatment, medicine, etc.*”<sup>174</sup> dengan kata lain berarti mengobati atau menyembuhkan atau membuat menjadi lebih baik. Sementara istilah *remedial classes/lessons/groups (remedial teaching)* berarti “*consisting of pupils who are lower at learning or have fallen behind the others.*”<sup>175</sup> Jadi *remedial teaching* merupakan suatu bentuk pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pembelajaran bagi siswa yang memperoleh nilai yang rendah, agar hasil yang dicapai lebih baik daripada pembelajaran yang diberikan sebelumnya. Pembelajaran yang dimaksud adalah mengulang dari pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya terutama terhadap materi yang dianggap belum dikuasai atau belum tuntas oleh peserta didik, dimana hasil belajar yang telah dicapai belum mencapai standar minimal ketuntasan.

Program *remedial teaching* yang baik pada prinsipnya perlu didasarkan pada diagnostik awal dan disertai dengan tindak lanjut yang berkelanjutan (*continue*). Oleh karena itu, Sukardi mengemukakan beberapa kegiatan yang mestinya dilakukan guru, yaitu:

- 1) Perlu diadakan pencerahan kepada peserta didik bahwa tujuan program remedi adalah mengatasi kesulitan belajar;

---

<sup>174</sup> A. S. Hornby, Oxford Advance Learner's ..., h. 989

<sup>175</sup> A. S. Hornby, Oxford Advance Learner's ..., h. 989

- 2) Perlu menilai keberhasilan program remidi yang dilakukan secara berkelanjutan;
- 3) Evaluasi remidi memiliki arti penting bagi orang-orang terdekat peserta didik tertuma orangtua/wali murid; dan
- 4) Perlu membangun kembali rasa percaya diri peserta didik bahwa mereka pasti bisa.<sup>176</sup>

Program *remedial teaching* sudah direncanakan oleh guru di dalam program semester, biasanya dilaksanakan setelah ulangan bulanan, setelah ulangan tengah semester (UTS), dan setelah ulangan akhir semester (UAS), juga sebelum pembagian buku rapor atau sebelum kenaikan kelas.

Menurut hemat penulis bentuk kegiatan *remedial teaching* dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya:

- 1) Dengan membelajarkan kembali materi sebelumnya kepada peserta didik yang belum tuntas SKM-nya;
- 2) Meminta peserta didik untuk mempelajari kembali materi tersebut dan membuat resumennya;
- 3) Meminta peserta didik untuk menjawab soal ulangan yang sudah direvisi; atau
- 4) Peserta didik menjawab soal baru terkait dengan materi yang belum tuntas nilainya.

Program *remedial teaching* dilakukan apabila ada peserta didik yang belum tuntas terhadap SKM materi pokok (tema/subtema) maupun SKM kurikuler, setelah mengikuti ulangan formatif atau ulangan sumatif. *Remedial*

---

<sup>176</sup> M. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan ...*, h. 235-236

*teaching* dilaksanakan maksimal dua kali kegiatan. Apabila sudah dua kali kegiatan *remedy* namun masih ada peserta didik yang belum tuntas, maka diambil nilai yang tertinggi dari hasil *remedial*. Adapun siswa yang tuntas SKM setelah mengikuti program *remedial*, maka nilainya tidak boleh melebihi SKM yang ada.<sup>177</sup>

Dalam melaksanakan evaluasi tidak hanya melihat ketuntasan peserta didik terhadap KD-KD yang harus dicapainya, melainkan ketuntasan soal juga akan diperhatikan atau dievaluasi apabila ada beberapa soal yang sebagian besar peserta didik belum berhasil menjawab soal-soal tersebut, berarti soal-soal tersebut perlu dipelajari, dan diperbaiki atau direvisi oleh guru yang bersangkutan.

Beberapa pendekatan dalam program *remedial teaching* pada akhirnya dikembangkan oleh guru ke dalam berbagai strategi pelayanan program *remedial*, yaitu:

- 1) Pendekatan kuratif, pendekatan yang dilakukan setelah diketahui adanya siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran. Tiga strategi yang dapat dikembangkan oleh guru, yaitu: strategi pengulangan, pengayaan dan pengukuhan serta strategi percepatan.
- 2) Pendekatan preventif, pendekatan yang ditujukan kepada siswa yang pada awal kegiatan belajar telah diduga akan mengalami kesulitan belajar. Strategi pengajaran yang dapat dilakukan, yaitu kelompok homogen, individual, kelas khusus.
- 3) Pendekatan yang bersifat pengembangan, pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa kesulitan siswa harus diketahui guru sedini mungkin agar dapat diberikan bantuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Departemen Diknas, *Pedoman Pelaksanaan Remedial Teaching Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)*, Jakarta: Dirjen. Dikdasmen, 1995), h. 124

<sup>178</sup> Ahmad Husain, *Program Remedial Teaching dan Program Pengayaan*, (Jakarta: Kencana Prameda, 2012), h. 156

Dari tiga pendekatan di atas, pendekatan yang banyak digunakan oleh guru adalah pendekatan kuratif, karena dengan alasan untuk memenuhi tuntutan atau target kurikulum supaya peserta didik dapat mencapai standar ketuntasan minimal (SKM) yang sudah ditetapkan sekolah/madrasah. Sementara itu, SKM merupakan standar atau kriteria untuk menentukan penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Untuk menetapkan SKM masing-masing sekolah/madrasah berbeda, berbeda mata pelajaran berbeda pula standarnya. Hal ini tergantung pada ketetapan sekolah/madrasah juga mudah dan sukarnya isi materi pelajaran yang terkandung dalam mata pelajaran.

Pada permulaan berlakunya kurikulum KBK, standar ketuntasan belajar siswa ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan mata pelajaran, yang dikenal dengan singkatan SKBM (standar ketuntasan belajar minimal). Namun setelah penyempurnaan kurikulum KBK 2004 menjadi KTSP tahun 2006, maka standar ketuntasan belajar peserta didik ditentukan berdasarkan mekanisme tersendiri, yang diistilahkan dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Berbeda dengan SKBM, KKM lebih rinci, yaitu KKM kompetensi dasar (KD). KKM standar kompetensi (SK) sampai KKM mata pelajaran (MP).

a. Unsur-unsur KKM

Unsur-unsur menentukan KKM pada mata pelajaran (MP).<sup>179</sup> Dalam menentukan KKM suatu mata pelajaran, terlebih dahulu diketahui beberapa unsur atau komponen dalam menentukan KKM, baik KKM KD sampai kepada KKM mata Pelajaran, yaitu:

---

<sup>179</sup> Bahan dari: *Penataran Evaluasi kurikulum KTSP 2006*, (2007), h. 25

1) Kompleksitas Indikator (KI)

Yaitu tingkat kesulitan indikator belajar yang bakal dicapai oleh peserta didik;

- a) KI yang mudah 81 – 100
- b) KI yang sedang 65 – 80
- c) KI yang sulit 50 - 64

2) Daya Dukung (DD)

Yaitu fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran terkait dengan mata pelajaran tertentu, dengan kriteria:

- a) DD yang ada dan lengkap 81 – 100
- b) DD yang ada dan cukup lengkap 65 – 80
- c) DD yang tidak atau kurang 50 – 64

3) Intake Siswa (IS)

Intake Siswa (IS) adalah nilai yang diambil dari nilai rata-rata peserta didik dalam mata pelajaran yang sama atau sesuai dengan mata pelajaran yang ada.

Caranya: jumlah nilai mata pelajaran tertentu seluruh siswa dibagi jumlah siswa itulah nilai rerata kelas yang menjadi intake siswa, sebagai contoh ada 10 siswa dalam satu kelas, nilai mata pelajara Fiqih adalah: 75, 70, 69, 76, 82, 80, 70, 85, 72, dan 80. Total  $759/10 = 75,9$ . IS = 76

b. Teknis menentukan KKM

Untuk menentukan KKM adalah:

1) Menentukan KKM Indikator adalah  $KI + DD + IS/3 = kkm \text{ Ind}$ ;

Contoh:  $73 + 62 + 76 = 211/3 = 70,33$  berarti KKM Ind = 70

2) Menentukan KKM KD adalah jumlah total KKM ind/jumlah indikator

Contoh: terdapat 4 KKM ind, yaitu: 70, 72, 73, dan 68. Caranya:

$$70 + 72 + 73 + 68 = 283/4 = 70,75. \text{ KKM KD adalah: } 71$$

3) Menentukan KKM SK adalah jumlah total KKM KD dibagi jumlah KD;

4) Menentukan KKM Mapel adalah jumlah total KKM SK/jumlah SK.

Cara mencari KKM SK adalah rata-rata KKM KD sampai ditemukan KKM

Mata Pelajaran, seperti tabel berikut:

No	SK	KD	Indikator	KI	DD	IS	Skm Ind	Skm Kd	Skm SK	Skm MP
1	SK1	KD1	Ind.1	78	70	76	75	72	73	
			Ind.2	75	70	76	74			
			Ind.3	70	65	76	70			
			Ind.4	68	65	76	70			
		KD2	Ind.1	81	70	76	76	73		
			Ind.2	73	70	76	73			
			Ind.3	65	68	76	70			
2	SK2	KD1	Ind.1							
			Ind.2							
			Dst....							

Setiap kompetensi dasar (KD) minimal memiliki tiga indikator (ind) yang mencakup indikator kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam konteks pendidikan Islam konsep kognitif, afektif, dan psikomotor disejajarkan dengan konsep *ta'lim*, *ta'd b/tazkiyah* dan *tarbiyah*. Dengan demikian setiap indikator jelas terukur dan diketahui ketercapaiannya, apakah sudah tuntas KD-nya atau belum, jika belum tercapai SKM KD atau SKM SK maka peserta didik harus mengikuti program *remedial teaching*.

